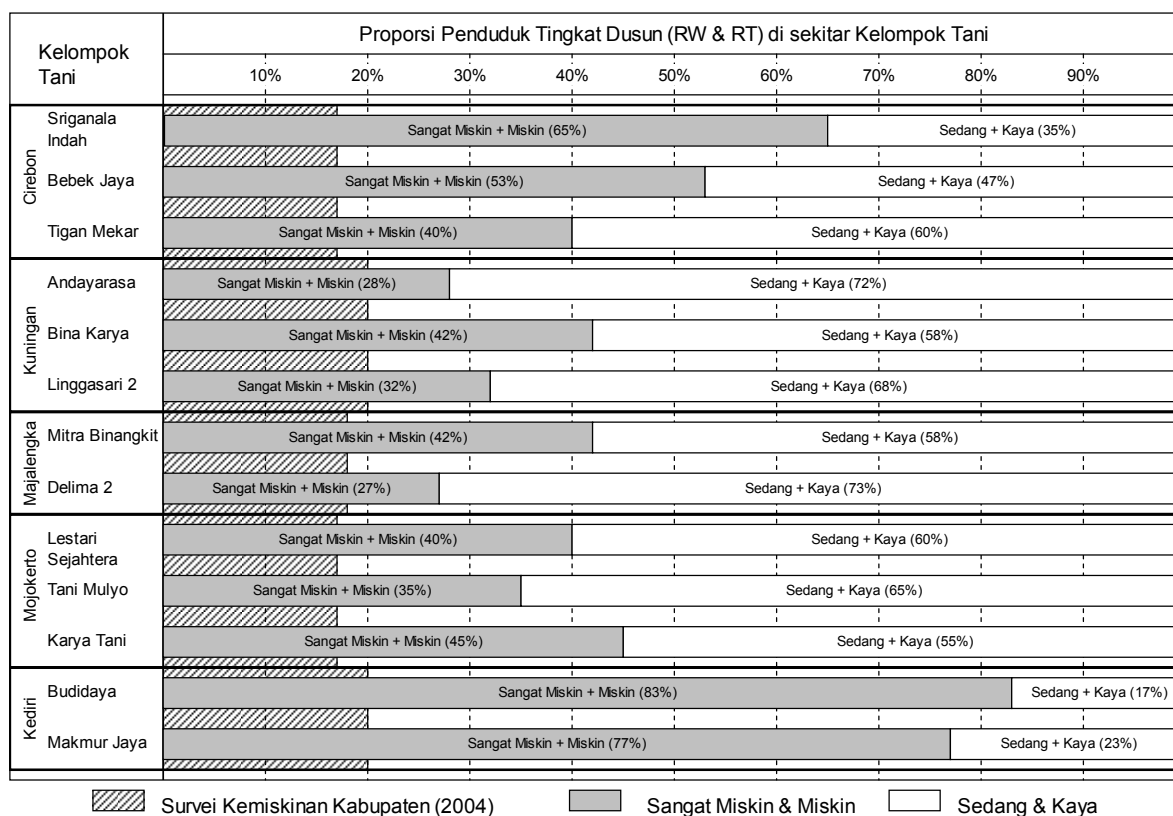


BAB 4 PENDEKATAN PERBAIKAN DASAR

4.1 Pendekatan Perbaikan Dasar

4.1.1 Kemiskinan dan Kelompok Sasaran

Wilayah Studi merupakan wilayah miskin dibandingkan dengan rata-rata nasional. Rasio populasi miskin rata-rata nasional adalah 16.7%, sedangkan persentase terendah adalah di Mojokerto yaitu 17.2% dan tertinggi 19.6% di Kediri pada tahun 2004. Garis kemiskinan resmi di tiap kabupaten adalah berkisar antara Rp.113,000 hingga Rp.141,000 dari pengeluaran per kapita per bulan pada wilayah Studi, menurut data statistik (Tabel 20: Indeks Kemiskinan pada Bab 3). Di sisi lain, hasil dari survei tingkat kemiskinan pada tingkat masyarakat menunjukkan bahwa petani mengungkapkan perasaan yang berbeda mengenai tingkat kemiskinan di masyarakat mereka, bahkan tingkat pengeluaran mereka lebih daripada garis kemiskinan resmi, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 4.1.1 yang dirangkum dalam Gambar 29 berikut ini:



Gambar 29 Hasil Survei Tingkat Kemiskinan pada Komunitas Petani

Jangkauan dan persentase indikator yang ditentukan untuk survei tingkat kemiskinan pada tiap komunitas ditunjukkan pada Tabel 4.1.1, dan jangkauan batas antara kelas miskin dan sedang dirangkum dibawah ini:

Tabel 57 Batas Tingkat Pendapatan dalam Survei Tingkat Kemiskinan menurut Komunitas

Batas Pendapatan antara Kelas Miskin dan Sedang	Jumlah Komunitas dan Jangkauan Pendapatan
Rp.125,000 hingga Rp.150,000 per kapita per bulan	2 komunitas yaitu Karya Tani (Mojokerto: itik), Makmur

Batas Pendapatan antara Kelas Miskin dan Sedang	Jumlah Komunitas dan Jangkauan Pendapatan
	Jaya (Kediri: Mangga) 45% hingga 77% anggota masyarakat ada pada tingkat pendapatan kurang dari Rp.125,000 hingga Rp.150,000
Rp.250,000 hingga Rp.300,000 per kapita per bulan	7 komunitas yaitu Bebek Jaya (Cirebon: Itik), Bina Karya dan Linggasari 2 (Kuningan: ubi jalar), Mitra Binangkit dan Delima 2 (Majalengka: ubi jalar), Tani Mulyo (Mojokerto: itik), Budi Daya (Kediri: Mangga) 27% hingga 83% anggota masyarakat berpendapatan kurang dari Rp.250,000 hingga Rp.300,000
Rp.500,000 hingga Rp.750,000 per kapita per bulan	4 komunitas yaitu Sigranala Indah, Tigan Mekar (Cirebon: itik), Andayarasa (Kuningan: ubi jalar), Lestari Sejahtera (Mojokerto: itik) 35% hingga 72% anggota masyarakat berpendapatan lebih dari Rp.500,000 hingga Rp.900,000

Sumber: Tabel 4.1.1, hasil dari Survei Tingkat Kemiskinan yang dilakukan JICA Study Team bulan September sampai Oktober 2006.

Tabel diatas menunjukkan bahwa rasa dan tingkat kemiskinan pada tiap komunitas berbeda satu sama lain. Pada situasi seperti ini petani merasa bahwa mereka masih hidup dalam keadaan yang hampir miskin dan mereka memohon bantuan untuk menggiatkan kembali kegiatan untuk meningkatkan pendapatan, bukan bantuan untuk penghidupan dan kesejahteraan mereka. Beberapa petani menunjukkan motivasi mereka yang kuat serta kemampuan potensial mereka dalam meningkatkan pengolahan hasil pertanian sebagai sebuah usaha, serta kegiatan simpan pinjam, karena ini merupakan persyaratan bagi peningkatan pendapatan. Dalam hal ini, Kelompok Tani sasaran diharapkan untuk 1) memiliki keinginan untuk mandiri, 2) memahami pentingnya kemampuan manajemen, dan 3) mempertimbangkan beban kaum wanita dan kesetaraan gender.

4.1.2 Hubungan antara Pengolahan Hasil Pertanian dan Keuangan Mikro Pedesaan

Agar petani dapat meningkatkan pendapatan mereka dan mencapai kemandirian melalui pengolahan hasil pertanian yang ditunjang oleh keuangan, perlu dipertimbangkan aspek-aspek dibawah ini:

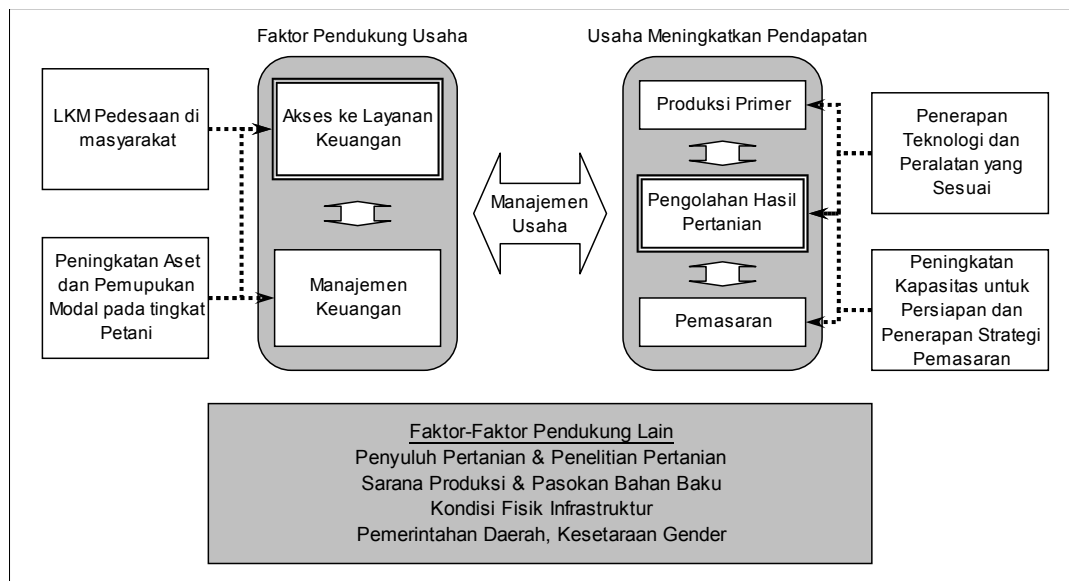
Kemampuan teknis dan pemasaran dalam usaha pengolahan merupakan aspek-aspek penting bagi usaha pengolahan pada tingkat petani dan Kelompok Tani. Teknologi yang tepat guna serta peralatan yang sesuai telah tersedia pada pusat-pusat penelitian lokal dan universitas. Akan tetapi, petani jarang mengetahui informasi tersebut dan tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk memanfaatkan teknologi yang tersedia. Oleh karena itu, penting untuk mendukung badan-badan tersebut untuk memfasilitasi kegiatan diseminasi dari teknologi yang tersedia kepada Kelompok Tani.

Strategi pemasaran juga penting untuk disusun dan diperbarui oleh masing-masing Kelompok Tani bagi perkembangan produk dan kegiatan pemasaran mereka. Produk-produk yang dapat diterima oleh konsumen dapat dikembangkan melalui persiapan strategi pemasaran berdasarkan atas informasi yang dikumpulkan dari pasar dan konsumen, baik secara langsung maupun melalui pengumpul dan perantara. Permintaan pasar dan keinginan konsumen akan

terus berubah sehingga produk dan metode penjualan harus disesuaikan dan dimodifikasi sesuai permintaan pasar. Di masa depan, dukungan bagi pengembangan kemampuan dari Kelompok Tani akan membantu mereka mempersiapkan dan melaksanakan strategi pemasaran masing-masing.

Mengenai keuangan mikro, petani membutuhkan layanan simpan pinjam bagi kegiatan usaha mereka, demikian halnya dengan anggota masyarakat pedesaan lainnya. Akan tetapi, mereka kurang memiliki akses ke layanan keuangan dengan persyaratan yang ringan dan dapat diterima, yang disebabkan oleh kesenjangan antara persediaan dan permintaan. Sehingga pembentukan lembaga keuangan mikro (LKM) di masyarakat diajukan dalam mengisi kesenjangan tersebut. Dalam proses pembentukan LKM, kemampuan manajemen keuangan Kelompok Tani harus dipadukan dengan peningkatan aset dan pemupukan modal untuk mencapai kemandirian.

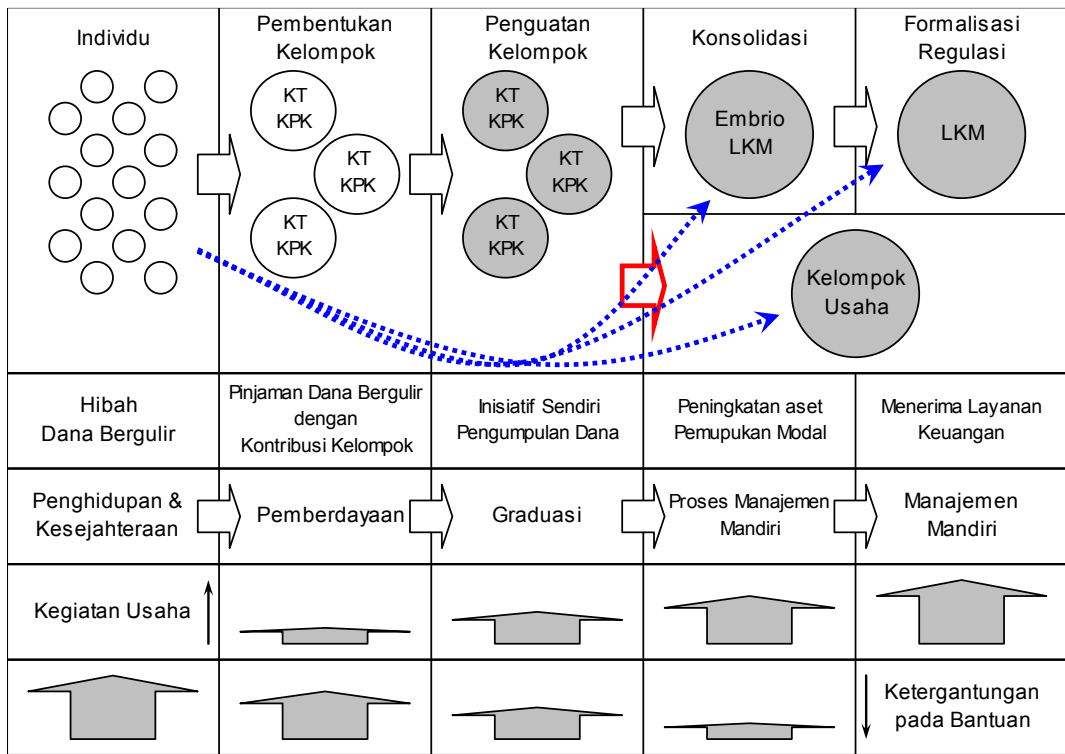
Banyak aspek yang lain yang dibutuhkan dalam mempromosikan pengolahan hasil pertanian dan keuangan mikro pedesaan, yang dikategorikan sebagai “faktor pendukung”, termasuk penelitian dan layanan penyuluhan, pasokan sarana produksi dan bahan baku, infrastruktur fisik pedesaan dan kesetaraan gender. Aspek-aspek tersebut saling berhubungan dan diperlukan hubungan yang sesuai guna membantu peningkatan pendapatan petani. Gambar hubungan tersebut ditunjukkan pada Gambar 30 berikut ini:



Gambar 30 Gambar Skema Hubungan

4.1.3 Transformasi Kelompok Tani menjadi Kelompok Usaha

Secara umum, tahapan dalam membentuk lembaga keuangan mikro (LKM) adalah petani harus bergabung dalam Kelompok Tani atau Kelompok Wanita Tani untuk kemudian mengubah bentuk menjadi LKM melalui Embrio LKM (LKM informal tetapi sudah diterima) melalui penguatan dan konsolidasi kelompok menjadi kelompok yang lebih besar. Proses transformasi tersebut diilustrasikan dalam Gambar 31:



KT: Kelompok Tani, KPK: Kelompok Petani Kecil, LKM: Lembaga Keuangan Mikro

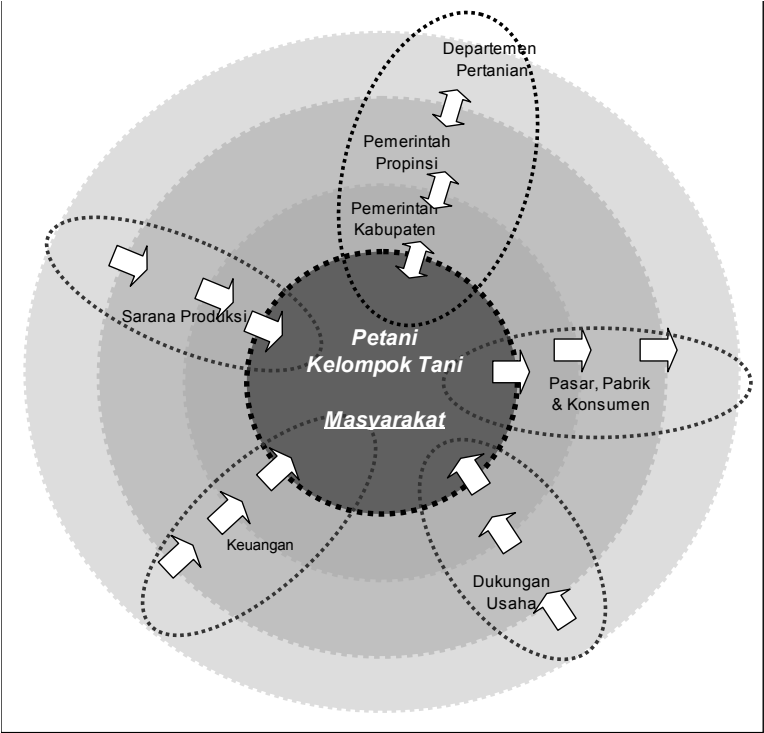
Gambar 31 Gambar Transformasi Kelompok Tani menjadi LKM/Kelompok Usaha

Dalam proses transformasi, kegiatan usaha akan ditingkatkan dan “pola pikir ketergantungan” akan berkurang sesuai dengan langkah-langkah pada setiap tahapan.

Sebenarnya, banyak kelompok yang sudah terbentuk sudah dikelola dibawah layanan petugas penyuluh lapangan, dan kelompok-kelompok tersebut akan diseleksi dan diubah bentuk melalui proses seleksi berdasarkan kriteria dan kesediaan mereka.

4.1.4 Interaksi antara Usaha Agribisnis Petani dengan Pengembangan Masyarakat Pedesaan

Kegiatan produksi dan pengolahan hasil pertanian yang dilakukan petani dan Kelompok Tani memanfaatkan bahan baku yang tersedia secara lokal, kemudian produk didistribusikan melalui pengumpul dan perantara menuju pasar lokal dan regional. Kegiatan ini memberi sumbangan kepada perekonomian masyarakat dan memperbaiki kondisi sosial ekonomi masyarakat. Di samping itu, kegiatan yang berbeda dalam pengembangan berbasis masyarakat menggairahkan dan memperluas produksi dan pengolahan hasil pertanian secara langsung maupun secara tidak langsung. Interaksi yang serupa juga diharapkan terjadi antara operasional keuangan mikro, anggota masyarakat dengan profesi yang beraneka, dan perekonomian masyarakat. Sehingga rencana perbaikan keuangan yang diajukan disini tidak hanya ditujukan kepada usaha agribisnis dan petani, tetapi juga termasuk anggota masyarakat lainnya. Oleh sebab itu, hubungan antara pengembangan masyarakat merupakan hal yang penting dalam promosi pengolahan hasil pertanian dan keuangan mikro pedesaan, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 32 dibawah ini:



Gambar 32 Interaksi dengan Masyarakat

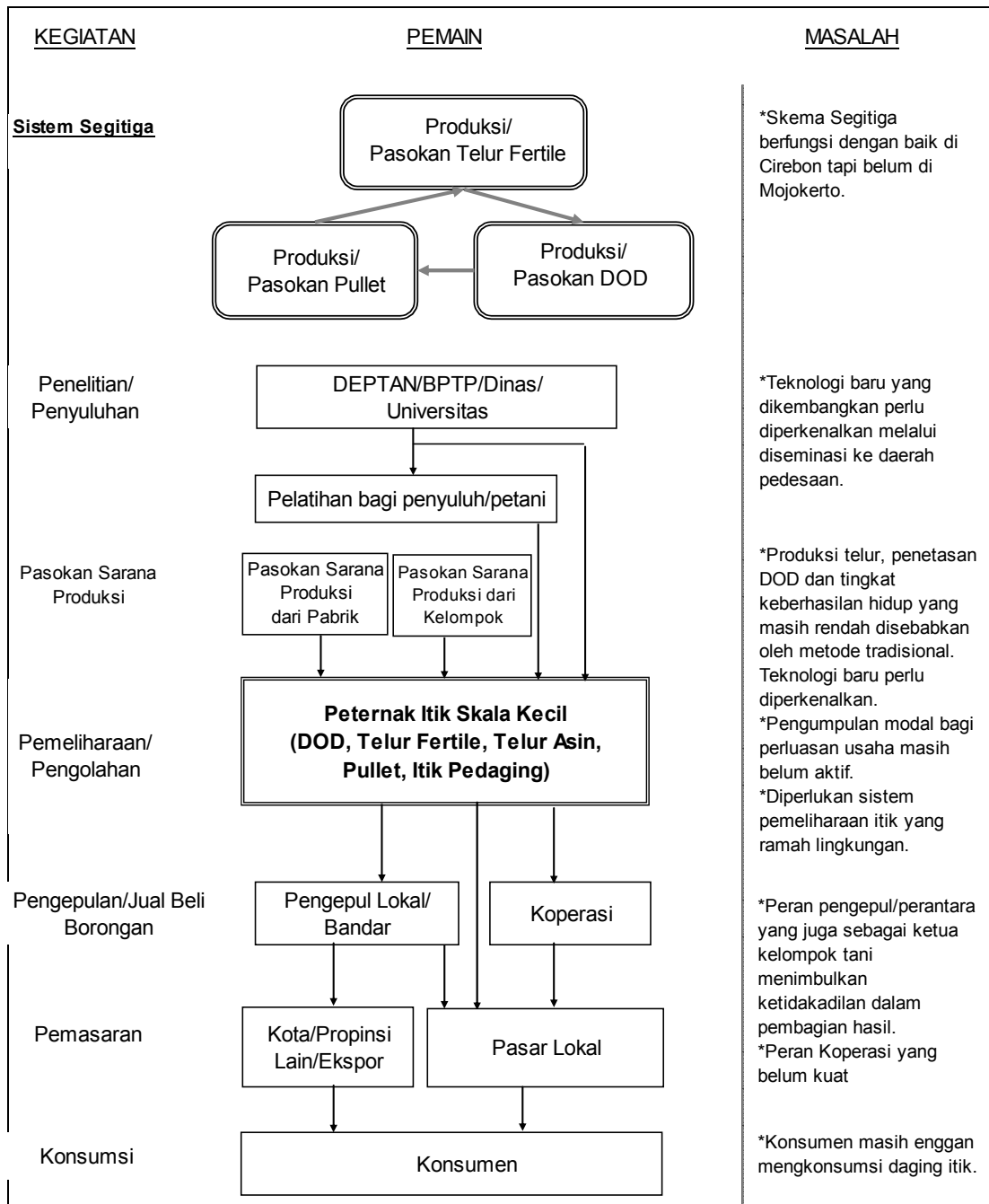
4.2 Langkah Perbaikan

4.2.1 Pengolahan Hasil Pertanian

(1) Itik di Kabupaten Cirebon dan Mojokerto

(a) Analisa Rantai Nilai

Rantai nilai dari usaha itik di Kab. Cirebon dan Mojokerto ditunjukkan pada Gambar 33. Berdasarkan pada rantai nilai ini, langkah perbaikan dijelaskan sebagai berikut:



Gambar 33 Alur Rantai Nilai Usaha Itik

(b) Langkah Perbaikan

Kabupaten Cirebon

Langkah berikut ini harus dipertimbangkan dalam peningkatan aspek produksi dan pengolahan.

- 1) Sistem segitiga akan diperkuat dan diterapkan di daerah lain hingga mencakup seluruh wilayah kabupaten.
- 2) Bantuan teknis akan diberikan oleh BPTP Bogor, IPB dan lembaga lain melalui seminar dan pelatihan kepada petani secara berkala guna meningkatkan pengetahuan tradisional mereka akan metode produksi, seperti teknologi inkubasi, meminimalisasi angka kematian DOD, meningkatkan produksi telur, memperkenalkan itik varitas baru, pemanfaatan kotoran itik dan sebagainya. Di samping itu harus ditekankan pula kepada petani mengenai masalah lingkungan untuk selalu menjaga kandang itik dan sekitarnya tetap terjaga bersih.
- 3) Alat penetas baru (jenis semi otomatis dengan menggunakan pemanas listrik dan alat pengatur kelembaban) akan diperkenalkan guna meningkatkan rasio inkubasi DOD dan lingkungan kerja petani.
- 4) Berbagai dukungan akan diberikan kepada Kelompok Tani dalam hal manajemen usaha, akuntansi, bagi hasil dan pengawasan untuk pengembangan lebih lanjut dan stabilitas usaha.
- 5) Permodalan bagi pengembangan usaha akan diberikan dalam bentuk pinjaman lunak, bukan dalam bentuk hibah. Pinjaman harus dikembalikan oleh Kelompok Tani sasaran karena pinjaman pokok yang dikembalikan akan digulirkan dalam bentuk pinjaman kepada Kelompok Tani berikutnya.
- 6) Kesempatan untuk mengembangkan usaha baru seperti pasar daging itik jantan muda, pemanfaatan bulu itik dan sebagainya harus dikembangkan oleh petani bersama dengan petugas dari Dinas Peternakan.

Kabupaten Mojokerto

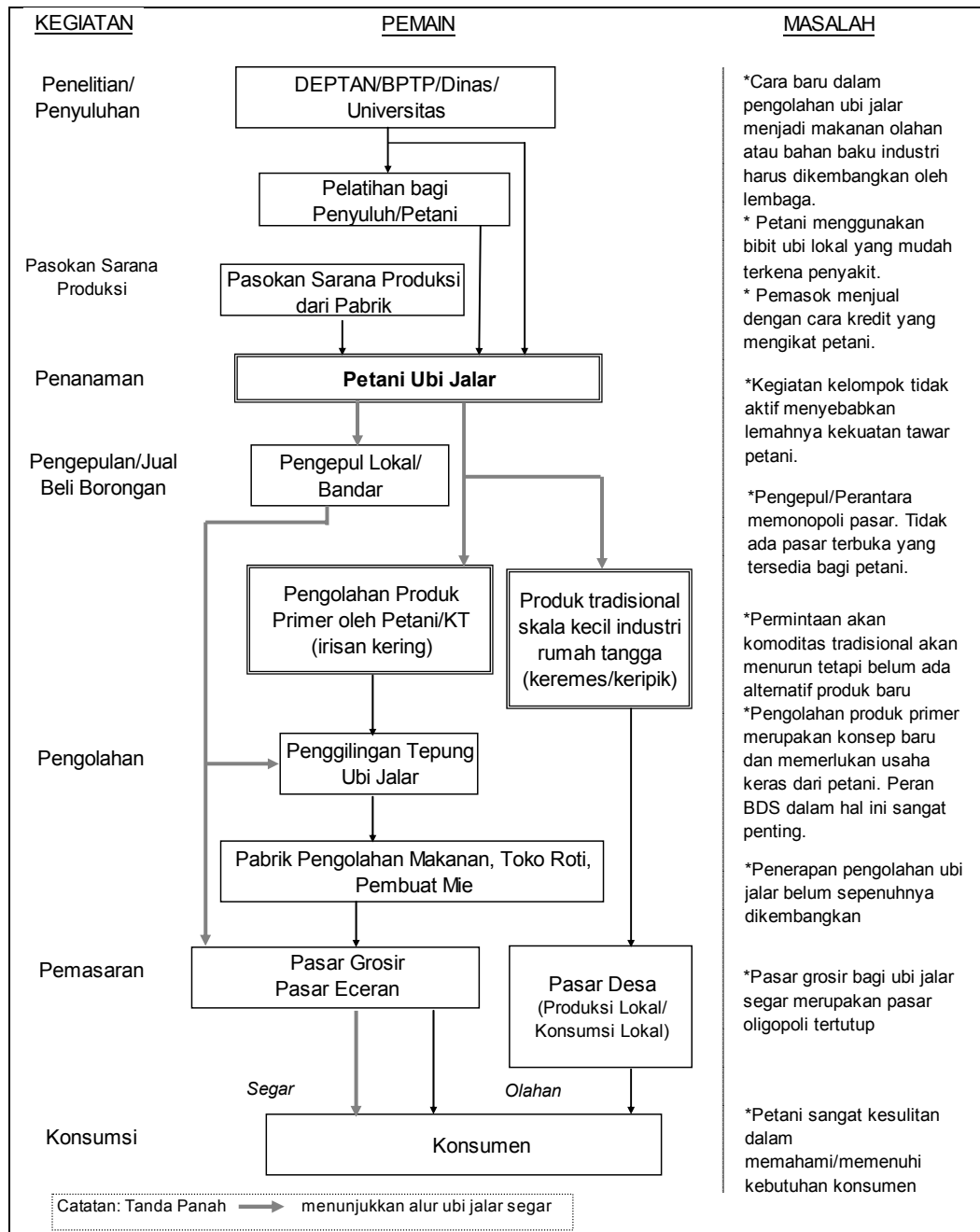
- 1) Sistem Segitiga: pembentukan pusat pemasok yang tepat bagi komoditas utama seperti telur fertile, DOD dan pullet akan terus digiatkan.
- 2) Bantuan teknis/penyuluhan akan diberikan oleh BPTP Malang, Universitas Brawijaya dan lembaga lain melalui seminar dan pelatihan bagi petani secara berkala seperti halnya di Cirebon.
- 3) Alat penetas baru (jenis semi otomatis dengan menggunakan pemanas listrik dan alat pengatur kelembaban) akan diperkenalkan untuk meningkatkan efisiensi.
- 4) Berbagai dukungan akan diberikan kepada Kelompok Tani dalam bidang manajemen usaha, akuntansi, bagi hasil dan pengawasan untuk pengembangan lebih lanjut dan stabilitas usaha.

5) Permodalan bagi pengembangan usaha akan diberikan dalam bentuk pinjaman lunak, bukan dalam bentuk hibah. Pinjaman harus dikembalikan oleh Kelompok Tani sasaran karena pinjaman pokok yang dikembalikan akan digulirkan dalam bentuk pinjaman kepada Kelompok Tani berikutnya.

(2) Ubi Jalar di Kabupaten Kuningan dan Majalengka

(a) Analisa Rantai Nilai

Rantai nilai dari usaha ubi jalar di Kab. Kuningan dan Majalengka ditunjukkan pada Gambar 34. Berdasarkan pada ilustrasi ini, langkah perbaikan dijelaskan sebagai berikut:



Gambar 34 Alur Rantai Nilai Usaha Ubi Jalar

(b) Langkah Perbaikan

Kabupaten Kuningan

Langkah berikut ini harus dipertimbangkan dalam peningkatan aspek produksi dan pengolahan.

- 1) Benih ubi jalar yang bebas penyakit harus diperbanyak dan disebarakan kepada petani.
- 2) Sistem distribusi benih berkualitas perlu dibentuk oleh Pemerintah.
- 3) Jenis makanan baru yang dihasilkan oleh ubi jalar untuk menggantikan makanan tradisional seperti keremes perlu dikembangkan oleh lembaga penelitian dan lembaga penyuluhan bagi kegiatan KT sebagai sumber peningkatan pendapatan.
- 4) KT yang memiliki produk unik seperti saus sambal atau es krim ubi jalar, dan sebagainya memerlukan kemampuan pemasaran. Sistem uji coba baru untuk memisahkan peran KT sebagai produsen dan pihak ketiga sebagai agen penjualan juga perlu dipelajari.
- 5) Pengembangan konsep baru yaitu nilai tambah melalui pengolahan produk primer harus dilaksanakan. Perusahaan tepung ubi jalar lokal dan KT harus bekerja sama dalam sebuah MOU untuk memasok irisan ubi jalar kering sebagai bahan baku pembuatan tepung. Penggunaan alat pengering tenaga surya untuk pengeringan ubi jalar dengan kondisi bersih juga harus diterapkan. Dalam hal ini dibutuhkan bantuan teknis dari BPTP Bogor atau IPB.
- 6) Berbagai dukungan akan diberikan kepada Kelompok Tani dalam hal manajemen usaha, akuntansi, bagi hasil dan pengawasan untuk pengembangan lebih lanjut dan stabilitas usaha.
- 7) Permodalan bagi pengembangan usaha akan diberikan dalam bentuk pinjaman lunak, bukan dalam bentuk hibah. Pinjaman harus dikembalikan oleh Kelompok Tani sasaran karena pinjaman pokok yang dikembalikan akan digulirkan dalam bentuk pinjaman kepada Kelompok Tani berikutnya.

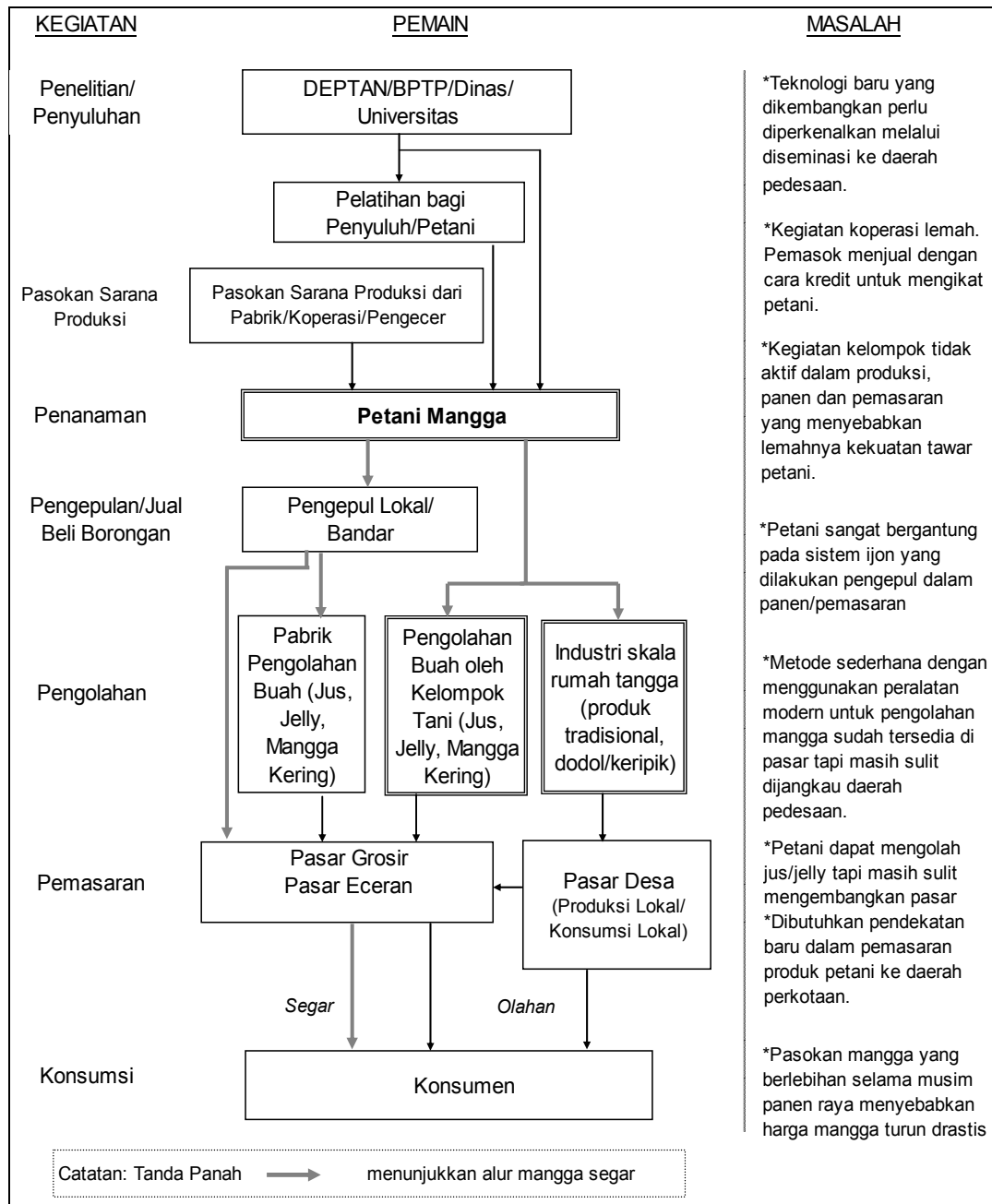
Kabupaten Majalengka

- 1) Benih ubi jalar yang bebas penyakit harus diperbanyak dan disebarakan kepada petani, seperti di Kuningan.
- 2) Jenis makanan baru yang dihasilkan oleh ubi jalar untuk menggantikan makanan tradisional seperti keremes perlu dikembangkan, seperti di Kuningan.
- 3) Berbagai dukungan akan diberikan kepada Kelompok Tani dalam hal manajemen usaha, akuntansi, bagi hasil dan pengawasan untuk pengembangan lebih lanjut dan stabilitas usaha.
- 4) Permodalan bagi pengembangan usaha akan diberikan dalam bentuk pinjaman lunak, bukan dalam bentuk hibah. Pinjaman harus dikembalikan oleh Kelompok Tani sasaran karena pinjaman pokok yang dikembalikan akan digulirkan dalam bentuk pinjaman kepada Kelompok Tani berikutnya.

(3) Mangga di Kabupaten Kediri

(a) Analisa Rantai Nilai

Rantai nilai dari usaha mangga di Kab. Kediri ditunjukkan pada Gambar 35. Berdasarkan pada ilustrasi ini, langkah perbaikan bagi pengolahan mangga dijelaskan sebagai berikut:



Gambar 35 Alur Rantai Nilai Usaha Mangga

(c) Langkah Perbaikan

Langkah perbaikan bagi produksi dan pengolahan mangga dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Teknologi baru bagi pengolahan mangga harus diuji coba terlebih dahulu di KT yang terseleksi dengan bantuan pendampingan.

- 2) KT yang akan dibantu dalam uji coba pengolahan tersebut harus memenuhi kriteria seperti memiliki organisasi yang kuat, kegiatan rutin, pengelolaan simpan pinjam dan khususnya kemampuan untuk pengolahan, pemasaran dan usaha.
- 3) Produksi mangga kering oleh KT harus diatur dalam kerjasama dengan proyek REI. KT yang terseleksi harus mendapatkan bantuan teknis dari REI serta lembaga seperti BPTP Malang dan Universitas Brawijaya. Pembagian jangkauan pasar (*market compartmentalization*) antara dan REI dapat diatur, misalnya, KT mengirim sebagian produk mereka ke REI untuk dipasarkan ke kota-kota besar dan pasar ekspor. Sedangkan KT sendiri yang akan menjual langsung produk mereka di pasar lokal di kecamatan dan kabupaten.
- 4) Proyek pengolahan jus mangga, puree dan jelly harus dimulai dari KT yang terseleksi sebagai uji coba. Teknologi dasar yang akan digunakan adalah teknologi sederhana dan mirip dengan yang selama ini digunakan oleh KT Lohjinawi di Kediri untuk pengolahan buah nenas. Bantuan teknis akan diberikan oleh Universitas Brawijaya.
- 5) Karena sifatnya uji coba, hanya sebagian dari permodalan (diajukan sebesar 20% dari total anggaran) akan diberikan dalam bentuk pinjaman lunak, sedangkan sisanya dalam bentuk hibah. Pinjaman lunak tersebut harus dikembalikan oleh Kelompok Tani yang terseleksi karena pinjaman pokok akan digulirkan kembali dalam bentuk pinjaman lunak ke Kelompok Tani berikutnya.
- 6) Setelah kedua pilot project tersebut diverifikasi dapat dilaksanakan (*feasible*) dan dapat dipertahankan (*sustainable*), proyek akan diperluas ke KT lain, yang telah memenuhi persyaratan kriteria yang ditetapkan oleh Dinas sebagai Kelompok Tani yang mampu di bidang pemasaran. Dengan keterlibatan banyak KT akan meningkatkan porsi pasar di daerah pedesaan dan perkotaan.
- 7) Pendekatan baru dalam pemasaran produk pedesaan yang diproduksi oleh KT juga akan dipelajari. Beberapa kasus dapat direncanakan sebagai berikut:
 - a. Membentuk usaha patungan (*joint venture*) atau perusahaan kemitraan antara KT dan sektor swasta (pihak ketiga). KT bertanggung jawab akan produksi mangga segar dan produk olahan, sedangkan pihak ketiga bertanggung jawab atas pemasaran. Pembagian permodalan investasi dan keuntungan harus ditentukan sebelumnya.
 - b. KT menunjuk agen penjualan dan menentukan wilayah jangkauan pasar. Agen bertanggung jawab untuk melakukan penjualan minimum per periode.
 - c. KT menunjuk tim pemasaran yang akan diberi sepeda motor untuk melakukan mobilitas. Tim tersebut harus diseleksi dari anggota yang memiliki talenta dan keterampilan pemasaran.
- 8) Berbagai dukungan akan diberikan kepada KT dalam bidang manajemen usaha, akunting, bagi hasil dan pengawasan.

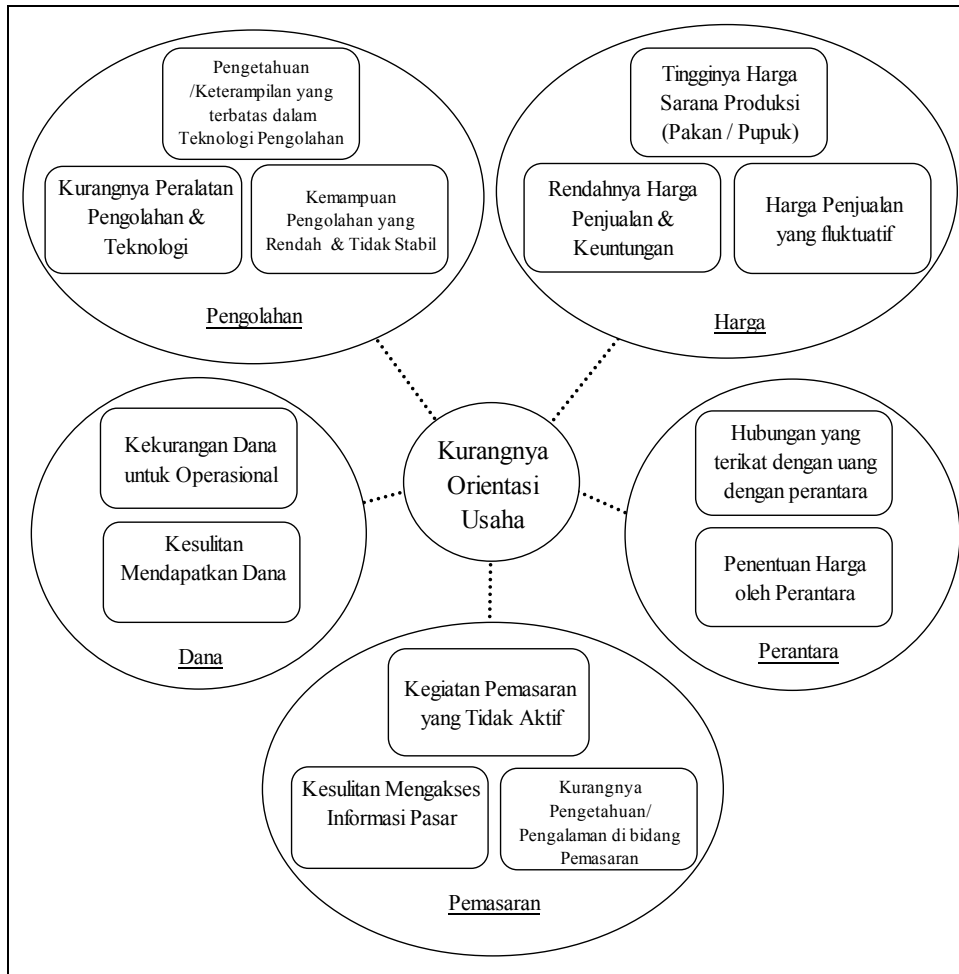
4.2.2 Pemasaran

(1) Analisa Masalah

Masalah pemasaran telah dibahas di Bab 3 dan dianalisa sebagai berikut:

- 1) Seleksi masalah dilakukan di 5 kabupaten dan 3 komoditas.
- 2) Identifikasi pokok masalah yang berhubungan dengan masalah-masalah lain.

Pokok masalah dalam hal ini diidentifikasi sebagai “*Kurangnya Orientasi Usaha*” berdasarkan pada analisa masalah seperti yang dijelaskan dalam Gambar 36 berikut ini:



Gambar 36 Analisa Masalah Pemasaran

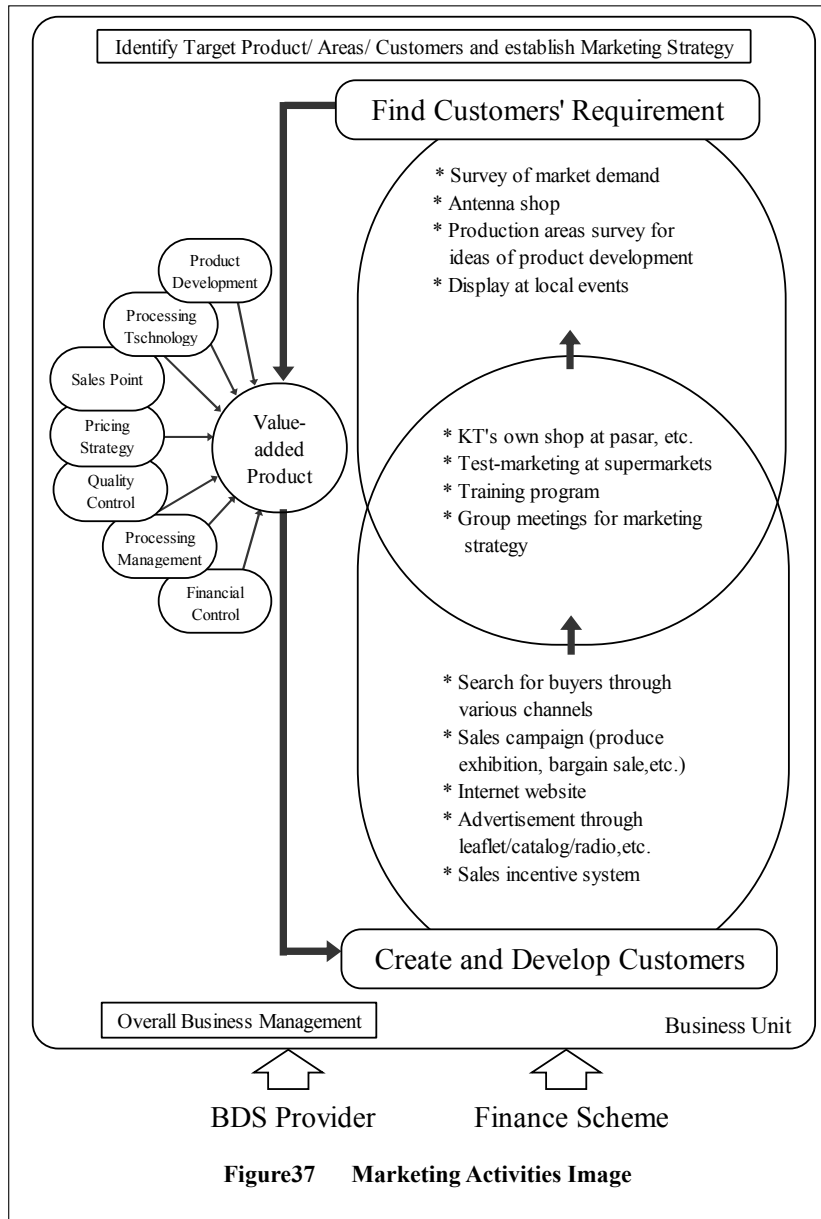
(2) Langkah Perbaikan

Untuk memperbaiki situasi yang dikemukakan sebagai pokok permasalahan diatas, langkah berikut ini diajukan dengan asumsi bahwa petani sasaran memiliki keinginan yang kuat dan mengambil inisiatif untuk meningkatkan pendapatan mereka melalui agro processing dan kegiatan pemasaran.

1) Sistem Pendukung

Untuk kondisi sekarang seperti yang dijelaskan pada Bab 3, kebanyakan petani masih belum aktif dalam bidang pemasaran dan mereka memiliki pengetahuan dan pengalaman yang

kurang dalam bidang tersebut. Oleh sebab itu, sistem pendukung perlu disusun dan pilihan yang memungkinkan adalah sebagai berikut:



- (i) **Kemitraaan dengan unit usaha lain:** Kemitraan merupakan bentuk usaha patungan atau perjanjian dengan pihak ketiga atau perusahaan swasta yang memiliki orientasi usaha (*business minded*). Dalam struktur tersebut, Kelompok Tani bertanggung jawab terhadap produksi dan pengolahan komoditas serta sebagai rekanan dalam membantu di bidang manajemen dan pemasaran. Kegiatan operasional bersama dengan rekanan memungkinkan petani untuk berkonsentrasi dalam produksi dan pengolahan, kemudian petani diharapkan untuk menyerap pengetahuan dan keterampilan dalam pemasaran, menuju ke arah pengembangan orientasi usaha.
- (ii) **Fasilitator:** Penyedia jasa BDS akan mendampingi Kelompok

Tani selama periode yang ditentukan dari tahap awal implementasi model usaha untuk memfasilitasi kegiatan pemasaran.

2) Kegiatan Pemasaran

Kegiatan pemasaran dari komoditas contoh pada dasarnya sama di seluruh wilayah Studi, dan perantara berperan aktif dalam melaksanakan berbagai jenis kegiatan operasional yang dapat diterapkan kepada Kelompok Tani.

Kegiatan pemasaran yang akan dilaksanakan oleh Kelompok Tani dijelaskan dalam Tabel 4.2.1, yang dikategorikan menurut kegiatan, contoh nyata kegiatan, dan jenis unit usaha yang dapat diterapkan untuk setiap kegiatan.

Kegiatan-kegiatan tersebut diilustrasikan dalam Gambar 39 yang menjelaskan konsep utama dari kegiatan pemasaran. Pada tahap awal dilakukan identifikasi terhadap sasaran produk, wilayah dan pembeli. Kemudian menyusun strategi pemasaran dan menyesuaikannya dengan kemajuan kegiatan pemasaran selanjutnya.

Kegiatan pemasaran dapat disederhanakan dalam 3 kategori yaitu: i) mencari kebutuhan pembeli, ii) mengembangkan dan meningkatkan produk untuk memuaskan kebutuhan pembeli, dan iii) mencari dan mengembangkan hubungan dengan pembeli (*sales promotion*). Melalui kegiatan pada kategori iii), kebutuhan pembeli nantinya akan digali lebih lanjut yang akan diterapkan dalam kegiatan perbaikan dan pengembangan produk. Siklus operasional seperti ini akan dilakukan secara berkelanjutan dan perlu diingat bahwa seluruh faktor dalam pemasaran adalah dapat berubah (*variable*) dan tidak konstan.

(3) Kabupaten Cirebon dan Mojokerto (Itik)

Karakteristik Pasar

Karakteristik pasar untuk produk itik di Cirebon dan Mojokerto dianalisa sebagai berikut:

Tabel 58 Karakteristik Pasar di Kabupaten Cirebon dan Mojokerto

	Cirebon	Mojokerto
Populasi Itik	274,485 ekor (2004)	206,949 ekor (2005)
Perjanjian kemitraan di antara Kelompok Tani	Perjanjian kemitraan di antara KT membantu membentuk dasar bagi perluasan usaha dan memberikan kontribusi bagi revitalisasi usaha itik	Belum ada perjanjian kemitraan di antara KT pada saat ini. KT yang aktif masih terbatas.
Dominasi Perantara	Tidak ada kelompok perantara yang mendominasi pasar	
Potensi Pasar	Pasar diharapkan berpotensi tinggi, khususnya telur	
Kegiatan pengepul desa dan latar belakang	Pengepul desa untuk usaha itik sangat terbatas.	Banyak pengepul mencoba untuk memulai usaha baru dengan petani seperti: <ul style="list-style-type: none"> - Jual beli berbasis komitmen untuk DOD/ pullet, pullet/telur segar, dsb. - Memanfaatkan sisa makanan sebagai pakan itik untuk dijual dengan harga murah.
Latar Belakang	Hanya ada sedikit ruang untuk bergerak diantara petani dan bandar, ini disebabkan oleh karakteristik produk itik yang tidak seperti komoditas buah-buahan atau sayur mayur (tidak ada puncak musim yang menggunakan banyak tenaga kerja pada masa panen)	
	Usaha baru tidak dilakukan oleh pengepul tetapi oleh KT apabila diperlukan karena ada beberapa KT itik yang berperan kuat dan aktif seperti yang digambarkan dalam “sistem segitiga”.	Usaha baru diatas dilakukan oleh pengepul. KT sebenarnya bisa mengelola usaha baru tersebut tetapi mereka enggan melakukannya karena kebanyakan KT tidak aktif.

Langkah Perbaikan (jenis unit usaha)

Dengan mempertimbangkan situasi diatas, jenis unit usaha dibawah ini diajukan bagi Cirebon dan Mojokerto:

Tabel 59 Langkah Perbaikan bagi Kabupaten Cirebon dan Mojokerto

Cirebon	Mojokerto
Memperkuat kemitraan KT yang sudah ada bagi perluasan usaha. Replikasi sistem kemitraan dengan KT lain.	Membentuk sistem kemitraan di antara Kelompok Tani di Mojokerto.

Faktor-faktor umum juga diterapkan: 1) Bantuan teknis dan keuangan bagi KT, 2) Dukungan bagi Kelompok Tani melalui BDS untuk memfasilitasi di bidang teknologi dan manajemen, dan 3) Melakukan kegiatan pemasaran seperti dijelaskan pada Gambar 37.

(4) Kabupaten Kuningan dan Majalengka (Ubi Jalar)

Karakteristik Pasar

Karakteristik pasar dari ubi jalar di Kuningan dan Majalengka dianalisa dalam Tabel 62:

Tabel 60 Karakteristik Pasar Kabupaten Kuningan dan Majalengka

	Kuningan	Majalengka
Produksi Tahunan	90,000 – 93,000 ton (2004-2005).	13,000 – 20,000 ton pada tahun-tahun terakhir
Dominasi Pasar Perantara	Tidak ada kelompok perantara yang mendominasi pasar. Ditemukan kompetisi yang lebih adil dan terbuka di antara perantara dibandingkan di Majalengka.	Satu kelompok perantara mendominasi lebih dari 60% pasar ubi jalar di Majalengka. Ini mengakibatkan kerugian bagi petani di wilayah yang didominasi tersebut.
Industri Pengolahan	Terdapat dua pabrik pengolahan ubi jalar di Kuningan.	Tidak ada industri pengolahan ubi jalar di Majalengka, hanya satu industri rumah tangga.
Potensi Pasar	Potensi pasar diharapkan akan berkembang dengan baik di masa depan berdasarkan karakteristik diatas.	Potensi pasar bagi ubi jalar (mentah dan olahan) di Majalengka masih terbatas pada saat ini.

Langkah Perbaikan (jenis unit usaha)

Dengan mempertimbangkan situasi diatas, jenis unit usaha dibawah ini diajukan bagi Kuningan dan Majalengka:

Tabel 61 Langkah Perbaikan bagi Kabupaten Kuningan dan Majalengka

Kuningan	Majalengka
Membentuk kemitraan antara KT dan pengolah lokal (perusahaan swasta untuk pengolahan dan pemasaran) KT memasok produk pra-olahan atau setengah-olahan kepada pengolah sesuai dengan ketentuan pengolah, dengan memanfaatkan ubi jalar kualitas rendah.	Membentuk jenis usaha “Produksi (pengolahan) Lokal dan Pemasaran Lokal” di dalam KT, dengan mengembangkan produk yang menarik dan kemampuan pemasaran yang kuat untuk menarik pembeli. Tergantung kepada kemajuan dari kegiatan usaha, perluasan usaha di masa depan untuk produk lain dan ke wilayah yang lebih luas akan dikembangkan.

Faktor-faktor umum juga diterapkan: 1) Bantuan teknis dan keuangan bagi KT, 2) Dukungan bagi Kelompok Tani melalui BDS untuk memfasilitasi di bidang teknologi dan manajemen, dan 3) Melakukan kegiatan pemasaran seperti dijelaskan pada Gambar 37.

(5) Kabupaten Kediri

Karakteristik Pasar

Karakteristik pasar mangga di Kediri dikarakterisasikan dan dianalisa sebagai berikut:

Tabel 62 Karakteristik Pasar di Kabupaten Kediri

	Kediri
Industri Pengolahan	Tidak ada industri pengolahan mangga di Kediri, hanya satu pada tingkat industri rumah tangga.
Pola Transaksi	75% dari transaksi mangga dilakukan sebelum panen, yang disebabkan oleh posisi petani yang sulit pada masa panen (harga anjlok, kurangnya keberadaan pengumpul karena harga pasar yang rendah, kerugian yang substansial bagi petani yang menangani sendiri pemasaran mereka)
Dominasi Perantara	Tidak ditemukan kelompok perantara yang mendominasi pasar
Kemitraan antara KT & perusahaan swasta	Ditemukan beberapa kemitraan antara KT (Kediri) dan perusahaan swasta (di luar kabupaten) untuk memasok bahan baku, pelatihan dan pengolahan.
Potensi Pasar	Ketersediaan pasar bagi mangga olahan masih terbatas saat ini, walaupun berbagai jenis produk baru memiliki potensi pasar. Untuk ukuran pasar yang diharapkan bagi mangga olahan, penelitian pasar perlu dilakukan bagi permintaan lokal dan ekspor.

Langkah Perbaikan (jenis unit usaha)

Dengan mempertimbangkan situasi diatas, jenis unit usaha dibawah ini diajukan bagi Kediri:

Tabel 63 Langkah Perbaikan bagi Kabupaten Kediri

Kediri (Ops 1)	Kediri (Ops 2)
Membentuk kemitraan antara KT dan sektor swasta, seperti yang dijelaskan diatas. KT bertanggung jawab atas produksi dan pengolahan sedangkan sektor swasta terhadap manajemen dan pemasaran.	Membentuk sistem usaha “Produksi (Pengolahan) Lokal dan Pemasaran Lokal” di dalam KT, untuk mengembangkan produk yang menarik dan kemampuan pemasaran yang kuat. Memperluas usaha untuk produk lain dan di wilayah yang lebih luas, tergantung pada kemajuan dari kegiatan usaha.

Faktor-faktor umum juga diterapkan: 1) Bantuan teknis dan keuangan bagi KT, 2) Dukungan bagi Kelompok Tani melalui BDS untuk memfasilitasi di bidang teknologi dan manajemen, dan 3) Melakukan kegiatan pemasaran seperti dijelaskan pada Gambar 37.

4.2.3 Keuangan Mikro

(1) Kesenjangan antara Permintaan dan Persediaan

Pandangan yang lebih luas dari bank umum komersial dalam membiayai keadaan petani adalah sebagai berikut:

Saat ini bank komersial memiliki dana tunai yang berlimpah yang diperoleh dari deposito. Bank-bank tersebut telah memperkuat usaha mereka dalam memperluas pemberian kredit kepada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), secara langsung dan tidak langsung dengan memberikan pinjaman kembali (*re-lending*) kepada lembaga-lembaga keuangan mikro yang berbadan hukum seperti BPR dan koperasi. Disamping itu, mekanisme untuk meningkatkan pinjaman dari bank komersial dan BPR kepada UMKM juga telah diterapkan. Bank Indonesia memperkenalkan sistem perbankan Syariah, mulai memberikan pelatihan bagi *account officer* untuk menangani pinjaman UMKM dan menerapkan sistem Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) yang terdiri dari Penyedia Layanan Pengembangan Usaha (Business Development Service Providers: BDSP) dan *account officer* yang menangani

pinjaman UMKM, yang kemudian akan diberikan pelatihan dalam pemberian pinjaman bagi UMKM. Tidak dipungkiri bahwa porsi pinjaman bagi UMKM dari total pinjaman bank terus berkembang (51% di tahun 2005). Akan tetapi, porsi sektor pertanian dalam pinjaman UMKM menurun.

Di sisi lain, usaha-usaha telah dilakukan oleh Departemen Pertanian untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi para petani untuk mendapatkan akses yang lebih mudah terhadap pinjaman bank. Salah satunya adalah Kredit Ketahanan Pangan (KKP), kredit bersubsidi bagi tanaman pangan, tebu, peternakan, perikanan dan pengadaan pangan yang diperkenalkan pada tahun 2000. Skema lain adalah Skim Pelayanan Pembiayaan Pertanian (SP3) yang dimulai pada tahun 2006, yang merupakan layanan jaminan untuk mengurangi risiko dari bank komersial dalam memberikan pinjaman kepada petani dengan memberikan agunan tunai (*cash collateral*) kepada lima bank komersial. Pada kedua skema tersebut, dana pinjaman diambil dari dana tunai internal bank dan penilaian pinjaman dilakukan sesuai dengan kriteria bank dalam menimbang risiko pertanian. Akibatnya, ini menyebabkan lambatnya proses penyaluran dana dari yang diharapkan.

Kesimpulannya, dana dari bank komersial telah menjangkau sebagian petani yang mendapat pinjaman UMKM dan memenuhi persyaratan agunan yang diminta bank, atau petani yang merupakan anggota koperasi yang menerima pinjaman dari bank komersial. Jika tidak, petani yang tidak memiliki agunan dan tidak memiliki hubungan dengan koperasi, yang merupakan kasus mayoritas, menjadi diluar jangkauan pinjaman bank komersial.

Secara singkat, Kelompok Tani yang terseleksi telah memiliki akses ke sumber-sumber keuangan sampai pada tingkat tertentu, tetapi bukan dengan kondisi persyaratan yang mereka inginkan. Jenis lembaga keuangan yang dapat mereka akses juga berbeda-beda, kebanyakan disebabkan oleh faktor-faktor diluar kekuasaan mereka seperti keadaan geografis masyarakat dan struktur keuntungan dari komoditas yang dikembangkan. Beberapa diantara Kelompok Tani sudah memiliki akses ke bank, untuk menabung dan meminjam modal kerja serta meminjam modal investasi kecil sekitar Rp.5 juta. Beberapa sudah memiliki akses ke koperasi, menabung dan meminjam terutama untuk modal kerja sebesar Rp.1 juta tanpa agunan. Sedangkan sisanya menggunakan layanan Kelompok Tani untuk menabung dan mendapatkan pinjaman sebesar Rp.0.5 juta tanpa agunan, dan ke warung dan perseorangan (ketua kelompok, pedagang, pemasok pakan). Untuk petani lain yang tidak memiliki akses sama sekali ke bank karena lokasi mereka di daerah terpencil, saat ini mereka mendapatkan bantuan dari skema P4K.

Situasi-situasi tersebut diatas muncul akibat kesenjangan antara permintaan dan persediaan sebagai berikut:

(i) Minimnya Akses Fisik

Bagi Kelompok Tani yang berada di daerah terpencil, seperti yang berada di Majalengka dan Kediri, akses fisik kepada lembaga keuangan menjadi sulit. Hubungan dengan BRI akan terputus setelah siklus pinjaman dari P4K berakhir, karena tidak ada layanan keuangan yang tersedia pada lokasi yang dekat dengan masyarakat.

(ii) Kebutuhan Keuangan Masyarakat Pedesaan

Bagi anggota masyarakat dimana Kelompok Tani yang terseleksi berada, penduduk dengan kategori melarat dan miskin, masih belum memiliki akses ke layanan keuangan manapun, atau telah memiliki akses hanya ke satu lembaga keuangan tidak resmi seperti rentenir dan pedagang. Tetapi mereka memiliki keinginan untuk menabung, yang masih belum terlaksana saat ini.

(iii) Kebutuhan Keuangan bagi Agribisnis

Anggota Kelompok Tani, walaupun telah memiliki akses pinjaman dari bank, koperasi, Kelompok Tani, dan layanan keuangan lainnya, masih merasa bahwa modal produksi mereka tidak mencukupi.

Peternak itik, yang menginginkan permodalan lebih besar, memiliki keinginan untuk menggunakannya bagi peningkatan jumlah itik dan menginvestasikannya pada mesin penetas, menyewa lahan yang lebih besar bagi pemeliharaan itik dan membangun lebih banyak kandang itik. Kelompok ubi jalar di Kuningan juga menginginkan lebih banyak permodalan untuk pembelian sarana produksi pertanian dan untuk menguasai pemasaran dan harga. Kelompok ubi jalar di Majalengka menginginkan lebih banyak pendanaan bagi modernisasi peralatan pengolahan dan peningkatan pengemasan produk mereka.

(iv) Tidak Memenuhi Persyaratan Pinjaman

Bagi petani yang tidak mau meminjam uang, mereka memiliki alasan-alasan sebagai berikut. Pertama, ketakutan tidak dapat menepati jadwal pembayaran yang ditetapkan oleh lembaga keuangan. Kedua, tidak memiliki agunan, baik dalam bentuk fisik maupun dokumen kepemilikan (sebagai contoh, dokumen bukan dalam bentuk sertifikat melainkan surat¹). Petani juga merasa bahwa rasio lindungan agunan (*collateral coverage ration*) yang ditetapkan oleh bank terlalu ketat. Ketiga, mereka merasa bahwa usaha mereka tidak berjalan baik untuk membayar bunga yang tinggi.

Rata-rata jumlah pinjaman bagi pertanian yang diberikan oleh unit-unit BRI yang dikunjungi adalah kira-kira antara Rp.5 sampai Rp.6 juta, yaitu sesuai dengan jumlah pinjaman maksimum yang didapat oleh petani sasaran, kecuali mereka yang memiliki lahan lebih besar dan para pedagang yang bisa mendapatkan pinjaman sebesar puluhan juta rupiah. Pengecualian untuk persyaratan agunan yang diberikan oleh unit BRI adalah untuk pinjaman sampai dengan Rp.3 juta dan dari BPD sebesar Rp.1 juta. Jumlah pinjaman tersebut merupakan jumlah maksimum yang dapat diberikan koperasi kepada petani anggotanya. Kelompok P4K bisa mendapatkan pinjaman sampai dengan Rp. 2 juta dengan memberikan 10% tabungan terbekukan yang wajib disimpan di bank.

(v) Ketergantungan terhadap Pinjaman Pedagang

Petani yang tidak memiliki sumber keuangan yang memadai selain komoditas yang mereka miliki, cenderung untuk memilih meminjam dari pedagang untuk membeli sarana produksi pertanian mereka dan untuk memenuhi kebutuhan uang yang mendadak, dengan

¹ Pengurusan kepemilikan tanah dari bentuk surat menjadi sertifikat membutuhkan biaya Rp.1 juta dan melalui proses yang panjang.

menggunakan komoditas sebagai agunan tidak resmi. Akibatnya, kebanyakan petani tidak memiliki kekuatan tawar menawar dan tidak mendapatkan kondisi perjanjian yang menguntungkan. Disamping itu, ini juga disebabkan oleh minimnya kemampuan pemasaran yang dimiliki oleh petani sehingga menyebabkan ketergantungan mereka kepada para pedagang untuk menjual hasil komoditas mereka. Dalam hal ini pinjaman dari pedagang memiliki konotasi yang positif, petani tidak mungkin gagal menjual komoditas melalui pedagang. Guna menyikapi masalah tersebut, petani harus melakukan salah satu saran berikut ini (i) mengembangkan sumber keuangan dari hasil akumulasi aset, (ii) meningkatkan kekuatan tawar menawar melalui kegiatan kolektif, atau (iii) membangun kemampuan pemasaran.

(vi) Batas Jumlah Pinjaman yang diberikan oleh KT / Koperasi

Masalah bagi Koperasi dan Kelompok Tani sebagai organisasi keanggotaan adalah, mereka dengan mudah mencapai batas jumlah pinjaman, karena sumber dana utama bagi pemberian pinjaman kepada anggota adalah berasal dari simpanan internal. Jumlah pinjaman yang biasa diberikan dalam Kelompok Tani adalah sebesar Rp.0.5 juta, dan sebagai contoh, pinjaman maksimum yang diberikan kepada anggota Bebek Jaya dari KSP Syariah adalah ditentukan sebesar Rp.1 juta, sedangkan peternak itik membutuhkan dana pinjaman untuk modal lebih dari Rp.10 juta. Apabila modal yang dibutuhkan tersebut tidak mendapat dukungan dari lembaga keuangan lainnya, atau melalui program bantuan pemerintah seperti hibah (yang semestinya dimaksudkan untuk bergulir di dalam kelompok) dan pinjaman lunak, maka pinjaman yang diberikan kepada anggota akan terus membentur batas jumlah pinjaman. Guna mengatasi masalah tersebut, maka organisasi keanggotaan harus menambah jumlah anggota mereka dan/atau meningkatkan jumlah simpanan anggota.

(2) Langkah Perbaikan untuk Mengisi Kesenjangan

Adalah lebih baik untuk menghubungkan petani kepada lembaga-lembaga keuangan yang lebih formal, tapi seperti yang ditemukan di kebanyakan kasus, hal tersebut tidak mungkin dilakukan secepatnya karena disebabkan oleh kesenjangan-kesenjangan antara permintaan petani dan masyarakat tani, dan persediaan, seperti yang dijelaskan dalam bagian sebelumnya.

Karena fokus Studi kami adalah para petani dan masyarakat pedesaan, kami mengajukan program-program bantuan pemerintah dan donor untuk menjembatani kesenjangan-kesenjangan tersebut dengan: (i) membentuk LKM yang kuat di sekitar Kelompok Tani di lingkungan masyarakat pedesaan untuk melayani kebutuhan petani dan anggota masyarakat, dan (ii) meningkatkan kemampuan agribisnis, terutama untuk meningkatkan keuntungan. Penjelasan kedua langkah perbaikan tersebut dirinci berikut ini:

(i) Membentuk LKM yang kuat di masyarakat

Ini dapat dicapai melalui berbagai cara. Berikut ini adalah tiga pendekatan dalam membentuk LKM, berdasarkan pada pengalaman simpan pinjam, karakteristik kepemimpinan, dan tingkat kerjasama di Kelompok Tani sasaran untuk memperbaiki keadaan:

a) Pembentukan LKM di Masyarakat

Pendekatan ini untuk Kelompok Tani yang kegiatan kelompoknya tidak aktif, memiliki ketua kelompok yang dominan dan anggota kelompok yang berperilaku pasif. Jenis Kelompok Tani ini cenderung tidak memiliki kegiatan simpan pinjam yang aktif.

Guna mengubah keadaan kelompok tersebut, campur tangan (intervensi) dalam memperkuat kegiatan kelompok harus dilakukan bersamaan dengan kegiatan meningkatkan usaha agribisnis. Akan tetapi untuk peningkatan akses keuangan, direkomendasikan untuk membentuk LKM di masyarakat, bukan berada di dalam Kelompok Tani tetapi di luar Kelompok Tani tersebut. Hal ini dilakukan untuk menghindari masalah kepemimpinan dan hubungan kekuasaan lainnya yang melekat pada Kelompok Tani tersebut, serta untuk memanfaatkan pemimpin-pemimpin lain dalam masyarakat tersebut.

Pendekatan ini dapat diterapkan pada Sigranala Indah (Kab. Cirebon), Linggadari 2 (Kab. Kuningan), dan Mitra Binangkit 2 (Kab. Majalengka).

Proses untuk membentuk dan mengembangkan BMT dapat dirujuk sebagai model intervensi.

b) Pembentukan LKM Mandiri

Pendekatan ini adalah untuk Kelompok Tani yang telah melakukan kegiatan simpan pinjam dan memiliki kegiatan kelompok. Serta memiliki potensi kedisiplinan kelompok, kepemimpinan dan manajemen keuangan kelompok.

Kelompok ini direkomendasikan untuk membentuk LKM berbasis kelompok (Kelompok Tani atau Kelompok Petani Kecil (KPK)).

Ada dua cara dalam mencapai proses ini. Pertama adalah untuk memperluas kelompok itu sendiri (seperti dalam kasus Lestari Sejahtera di Kab. Mojokerto), dimana kelompok memiliki kemampuan dan potensi dalam mengakumulasi modal.

Cara kedua adalah untuk membentuk gabungan dengan kelompok lain dan mengubah kelompok tersebut menjadi LKM (bagi kelompok P4K seperti Andaya Rasa di Kab. Kuningan, Delima 2 di Kab. Majalengka, Karya Tani dan Tani Mulyo di Kab. Mojokerto, dan Makmur Jaya di Kab. Kediri). Dengan cara ini, kelompok-kelompok tersebut dapat menyatukan modal mereka.

c) Memperkuat fungsi koperasi yang sudah terbentuk (KSP/USP)

Apabila Kelompok Tani sudah memiliki hubungan yang kuat dengan koperasi, yang merupakan lembaga keuangan paling dekat dan mudah, intervensi yang harus dilakukan adalah untuk memperkuat hubungan tersebut dan memperkuat kemampuan koperasi.

Pendekatan ini dapat diterapkan pada Tigan Mekar di Kabupaten Cirebon, yang merupakan anggota dari koperasi syariah KSP Al Qomariyah. Budi Daya di Kediri telah memiliki koperasi berbadan hukum yang sudah lama tidak aktif sehingga disarankan untuk mengaktifkan kembali kegiatan mereka.

(ii) Peningkatan Agribisnis

Untuk meningkatkan keuntungan dari usaha agribisnis dan kemampuan untuk mengelola usaha agribisnis, diperlukan intervensi bantuan teknis dan bantuan keuangan. Langkah perbaikan dijelaskan dalam Tabel 4.2.1 Pengolahan Hasil Pertanian Agricultural Processing dan 4.2.2 Pemasaran.

Tiga pilihan dalam penjelasan (i) merupakan intervensi peningkatan keuangan yang sejalan dengan atau mengikuti peningkatan usaha agribisnis.

Untuk kasus ventura berpotensi seperti KT Bina Karya di Kab. Kuningan, disarankan untuk mengubah bentuk kelompok menjadi sebuah usaha dalam bentuk perusahaan. Dengan demikian diharapkan akan mendapatkan akses keuangan dari bank komersial.

(iii) Peningkatan Aset

Peningkatan aset harus digabungkan dengan seluruh pilihan perbaikan yang telah dijelaskan diatas.

Petani, Kelompok Tani, koperasi, dan LKM diharapkan untuk dapat meningkatkan aset bagi stabilitas kehidupan mereka dan kesinambungan organisasi.

(iv) Tujuan

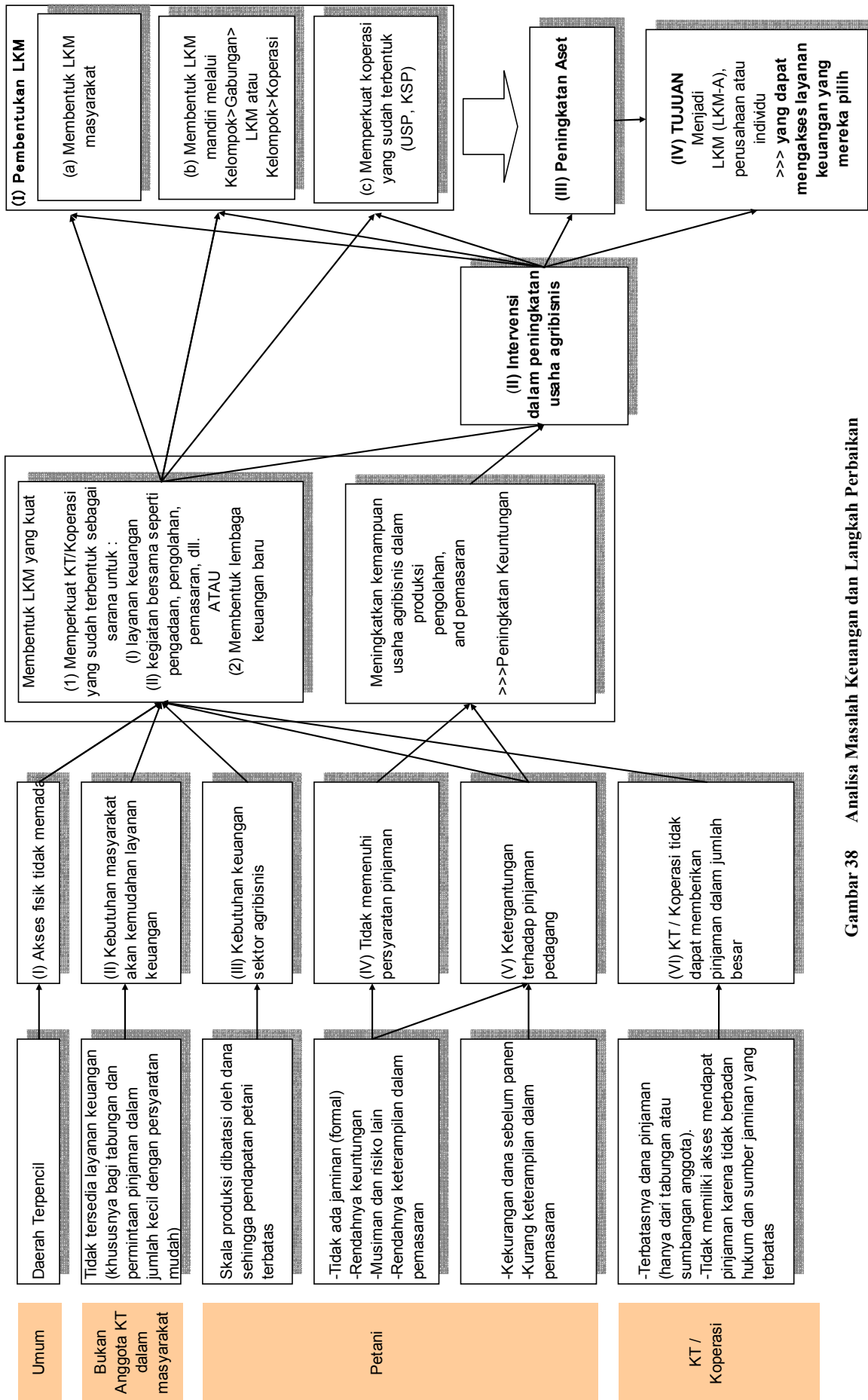
Pendekatan (i) sampai dengan (iii) harus menuju ke arah Tujuan yang diinginkan petani dan masyarakatnya untuk memiliki dan mengelola LKM dan/atau individu yang secara finansial layak dan cukup menguntungkan serta memiliki aset yang memadai, dan jika perlu, memiliki akses ke layanan keuangan yang mereka pilih sebagai individu atau sebagai lembaga.

Analisa masalah dari enam kesenjangan dan langkah perbaikan dijelaskan dalam Gambar 38 berikut ini.

Latar Belakang

(1) KESENJANGAN

(2) LANGKAH PERBAIKAN



Gambar 38 Analisa Masalah Keuangan dan Langkah Perbaikan

BAB 5 RENCANA PERBAIKAN

5.1 Rencana Perbaikan

Untuk mempromosikan pengolahan hasil pertanian dan keuangan, rencana-rencana perbaikan dirumuskan dalam langkah-langkah berikut ini :

- (1) Langkah-langkah perbaikan untuk tiap Kelompok Tani dipersiapkan berdasarkan kondisi saat ini, seperti pendekatan perbaikan dasar untuk pengolahan, pemasaran dan keuangan.
- (2) Model-model usaha secara terpisah diidentifikasi dan diklasifikasi berdasarkan karakteristik kelompok dan komoditas, langkah perbaikan untuk tiap 13 Kelompok Tani terpilih, dan Gabungan KPK/ LKM di bawah P4K dalam Studi.
Seperti telah disebutkan pada Bab sebelumnya, transformasi Kelompok Tani menjadi LKM (Lembaga Keuangan Mikro) melalui pembentukan Gabungan adalah salah satu langkah utama perbaikan keuangan. Untuk maksud ini, Gabungan dan LKM yang dikembangkan di bawah P4K termasuk kedalam sasaran, selain dari ke 13 Kelompok Tani terpilih berdasarkan Komoditas Contoh dalam Studi.
- (3) Hubungan antara model usaha pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dengan keuangan mikro dipersiapkan.
- (4) Rencana Implementasi dirumuskan berdasarkan model usaha, dalam bentuk proyek yang akan diimplementasikan di lapangan. Untuk pendanaan menggunakan CF-SKR.

5.2 Langkah Perbaikan dan Model Usaha

5.2.1 Langkah Perbaikan dan Model Usaha Pengolahan dan Pemasaran

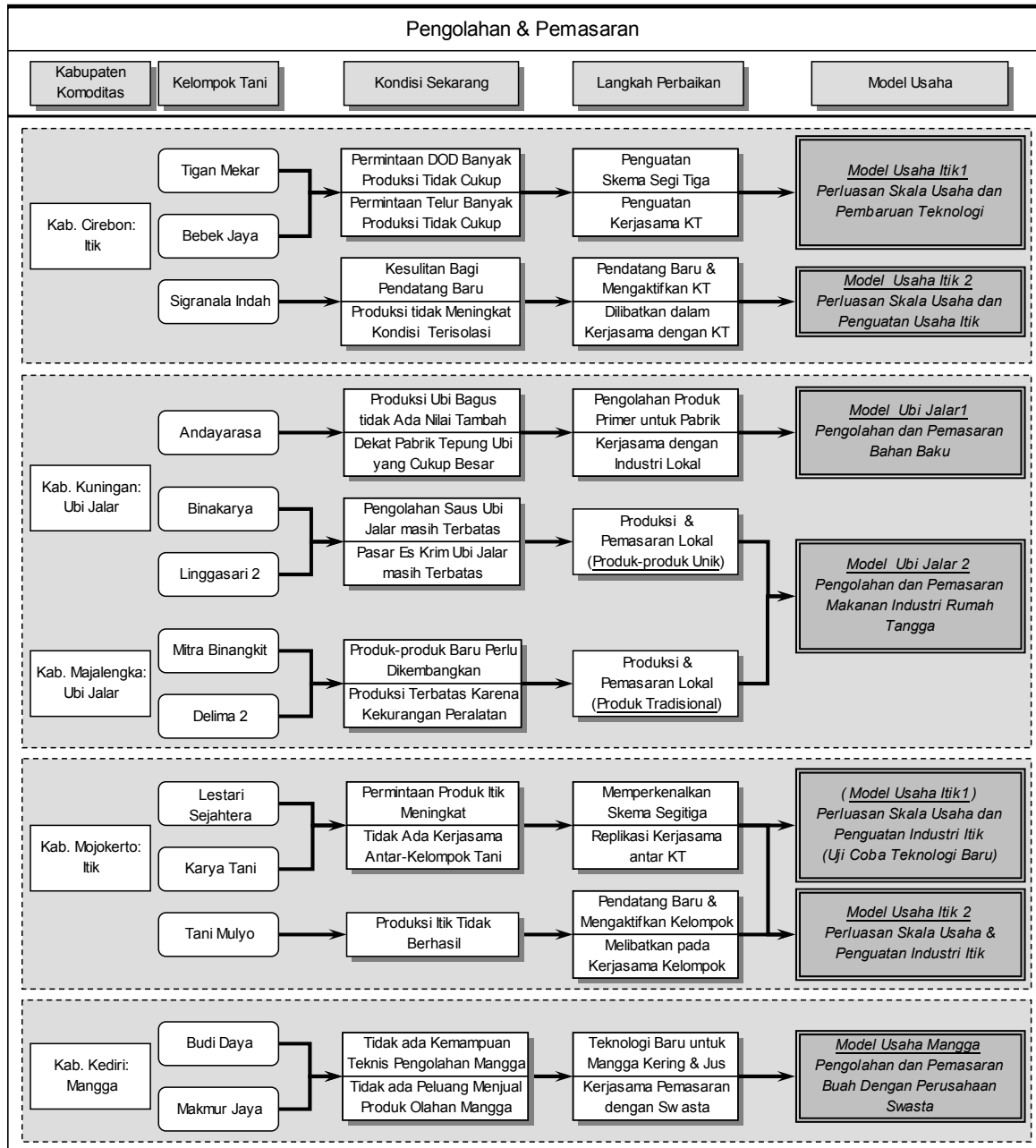
Berdasarkan kondisi saat ini dalam Bab 3 dan pendekatan perbaikan dalam Bab 4, langkah perbaikan untuk 13 Kelompok Tani terpilih dirangkum pada Tabel 5.1.1 yang menjelaskan kondisi saat ini, pendekatan/tujuan, kebutuhan dan komponen-komponen utama. Kemudian, langkah-langkah perbaikan diklasifikasikan menjadi lima (5) model usaha seperti ditunjukkan pada Tabel 5.1.2 dan dirangkum di bawah ini:

- (1) Industri Itik di kabupaten Cirebon dan Mojokerto
 - Model 1 Industri Itik: Perluasan skala usaha dan pembaruan teknologi (pengenalan dan penguatan sistem produksi segitiga dengan kerjasama di antara Kelompok Tani)
 - Model 2 Industri Itik: Perluasan skala usaha dan penguatan industri itik (pendatang baru dan pengaktifan kembali kelompok yang tidak aktif, dilibatkan dalam kerjasama)
- (2) Pengolahan Ubi Jalar di Kabupaten Majalengka dan Kuningan
 - Model 1 Ubi Jalar: Pengolahan dan Pemasaran Produk Primer (irisian ubi kering, kerjasama dengan pabrik tepung ubi jalar)

- Model 2 Ubi Jalar: Pengolahan dan pemasaran makanan industri rumah tangga (produksi lokal dan konsumsi lokal, produk tradisional dan produk unik)

(3) Pengolahan Mangga di Kabupaten Kediri

- Model Mangga: Pengolahan dan pemasaran buah, kerjasama dengan swasta (mangga kering dan jus mangga, pemasaran)



Gambar 39 Gambar Skematis Model Usaha Pengolahan dan Pemasaran

5.2.2 Langkah Perbaikan dan Model Usaha untuk Keuangan

Berdasarkan kondisi saat ini yang dirangkum pada Bab 3 dan pendekatan perbaikan yang diusulkan pada Bab 4, langkah perbaikan untuk 13 Kelompok Tani dirangkum pada Tabel 5.1.3 yang menjelaskan kondisi saat ini, pendekatan, kebutuhan, komponen-komponen

utama dan manfaat. Kemudian, langkah-langkah perbaikan diklasifikasikan menjadi tiga (3) model usaha seperti ditunjukkan pada Tabel 5.1.4 dan dirangkum di bawah ini:

(1) Model untuk Pembentukan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Berbasis Masyarakat
Pada model ini, untuk meningkatkan akses keuangan Kelompok Tani, LKM masyarakat dibentuk, tetapi LKM tidak boleh dikembangkan dari dalam Kelompok Tani. LKM ini akan dibentuk di bawah kepemimpinan yang berbeda dengan Kelompok Tani, dan akan mencakup Kelompok Tani sebagai anggota. Cara membentuk dan mengembangkan BMT bisa menjadi referensi bagi model ini.

Kelompok Tani yang termasuk kategori ini adalah:

- i) KT Sigranala Indah di Kabupaten Cirebon
- ii) KT Linggasari 2 di Kabupaten Kuningan
- iii) KT Mitra Binangkit 2 di Kabupaten Majalengka

(2) Model untuk pembentukan LKM mandiri

Model ini untuk Kelompok Tani yang sudah melakukan kegiatan simpan pinjam secara mapan dan kelompoknya sangat padu. Tipe Kelompok Tani ini akan membentuk LKM mandiri yang dipimpin oleh ketuanya. Ada dua cara untuk mengembangkan model ini. Cara pertama adalah dengan memperluas skala kelompok sendiri. Kelompok Tani yang masuk dalam kategori ini adalah:

- i) KT Lestari Sejahtera di Kabupaten Mojokerto

Cara kedua adalah dengan membentuk sebuah Gabungan dengan kelompok lain di masyarakat, dan mengembangkan menjadi LKM. Kelompok Tani dan KPK yang termasuk kategori ini adalah:

- ii) KT Andaya Rasa di Kabupaten Kuningan
- iii) KT Delima 2 di Kabupaten Majalengka
- iv) KT Karya Tani di Kabupaten Mojokerto
- v) KT Tani Mulyo di Kabupaten Mojokerto
- vi) KT Makmur Jaya di Kabupaten Kediri
- vii) KT Budi Daya di Kabupaten Kediri (sudah memiliki sebuah koperasi yang terdaftar tetapi tidak aktif, karena itu direkomendasikan untuk diaktifkan lagi)
- viii) Kelompok P4K, beberapa di antaranya sudah dalam bentuk Gabungan P4K, atau LKM P4K tetapi masih menghadapi masalah untuk menjadi LKM

(3) Model penguatan fungsi koperasi yang sudah terbentuk

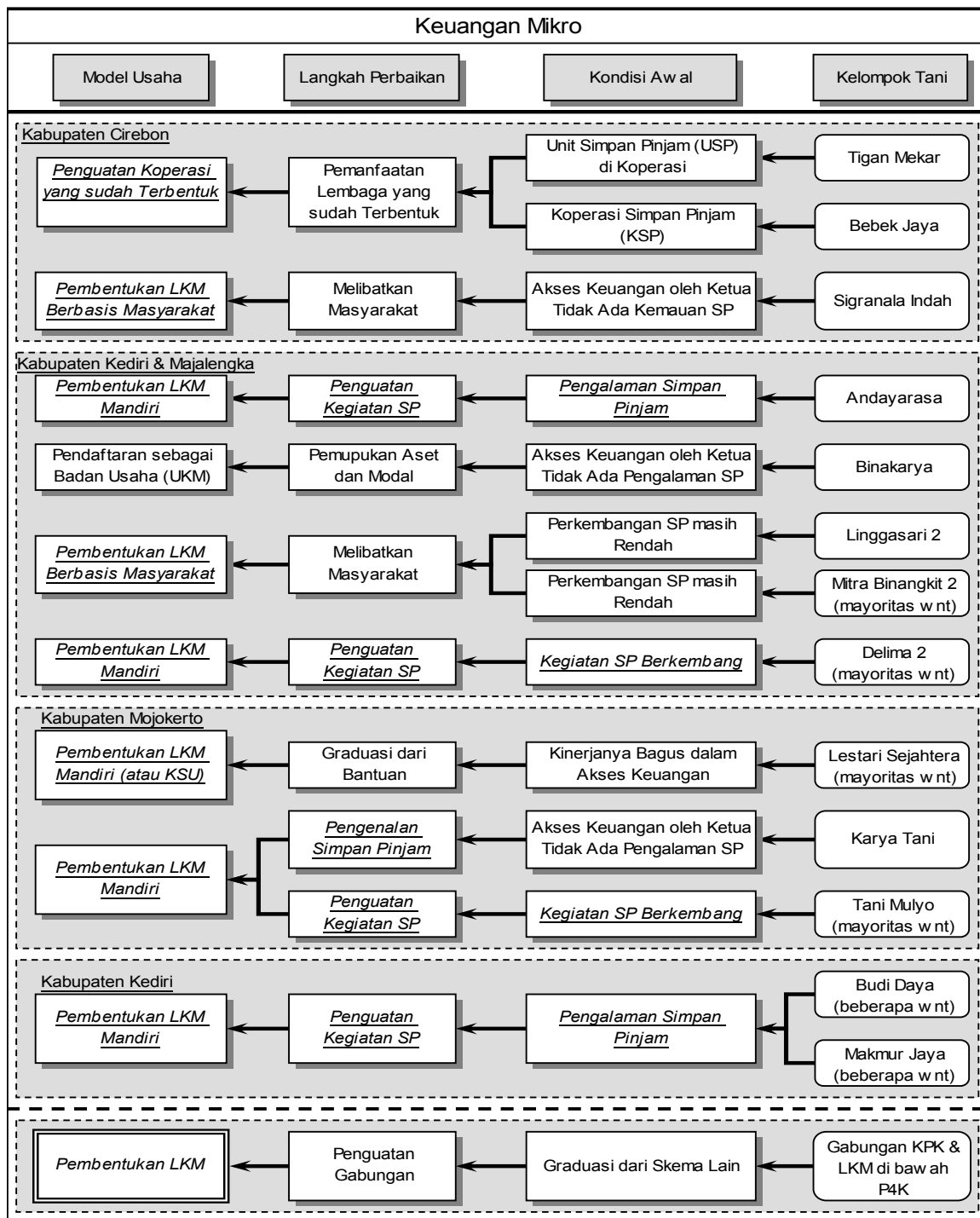
Model ini untuk Kelompok Tani yang lembaga koperasinya sudah terbentuk. Kelompok Tani yang masuk kategori ini adalah

- i) KT Tigan Mekar di Kabupaten Cirebon (yang sudah membentuk Unit Simpan Pinjam pada Koperasi Serba Usaha)
- ii) KT Bebek Jaya di Kabupaten Cirebon (Anggota Koperasi Simpan Pinjam)

Selain model-model di atas, beberapa Kelompok Tani merupakan kelompok kecil dan sangat berorientasi usaha dengan memiliki produk-produk yang kuat. Kelompok seperti

ini cenderung menjadi sebuah perusahaan yang menangani agribisnis, daripada bertahan pada kegiatan kelompok. Kelompok Tani yang termasuk kategori ini adalah KT Bina Karya di Kabupaten Kuningan.

Gambaran skematis model usaha keuangan dirangkum pada Gambar 40.



KT: Kelompok Tani, LKM: Lembaga Keuangan Mikro, SP: Simpan Pinjam dalam Kelompok, KSM/ KPK: Kelompok Petani Kecil, KSP: Koperasi Simpan Pinjam, USP: Unit Simpan Pinjam pada KSU, KSU: Koperasi Serba Usaha

 Model Implementasi

Gambar 40 Gambar Skematis Model Usaha Keuangan

5.3 Hubungan Model Usaha Pengolahan dan Pemasaran, dengan Keuangan Mikro

Pada tingkat Kelompok Tani, pengolahan, pemasaran dan keuangan memiliki kaitan yang erat, karena itu hubungan antara kedua model usaha ini memang dibutuhkan. Dalam kaitan ini, beberapa hal berikut perlu dipertimbangkan:

Hubungan Keuangan Mikro dengan Produksi dan Pengolahan

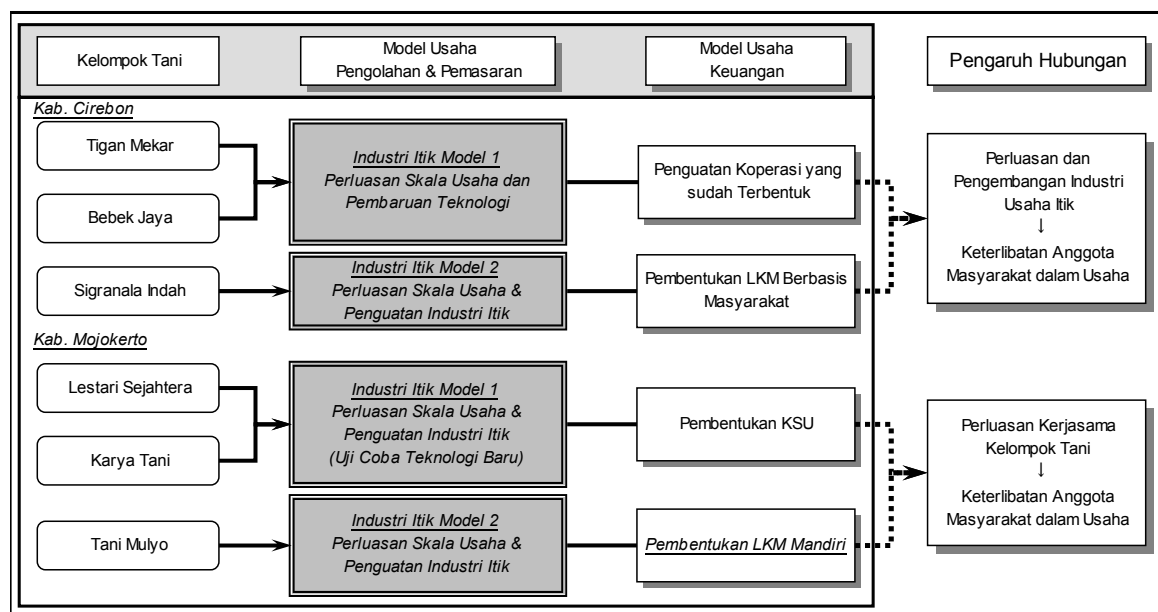
- (i) LKM yang akan dibentuk pada Model Keuangan akan memudahkan Kelompok Tani untuk meningkatkan dan memperluas agribisnis mereka melalui peningkatan akses keuangan dan kemampuan manajemen.
- (ii) Selain itu, kegiatan keuangan akan membiasakan anggota Kelompok Tani pada lingkungan dan keadaan untuk memiliki orientasi usaha.
- (iii) LKM akan melibatkan anggota masyarakat di sekitar Kelompok Tani, yang mau bergabung atau memulai usaha pengolahan. Selanjutnya, jumlah kelompok yang menangani usaha pengolahan akan meningkat dan kluster pengolahan lokal untuk komoditas ini akan terbentuk.

Hubungan Keuangan Mikro dengan Pemasaran

Hal lain yang penting adalah melibatkan perantara dan pengepul kedalam LKM untuk berbagi informasi tentang harga, pasar dan keinginan konsumen pada produk. Saat ini, karena kekurangan informasi pemasaran dan modal produksi, maka posisi para petani lemah ketika berhadapan dengan perantara dan pengepul. Kondisi seperti ini memberi peluang perantara dan pengepul untuk mengambil keuntungan dengan melakukan transaksi yang merugikan petani. Untuk memperlancar pemasaran produk, informasi pemasaran harus sampai ke para petani, yang pada gilirannya, akan menguntungkan baik bagi petani maupun pedagang.

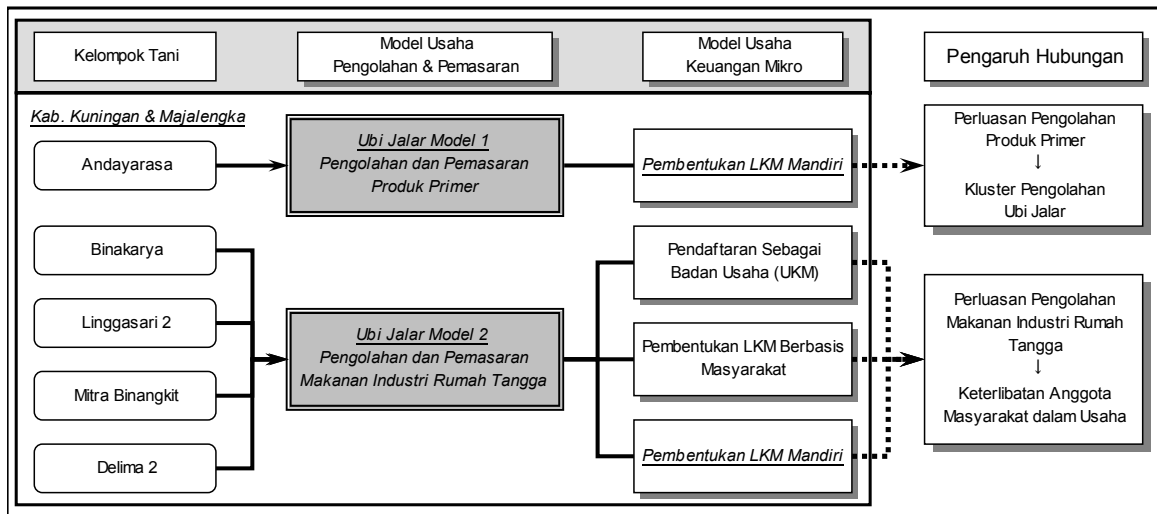
Hubungan ini dan pengaruhnya diilustrasikan dibawah ini:

- (1) Hubungan Industri Itik dengan Keuangan



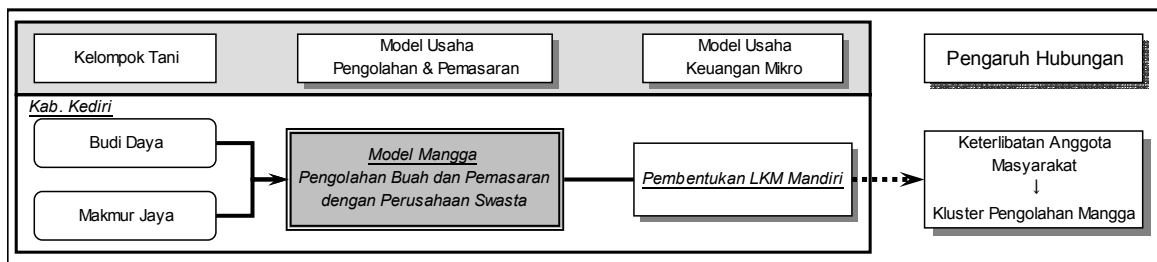
Gambar 41 Hubungan Industri Itik dengan Model Usaha Keuangan

(2) Hubungan Pengolahan Ubi Jalar dengan Keuangan



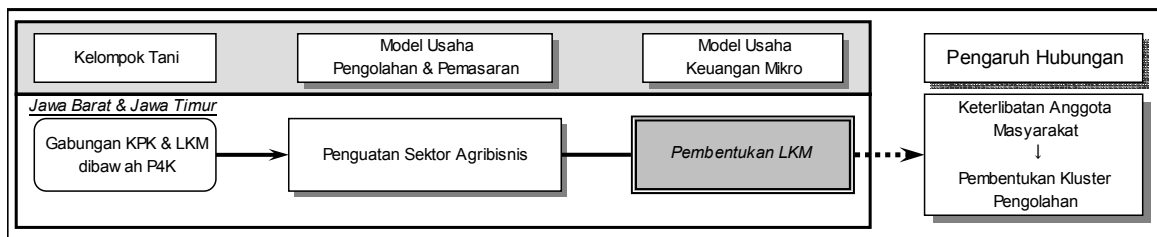
Gambar 42 Hubungan Pengolahan Ubi Jalar dengan Model Usaha Keuangan

(3) Hubungan Pengolahan Mangga dengan Keuangan



Gambar 43 Hubungan Pengolahan Mangga dengan Model Usaha Keuangan

(4) Hubungan dengan Peningkatan Pendapatan



Gambar 44 Hubungan Peningkatan Pendapatan dengan Model Usaha Keuangan

5.4 Mekanisme Pendukung Mempertimbangkan Persoalan yang Muncul dari Program-program Sebelumnya

Mekanisme pendukung dimasukkan dalam rencana implementasi untuk memecahkan persoalan yang muncul dari program-program sebelumnya seperti berikut ini:

5.4.1 Seleksi Kelompok Tani Sasaran

Rencana-rencana Implementasi dirumuskan dengan mempertimbangkan tingkat kemiskinan rumah tangga petani sasaran dan masyarakat, dan kondisi-kondisi minimal untuk peningkatan pendapatan merupakan motivasi kuat dan kemampuan untuk

meningkatkan kegiatan pengolahan hasil pertanian sebagai suatu usaha dan kegiatan simpan pinjam. Kelompok Tani sasaran diharapkan 1) memiliki kemauan untuk mandiri, 2) menyadari pentingnya kemampuan manajemen organisasi dan 3) mempertimbangkan tugas wanita dan keseimbangan gender.

Kriteria seleksi Kelompok Tani yang dijelaskan pada Bab 3 akan dirujuk dengan aspek keuangan, sosio-ekonomi, organisasi, produksi dan pengolahan, potensi pemasaran dan rencana ke depan.

Selain itu, kelompok sasaran sebaiknya juga memenuhi persyaratan keuangan minimal seperti: (i) tidak memiliki catatan buruk dalam menerima program pemerintah (digunakan sebagaimana mestinya), (ii) tidak memiliki kredit bermasalah (*non performing loan*) pada bank, kredit atau transaksi keuangan lainnya, (iii) kesulitan mengakses sumber keuangan komersial untuk mengimplementasikan teknologi yang direkomendasikan dan memanfaatkan peluang pasar secara maksimal.

Oleh karena rencana-rencana implementasi ini diusulkan sebagai uji coba (pilot), maka tidak sepenuhnya menolak masuknya Kelompok Tani yang saat ini masih di bawah program bantuan keuangan pemerintah. Kelompok Tani semacam ini diminta mengajukan penjelasan yang meyakinkan bagaimana mereka mampu mengakomodasi program-program yang berbeda pada saat yang sama.

5.4.2 Dukungan Teknis

Rencana-rencana implementasi bagi pengolahan dan pemasaran mengarah kepada pengaruh kerjasama (sinergi) antara dukungan perangkat keras (peralatan dan pengolahan) dan dukungan perangkat lunak dari pihak ketiga (pemasaran dan manajemen). Ini untuk menghindari pengalaman masa lalu campur tangan pemerintah, yang cenderung berkonsentrasi pada dukungan perangkat keras (hibah peralatan tanpa syarat) tanpa petunjuk yang jelas, dan membawa pada hasil yang tidak memuaskan.

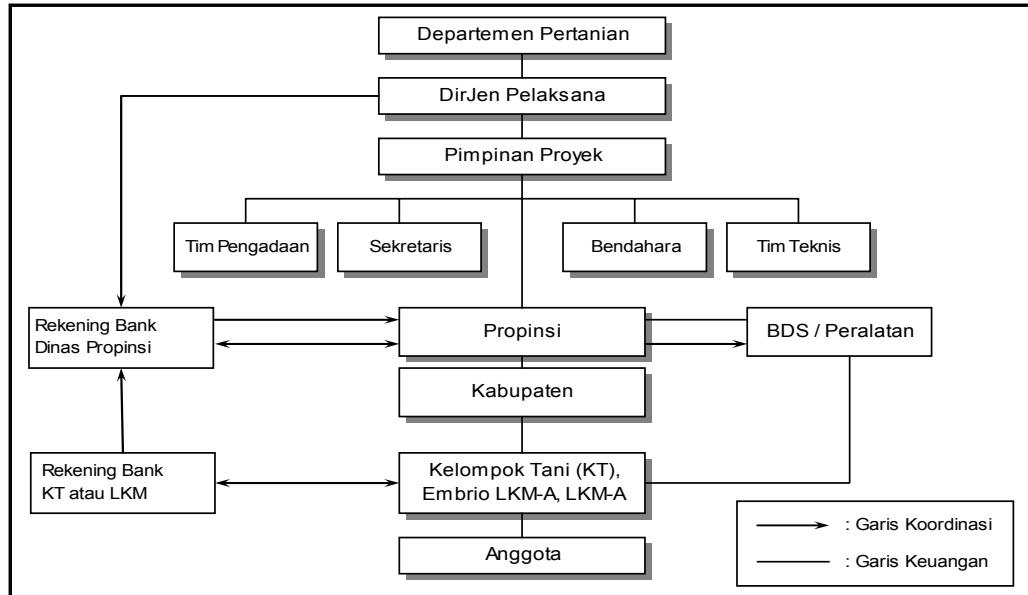
Asumsi di sini adalah bahwa KT telah mencapai tingkat kemampuan dimana mereka mampu melakukan pengolahan hasil pertanian tanpa kesulitan, tetapi KT sangat membutuhkan pendampingan dari pihak ketiga untuk penguatan pemasaran dan kemampuan manajemen organisasi. Terutama untuk KT yang memulai usaha baru dengan menggunakan teknologi baru dan membangun kebutuhan pasar baru, tidak hanya pada pengadaan teknologi pengolahan/ peralatan dan pendirian organisasi, tetapi juga pengembangan pasar dan kemampuan pemasaran, yang akan dikembangkan bersama pihak ketiga.

Karena itu, anggaran dalam rencana implementasi juga dialokasikan untuk perangkat lunak seperti dukungan pihak ketiga, yang memberi layanan dari awal usaha sampai terbentuknya pasar yang stabil. Konsep ini sebaiknya dipakai khususnya untuk pengolahan ubi jalar kering dan kesepakatan penjualan, dan pengolahan mangga dan proyek pemasaran, karena usaha ini masih baru bagi para petani.

5.4.3 Desentralisasi dan Peran Pemerintah Daerah

Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa program-program yang dirancang oleh Pusat, tujuannya menjadi berkurang pada saat sampai ke pemerintah daerah dan akan berkurang

lagi saat sampai ke masyarakat akar rumput. Untuk itu diusulkan, proses-proses di dalam rencana implementasi sebaiknya dikontrol melalui pengawasan dan evaluasi. Berkenaan dengan pengawasan dan evaluasi ini, pihak ketiga tersebut dapat berperan bersama dengan Dinas Pertanian dan Departemen Pertanian. Organisasi implementasi yang diusulkan, seperti ditunjukkan Gambar 45, diusulkan untuk memanfaatkan kepemimpinan dari Dinas Propinsi pada awalnya, kemudian Dinas Kabupaten bisa mengambil alih beberapa peranan setelah mereka cukup memiliki pengalaman.



Gambar 45 Usulan Struktur Organisasi Implementasi (Alur Koordinasi dan Pencairan Dana)

5.4.4 Exit Strategy

Banyak kelompok dan koperasi kerap menerima berbagai bantuan dari pemerintah, tetapi kemampuan mereka masih stagnan dan memiliki tingkat pemupukan modal atau aset yang masih rendah, sebagai akibat tidak memiliki akses keuangan. Rancangan program masa lalu tidak mempertimbangkan *exit strategy* atau strategi graduasi bagi penerima bantuan (beneficiary) untuk menjadi mandiri. Dalam rencana implementasi yang diusulkan di sini, tujuan dari model ini adalah kelompok menjadi entitas yang bisa aktif secara keuangan, yang berarti keluar atau graduasi dari program-program pemerintah. Komponen-komponen yang memungkinkan pemupukan aset dan mengarahkan pada jalan keluar dijelaskan di bawah.

5.4.5 Peningkatan Kemampuan Keuangan

Rencana-rencana implementasi untuk pengolahan dan pemasaran, dan keuangan mikro menggabungkan komponen-komponen perbaikan keuangan KT sasaran seperti berikut ini:

(1) Pinjaman dan Hibah

Skema ini akan didanai dalam bentuk pinjaman dan hibah. Porsi hibah digunakan untuk penyedia layanan BDS yang memberi dukungan teknis dan manajemen. BDS untuk Rencana Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran juga akan menangani manajemen keuangan.

Dukungan permodalan untuk petani sebaiknya dalam bentuk pinjaman dari Bank ke KT, Gabungan dan LKM, tidak dalam bentuk dana bergulir yang langsung diberikan kepada mereka. Dana untuk modal sebaiknya bergulir pada tingkat propinsi, seperti ditunjukkan Gambar 47 usulan struktur organisasi implementasi. Suku bunga pinjaman harus disesuaikan dengan perubahan tingkat suku bunga pasar.

Pada rencana implementasi untuk pengolahan dan pemasaran, pertama-tama pinjaman digunakan untuk memenuhi modal investasi dan modal kerja awal. Suku bunga pinjaman ditetapkan pada tingkat yang sama dengan pinjaman bank agribisnis komersial (saat ini 14% per tahun, saldo menurun), tetapi dengan masa tenggang (*grace period*) satu tahun untuk mengakomodasi kestabilan produksi dan pengolahan. Pembayaran bunga bisa mengakomodasi siklus produksi dan pengolahan komoditas.

Pada rencana implementasi untuk keuangan mikro, pinjaman digunakan untuk memenuhi modal kerja Gabungan dan LKM. Suku bunga pinjaman ditetapkan pada tingkat yang sama seperti pinjaman P4K (saat ini 1% per bulan), dengan saldo menurun dan masa tenggang satu tahun untuk mengakomodasi kestabilan kemampuan organisasi.

(2) Kontribusi anggota sebagai jaminan tabungan

Untuk pinjaman ini, anggota KT wajib memberikan kontribusi 5% sedangkan anggota Gabungan dan LKM memberikan kontribusi 10% dari jumlah pinjaman sebagai tabungan terbekukan. Tabungan ini akan disimpan dalam bentuk deposito berjangka sebagai jaminan, dan saat pembayaran pinjaman sudah lunas, tabungan ini akan diberikan kembali kepada KT, Gabungan dan LKM. Ini juga akan membantu KT, Gabungan dan LKM untuk memupuk aset keuangan selama masa pinjaman.

(3) Insentif untuk pelunasan pinjaman

Untuk rencana implementasi pengolahan dan pemasaran, sebagian bunga pinjaman akan dikembalikan ke anggota Kelompok Tani sebagai insentif pembayaran pinjaman tepat waktu pada akhir tahun kelima. Porsi insentif yang diusulkan adalah 2% per tahun dari 14% pembayaran bunga.

Untuk rencana implementasi keuangan mikro, direkomendasikan bahwa dari seluruh keuntungan yang diperoleh Gabungan dan LKM, seluruh anggota harus setuju pada porsi bagi hasil.

(4) Komponen kegiatan

Untuk Rencana Implementasi Pengolahan dan Pemasaran, kegiatan sebaiknya dilakukan untuk penguatan aspek keuangan KT bersamaan dengan kegiatan berikut:

- (a) Penguatan kegiatan simpan pinjam (untuk seluruh KT)
- (b) Formalisasi organisasi untuk menjadi badan hukum (untuk KT yang bertujuan membentuk LKM mandiri dan LKM masyarakat)
- (c) Identifikasi tokoh kunci untuk pembentukan LKM Masyarakat (untuk masyarakat yang bertujuan membentuk LKM masyarakat)

5.5 Seminar Sosialisasi

5.5.1 Umum

Seminar sosialisasi diselenggarakan di lima kabupaten berturut-turut untuk menjelaskan konsep-konsep di atas, model-model usaha dan rancangan rencana implementasi, untuk memperoleh pendapat pihak-pihak yang terkait dengan pengolahan hasil pertanian dan keuangan mikro pedesaan. Program sosialisasi ini terdiri dari (i) penjelasan gambaran ringkas Studi, (ii) penjelasan pendekatan perbaikan berbasis sektor dan rancangan model implementasi, (iii) diskusi kelompok dan (iv) pengenalan kegiatan-kegiatan BDS di kabupaten.



**Seminar Sosialisasi di Kabupaten
Mojokerto
(Tanggal: 21 Februari 2007)**

Melalui diskusi kelompok, kinerja kegiatan keuangan sebelumnya dan rencana untuk mengelola usulan model implemetasi oleh Kelompok Tani didiskusikan dan dirangkum.

Selain itu, untuk menyiapkan skema keuangan praktis, informasi dan situasi LKM di kabupaten, dan persyaratan pinjaman pada model yang diajukan didiskusikan antara P4K dan LKM pihak yang berkepentingan.

Peserta tiap seminar umumnya terdiri dari pihak Departemen Pertanian Pusat, Dinas Propinsi dan Kabupaten, anggota dari Kelompok Tani terpilih, Bank dan sebagainya.

5.5.2 Hasil Sosialisasi

Dari rangkaian seminar di Kabupaten Contoh, rancangan gagasan peningkatan pendapatan petani melalui pengolahan hasil pertanian dan keuangan mikro pedesaan dipresentasikan dan disiskusikan diantara peserta seminar. Pada umumnya, para peserta umumnya memahami dan menerima rancangan pendekatan perbaikan dan model implementasi. Selain itu, beberapa bahasan menarik dari rangkaian sosialisasi dirinci berikut ini:

- Seluruh Kelompok Tani menunjukkan kepercayaan diri untuk melaksanakan model implementasi yang diusulkan dari sudut pandang keuangan dan teknis dengan pemahaman pentingnya kontribusi keuangan dalam investasi oleh Kelompok Tani.
- Sebagian besar Kelompok Tani mengungkapkan pentingnya pengawasan dan evaluasi berkelanjutan pada usulan kegiatan mereka oleh Dinas terkait bekerjasama dengan bank.
- Anggaran yang dipresentasikan diusulkan dengan syarat bahwa akan digunakan untuk kegiatan-kegiatan sesuai dengan yang diusulkan. Pemahaman yang tidak tepat yang dijumpai (dalam seminar) adalah bahwa Kelompok Tani secara langsung menerima dana sesuai dengan keinginan mereka. Pemahaman mereka pada masalah ini harus diluruskan orientasinya selama tahap persiapan model.
- Kebutuhan akan Pembentukan LKM dikonfirmasi dan disetujui oleh peserta: penguatan lembaga yang sudah terbentuk termasuk bank resmi dan LKM untuk mendukung kegiatan petani merupakan kebutuhan seperti ditunjukkan di Kabupaten Mojokerto.

- Rancangan proposal pengembangan LKM, dengan kondisi: jumlah pinjaman Rp. 50 juta; suku bunga 2.0 % per bulan (angsuran bulanan); Rp. 5 juta berupa tabungan terbelikan di Bank, masih sulit diterima peserta (kelompok P4K dan LKM). Khususnya pada tiga Kabupaten yaitu Cirebon, Mojokerto dan Kediri sudah menikmati jumlah pinjaman yang lebih tinggi di bawah LKM yang sudah terbentuk dan/atau di bawah program keuangan terkait. Pendapat ini bersama dengan pendapat peserta yang menganggap suku bunga yang diusulkan “tinggi”, dimasukkan dalam model implementasi yang direvisi.
- Tingkat pemahaman pada BDS berbeda diantara kabupaten. Seperti di Kabupaten Kediri yang merupakan contoh wilayah Studi, dimana para peserta seminar sosialisasi bisa menangkap peran dan kegiatan BDS (karena peran BDS seperti REI dan BPTP Malang sudah diperkenalkan). Sementara Kabupaten lain dimana peran BDS belum banyak dikenal perlu dipersiapkan peran BDS potensial yang daftarnya ada di Kabupaten untuk diperkenalkan kepada pihak-pihak terkait selama masa persiapan proyek.

5.6 Rencana Implementasi Skema Pengolahan dan Pemasaran

5.6.1 Rencana Implementasi dan Kelompok Tani

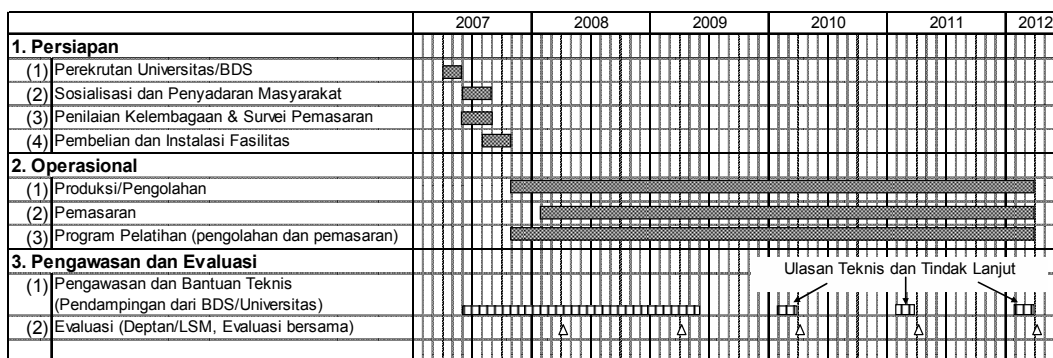
Berdasarkan model usaha, rencana implementasi diusulkan bagi 13 rencana proyek untuk Kelompok Tani yang dipilih oleh Dinas di tiap Kabupaten, dan untuk rinciannya digambarkan pada Lampiran.

- (i) KT Sigranala Indah untuk model: Perluasan Skala Usaha (Kab. Cirebon)
- (ii) KT Bebek Jaya dan KT Tigan Mekar untuk model: Perluasan Skala Usaha dan Pembaruan Teknologi (Kab. Cirebon)
- (iii) KT Mitra Binangkit dan KT Delima 2 untuk Model: Pengolahan dan pemasaran produk-produk tradisional industri rumah tangga (Kab. Majalengka)
- (iv) KT Andayarasa untuk model: Pengolahan produk primer ubi jalar dengan menggunakan teknologi yang tepat dan pemasarannya (Kab. Kuningan)
- (v) KT Bina Karya dan KT Lingga Sari 2 untuk model: Pengolahan dan pemasaran produk unik industri rumah tangga (Kab. Kuningan)
- (vi) KT Makmur Jaya dan KT Budidaya untuk model: Pengolahan buah dengan menggunakan teknologi yang tepat dan pemasarannya (Kab. Kediri)
- (vii) KT Karya Tani dan KT Tani Mulyo untuk model: Perluasan Skala Usaha dan Penguatan Industri Itik (Kab. Mojokerto)
- (viii) KT Lestani Sejahtera untuk model: Proyek uji coba penggunaan Teknologi Penetasan Baru (Kab. Mojokerto)

5.6.2 Tahap-tahap dan Jadwal Implementasi

Waktu implementasi selama 5 tahun dari 2007 sampai 2012 seperti ditunjukkan di bawah

ini:



Gambar 46 Jadwal Implementasi Model Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian

5.6.3 Analisa Keuangan

Ubi jalar dan mangga cenderung hanya merupakan bagian sumber pendapatan rumah tangga. Dibandingkan dengan ubi jalar dan mangga, itik pada umumnya, merupakan sumber utama pendapatan rumah tangga, dan mereka memperoleh pendapatan lebih daripada rumah tangga yang menangani ubi jalar dan mangga. Pengaruh perbaikan pendapatan untuk tiap komoditas adalah sebagai berikut:

Tabel 64 Pengaruh Perbaikan Pendapatan Rumah Tangga

Komoditas Contoh dan Perbaikan	Pendapatan saat ini dari komoditas contoh (per rumah tangga per tahun)	Pendapatan Tambahan (Keuntungan) dari Rencana Implementasi (per rumah tangga per tahun)
Itik dengan perluasan skala pemeliharaan itik	Rp.18 – 60 juta (kecuali sedikit yang pendapatannya lebih dari Rp.60 juta) KT Sigranala Indah: kurang dari Rp.6 juta sampai 18 juta kecuali ketua dengan Rp.120 juta	Rp.5.2 juta sampai Rp.18.0 juta
Mangga kering (berdasarkan pada panen setahun sekali)	Mayoritas kurang dari Rp.6 juta kecuali sedikit berpenghasilan Rp.18 juta	Rp.2.0 juta
Ubi jalar: pengolahan produk primer	Kurang dari Rp.6 juta (KT Andayarasa)	Rp.7.2 juta
Jus mangga (berdasarkan pada panen setahun sekali)	Kurang dari Rp.6 juta	Rp.3.1 juta
Ubi jalar: pengolahan industri rumah tangga	Rp.0 sampai Rp.12 juta	Rp.1.2 juta sampai 11.4 juta

Sumber: Pendapatan saat ini berdasarkan survei rumah tangga yang dilakukan Tim Studi JICA, dan estimasi pendapatan tambahan ditunjukkan pada Tabel 5.6.1.

Ringkasnya, pada akhir tahun kelima, kenaikan pendapatan anggota Kelompok Tani (keuntungan bersih) adalah Rp.4.8 juta bergerak dari Rp.1.2 juta sampai Rp. 18.0 juta per tahun.

Selain dari keuntungan yang disebutkan di atas, Kelompok Tani akan memiliki Rp.2.8 juta sampai Rp.38.6 juta modal sendiri dari tabungan terbekukan yang akan mendapatkan bunga. Beberapa Kelompok Tani mungkin memiliki cukup modal, lebih dari Rp.10 juta untuk menjadi Embrio LKM. Kelompok-kelompok ini akan menjalankan dan

memperluas usaha mereka dengan menggunakan aset mereka sendiri, dan akhirnya mereka bisa mendapatkan akses pada lembaga keuangan formal.

Untuk Kelompok Tani yang pemupukan modalnya kurang dari 10 juta, bantuan lanjutan akan diperlukan untuk meningkatkan modal mereka sampai pada tingkat yang diinginkan. Penggunaan skema SP-3¹ (Skim Pelayanan Pembiayaan Pertanian di bawah Departemen Pertanian) akan direkomendasikan sebagai akses penghubung ke lembaga keuangan formal.

Analisa keuangan pada skim pengolahan dan pemasaran diringkas pada Tabel 5.6.1, dan rinciannya digambarkan pada Lampiran Laporan.

5.7 Rencana Implementasi Skema Keuangan Pedesaan

5.7.1 Rencana Implementasi dan Gabungan dan LKM Sasaran

Untuk keuangan mikro pedesaan, rencana implementasi “Penguatan Embrio Lembaga Keuangan Mikro Pedesaan Non-Bank (Embrio LKM Pedesaan) yang dikembangkan dari Kelompok Petani Kecil (KPK) dan dibentuk di bawah proyek sebelumnya” diajukan untuk 10 Gabungan KPK Gabungan dan LKM yang dibentuk di bawah P4K (RIGP).

Calon Gabungan KPK dan LKM sasaran rencana implementasi didaftar sebagai berikut:

Tabel 65 Calon Sasaran KPK Gabungan atau

Kabupaten	Jumlah Gabungan/LKM	Deskripsi
Cirebon	13 Gabungan, 1 LKM	<ul style="list-style-type: none"> Total 75 Gabungan dan 20 LKM (95 Embrio calon LKM), meliputi 533 KPK, 6,802 anggota Jumlah modal: Rp.0.125 - 161 juta Memilih 10 Embrio calon LKM dari 5 Kabupaten sebagai sasaran
Kuningan	12 Gabungan, 6 LKM	
Majalengka	17 Gabungan, 4 LKM	
Mojokerto	29 Gabungan, 9 LKM	
Kediri	4 Gabungan, 0 LKM	

Tujuan Rencana Implementasi adalah (a) meningkatkan pendapatan dan memupuk aset para anggota Embrio LKM Pedesaan, (b) Memperkuat kemampuan Embrio LKM Pedesaan untuk menjadi bank masyarakat sesungguhnya di daerah terpencil dan (c) membentuk mekanisme pendukung Embrio LKM Pedesaan di Kabupaten.

5.7.2 Tahapan dan Jadwal Implementasi

Waktu implementasi selama 5 tahun dari 2007-2012, seperti ditunjukkan Gambar 47.

¹ Skema SP-3 yang dikelola oleh Deptan untuk tahun 2007 memiliki empat kategori: (i) Usaha Mikro I, jumlah maksimum pinjaman Rp. 10 juta per orang melalui LKM-A, suku bunga 12% per tahun, dan pembagian risiko (*risk sharing*) 90%, (ii) Usaha Mikro II, jumlah pinjaman Rp. 10 juta sampai Rp. 50 juta, dan pembagian risiko 40%, (iii) Usaha Kecil I, jumlah pinjaman Rp. 50 juta sampai Rp. 250 juta, dan pembagian risiko 30% dan (iv) Usaha Kecil II, jumlah pinjaman Rp. 250 juta sampai Rp. 500 juta. Dari (ii) sampai (iv), suku bunga yang berlaku adalah 2-3 % di bawah bunga komersial yang diberlakukan oleh Bank Pelaksana.

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
(i) Seleksi Target	■					
(ii) Survei Baseline	■					
(iii) Loka Karya Awal	■					
(iv) Peningkatan Kapasitas	■					
(v) Dukungan Modal Kerja (Pinjaman)	■					
(vi) Pembinaan yang berkesinambungan	■					
Koordinasi dengan Dinas terkait (Perindustrian & Perdagangan, Koperasi, dll.)	■					
(vii) Evaluasi Tengah-Termin, Evaluasi Akhir & Loka Karya Penutupan				■		■

Gambar 47 Jadwal Implementasi Skim Keuangan

5.7.3 Analisa Keuangan

Pada akhir tahun kelima, LKM akan memiliki modal sendiri sebesar Rp.37 juta untuk 50 anggota, dan Rp.47 juta untuk 100 anggota (tergantung pada jadwal pembayaran dan aturan internal manajemen keuangan). Ini artinya per anggota mendapatkan Rp.472,000 sampai Rp.747,000.

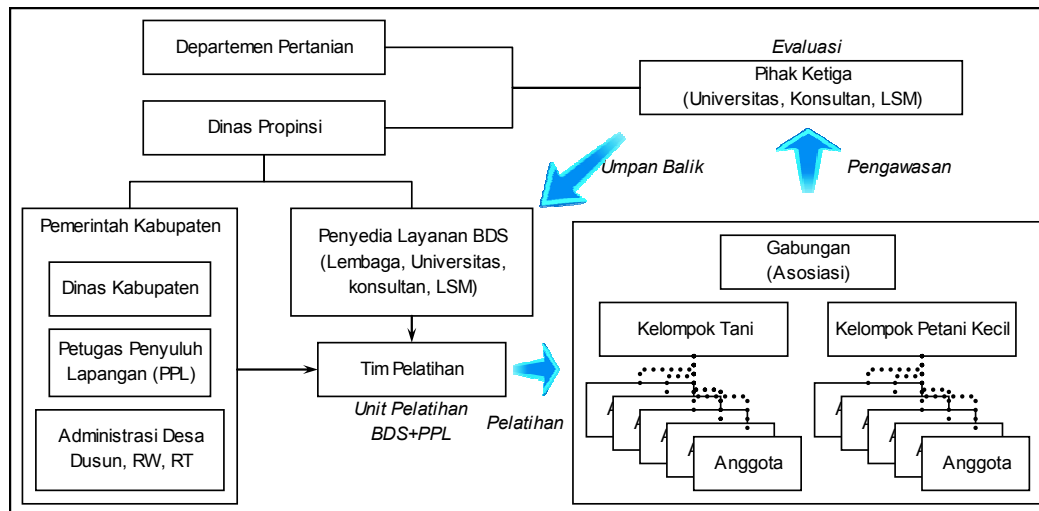
Mungkin jumlah modal ini cukup jika kegiatan peningkatan pendapatan dilakukan sebagai usaha kelompok. Tetapi, jika tiap anggota memiliki usaha masing-masing mereka membutuhkan sedikitnya Rp.1-2 juta. Meski bisa menggunakan tabungan mereka sendiri, para anggota tetap membutuhkan akses ke sumber pendanaan lain. Untuk itu penggunaan SP-3 sebagai akses penghubung ke lembaga keuangan formal dapat direkomendasikan.

Angka-angka ini merupakan jumlah minimal yang diharapkan bisa dinaikkan dari Rencana Implementasi. Selama masa intervensi, juga direkomendasikan untuk (i) meningkatkan jumlah anggota dan basis modal, (ii) mempertimbangkan transformasi beberapa porsi tabungan wajib menjadi saham, (iii) menyiapkan registrasi sebagai LKM resmi dan (iv) mengembangkan layanan-layanan lain seperti pemasaran agribisnis untuk anggota, sehingga modal atau aset akan meningkat lebih dari jumlah yang disebutkan di atas.

5.8 Pengembangan Kapasitas, Pengawasan dan Evaluasi

5.8.1 Gambaran Ringkas

Mekanisme pengembangan kapasitas, pengawasan dan evaluasi untuk mendukung kegiatan Kelompok Tani dalam produksi dan pengolahan hasil pertanian digambarkan sebagai berikut:



Gambar 48 Mekanisme Pengembangan Kemampuan, Pengawasan dan Evaluasi

Sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya, layanan BDS (lembaga penelitian, universitas, konsultan, LSM) diperkenalkan untuk mengembangkan kapasitas teknis Kelompok Tani dalam produksi dan pengolahan. Unit pelatihan (layanan BDS, dan petugas penyuluh lapangan) memberi pelatihan pada anggota inti Kelompok Tani. Kemudian, anggota inti yang sudah dilatih ini secara rutin memberi pelatihan kepada anggota Kelompok Tani melalui kegiatan harian dan latihan produksi dan pengolahan, khususnya dengan merancang program pelatihan. Pengawasan dan evaluasi secara berkala dilakukan bersama oleh pihak ketiga seperti Universitas, konsultan dan LSM, dibawah supervisi dan difasilitasi oleh Pusat, khususnya oleh Direktorat Jenderal bersangkutan. Umpan balik (masukan) dibuat berdasarkan hasil pelatihan dan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan merevisi kegiatan proyek. Umpan balik (masukan) dibuat berdasarkan hasil pelatihan dan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan merevisi kegiatan proyek.

5.8.2 Pengembangan Kapasitas

Pengembangan kapasitas akan melibatkan (i) Pengembangan Lembaga Masyarakat dan (ii) Pengembangan Teknis seperti dijelaskan berikut ini:

(1) Pengembangan Lembaga Masyarakat

Pengembangan lembaga masyarakat diperlukan karena hubungan antara Kelompok Tani, masyarakat dan lembaga seperti lembaga desa, lembaga keuangan, lembaga pemerintah, lembaga swasta & usaha dan lembaga keagamaan sangat mendukung pengembangan masyarakat. Pengembangan lembaga masyarakat bertujuan: (i) Membentuk sistem fasilitasi berbasis desa untuk diseminasi hal-hal teknis ke masyarakat melalui pelatihan anggota Kelompok Tani, (ii) membentuk sebuah perencanaan dan proses pengadaan oleh Kelompok Tani dengan memfasilitasi anggota Kelompok untuk terlibat dalam mengidentifikasi masalah, perencanaan, manajemen dan implementasi kegiatan produksi dan pengolahan, (iii) mendorong kolaborasi dengan organisasi masyarakat terkait. Kegiatan-kegiatan yang diusulkan ditunjukkan di bawah ini:

Tabel 66 Kegiatan-kegiatan yang Diusulkan pada Pengembangan Lembaga Masyarakat

<ul style="list-style-type: none">- Mendukung munculnya kesadaran anggota Kelompok Tani terhadap proyek ini- Mengemukakan basis kelembagaan melalui survei kelembagaan- Mempersiapkan dan mengajukan prosedur seleksi kader Kelompok, jika diperlukan- Berpartisipasi dalam perekrutan LSM untuk menghadiri dan mendukung program pelatihan Kelompok Tani- Mempersiapkan dan mengimplementasikan program penguatan Kelompok Tani dalam kepemimpinan dan manajemen organisasi- Melatih anggota Kelompok Tani dalam pertemuan dan seminar organisasi, dan teknik-teknik pembentukan konsensus di antara kelompok berdasarkan panduan dan petunjuk teknis- Memfasilitasi pengembangan petugas penyuluh di lapangan- Memfasilitasi pembentukan kerjasama usaha- Mendukung pengembangan hubungan antara Kelompok Tani dengan organisasi masyarakat- Memfasilitasi pembentukan Gabungan Kelompok Tani untuk memperluas kegiatan kelompok- Mengimplementasikan analisa gender berdasarkan <i>Gender Analysis Pathway</i> (GAP)- Mempersiapkan indikator-indikator dan melakukan pengawasan & evaluasi untuk pengembangan lembaga Masyarakat

(2) Pengembangan Teknis

Meskipun tingkat kemampuan berbeda tergantung pada daerah dan kelompok, pada umumnya kemampuan Kelompok Tani dalam produksi dan pengolahan saat ini masih rendah. Dengan memperkenalkan layanan BDS, pengembangan teknis dilakukan dengan tujuan untuk (i) memperkuat kemampuan teknis Kelompok Tani dalam produksi, pengolahan dan pemasaran komoditas contoh dan (ii) menciptakan sebuah hubungan antara BDS untuk selalu mendorong pembaruan program-program pelatihan. Kegiatan-kegiatan yang diusulkan adalah:

Tabel 67 Kegiatan-kegiatan yang Diusulkan pada Pengembangan Teknis

<ul style="list-style-type: none">- Merekrut penyedia layanan BDS untuk memberi masukan/bantuan teknis pada kegiatan Kelompok Tani- Memasang peralatan pengolahan dan perlengkapan yang dibutuhkan- Mempersiapkan modul pelatihan untuk Kelompok Tani- Memilah produk-produk panen- Melatih Kelompok Tani pada dokumentasi seperti pencatatan stok, manajemen keuangan, manajemen pertemuan dan lain-lain- Memperkuat pelatihan anggota Kelompok Tani pada praktek produksi seperti pengolahan lahan, manajemen pengairan, pemberian pupuk dan pestisida, mekanisasi pertanian dan pemilahan produk-produk panen- Memperkuat pelatihan anggota Kelompok Tani pada praktek pengolahan seperti pengoperasian peralatan pengolahan, pengeringan dengan tenaga surya, manajemen kebersihan, metode pengawetan, pengemasan dan lain-lain.- Menyediakan pelatihan pemasaran bagi Kelompok Tani seperti riset pasar, pameran, tes-pemasaran, pengembangan jaringan pemasaran dan analisa data pasar- Mempersiapkan laporan kegiatan tahunan dan rekomendasi-rekomendasi untuk pengawasan dan evaluasi- Memunculkan kesadaran Kelompok Tani pada manajemen lingkungan melalui pendidikan lingkungan (misalnya penanganan limbah, erosi tanah dan lain-lain)- Mempersiapkan indikator-indikator pengawasan dan evaluasi dan mengimplementasikan berdasarkan pada indikator-indikator yang diusulkan untuk pengembangan teknis
--

5.8.3 Pengawasan dan Evaluasi

Pengawasan dan evaluasi secara rutin penting dilakukan untuk memahami tingkat kemajuan dan kendala yang dihadapi. Hasil yang perlu dicapai dari pengawasan dan evaluasi adalah akan memberi informasi yang berguna untuk operasional dan manajemen proyek yang sedang berjalan atau untuk proyek yang akan datang.

Selain itu, pengawasan dan evaluasi penting dilakukan untuk pemberdayaan masyarakat, karena pengembangan kapasitas anggota masyarakat dan/atau Kelompok Tani, pertama dan terutama, sebagai pelaku utama dalam kegiatan pengolahan dan pemasaran, diharapkan melalui pengawasan dan evaluasi kegiatan mereka sendiri dan mempersiapkan rekomendasi berdasarkan proses ini. Pengawasan dan evaluasi bersama antara Departemen Pertanian, pihak ketiga dan anggota Kelompok Tani diajukan. Seperti pada jadwal implementasi yang disajikan pada bahasan 5.6 dan 5.7, pengawasan dilakukan selama Proyek berjalan sementara evaluasi dilakukan sekali setahun secara bersama oleh pihak ketiga dan Departemen Pertanian diikuti dengan ulasan teknis dan tindak lanjut yang didukung oleh layanan BDS.

Meskipun rencana rinci pengawasan dan evaluasi akan disusun selama masa persiapan proyek, indikator-indikator perlu dirumuskan sesuai dengan tujuan dan hasil yang diharapkan pada implementasi. Indikator-indikator secara obyektif harus bisa diuji, dan data dan informasi untuk pengujian harus bisa disimpan. Proses pengawasan dan evaluasi hendaknya bersifat partisipatif, dan hasilnya harus diperlihatkan kepada kelompok untuk transparansi.

Gagasan awal dari indikator-indikator pengawasan dan evaluasi terdiri dari: (i) indikator operasional dan (ii) indikator pengaruh. Indikator Operasional bisa dirinci menjadi tiga: indikator organisasi, indikator teknis dan indikator sosial dan lingkungan. Indikator operasional mewakili hasil langsung yang dicapai dari kegiatan-kegiatan yang diusulkan sementara indikator pengaruh menunjukkan konsekuensi hasil langsung pada masa mendatang, yang terdaftar dibawah ini dan ditunjukkan pada Tabel 5.8.1.

Indikator Operasional

Indikator Organisasi

- Jumlah anggota Kelompok Tani
- Jumlah Program Pelatihan
- Persentase Kehadiran pada Program Pelatihan
- Kecukupan Alokasi Anggaran Tahunan Pemerintah untuk Proyek

Indikator Teknis

- Intensitas Penanam Komoditas Contoh
- Jumlah Peralatan Pengolahan

Indikator Sosial dan Lingkungan

- Masalah Gender
- Masalah Lingkungan

Indikator Pengaruh

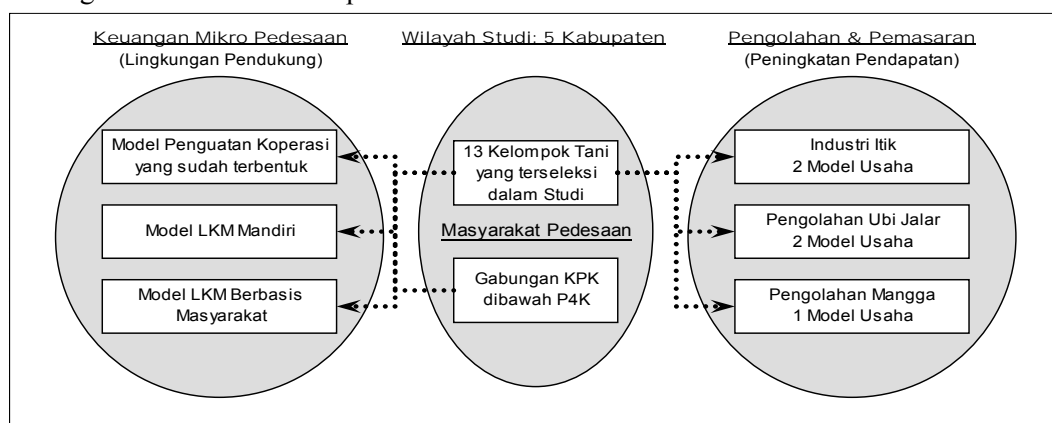
- Hasil Komoditas Contoh
- Rasio Tingkat Tetas (Itik)
- Kualitas Komoditas Contoh
- Jumlah Pengolahan Komoditas Contoh
- Kualitas Produk yang dijual melalui Kelompok
- Pendapatan Bersih Tahunan Petani
- Perbaikan Kondisi Kerja
- Bagi Hasil diantara Kelompok

BAB 6 REKOMENDASI KEBIJAKAN

6.1 Ikhtisar

Studi ini mengajukan model-model usaha bagi kegiatan pengolahan hasil pertanian dan keuangan mikro pedesaan dengan menyusun rencana perbaikan bagi tiap 13 Kelompok Tani yang terseleksi untuk 3 komoditas contoh serta Gabungan yang dibentuk dibawah Program P4K (Proyek Peningkatan Pendapatan Petani-Nelayan Kecil) di 5 kabupaten contoh.

Gambar skematis dari hubungan antara pengolahan hasil pertanian dan keuangan mikro pedesaan dijelaskan pada Gambar 49 dibawah ini. Dari sudut pandang sistem agribisnis, pengolahan hasil pertanian dimasukkan dalam subsistem pengolahan dan pemasaran, sedangkan pendapatan langsung bagi rumah tangga petani berasal dari subsistem agribisnis tersebut (sisi kanan Gambar). Di sisi lain, keuangan mikro pedesaan merupakan subsistem pendukung agribisnis untuk menciptakan lingkungan pendukung usaha dalam menjalankan kegiatan peningkatan pendapatan di daerah pedesaan (sisi kiri Gambar). Selain itu, keuangan mikro pedesaan akan menyediakan layanan keuangan guna memenuhi berbagai permintaan petani dan rumah tangga pedesaan di masyarakat pedesaan dimana layanan keuangan komersial tidak dapat diakses.



Gambar 49 Gambar Skematis Keuangan Mikro Pedesaan dan Pengolahan & Pemasaran

Untuk pengolahan hasil pertanian, rencana perbaikan bagi Kelompok Tani disusun dan dikategorikan menjadi 5 model usaha yang meliputi 2 model usaha bagi industri itik, 2 model usaha bagi pengolahan ubi jalar dan 1 model usaha bagi pengolahan mangga, yang dinilai berdasarkan pada i) karakteristik komoditas, ii) tingkat penerapan teknis, iii) keunggulan pemasaran dari produk olahan, dan iv) kemampuan Kelompok Tani dan petani.

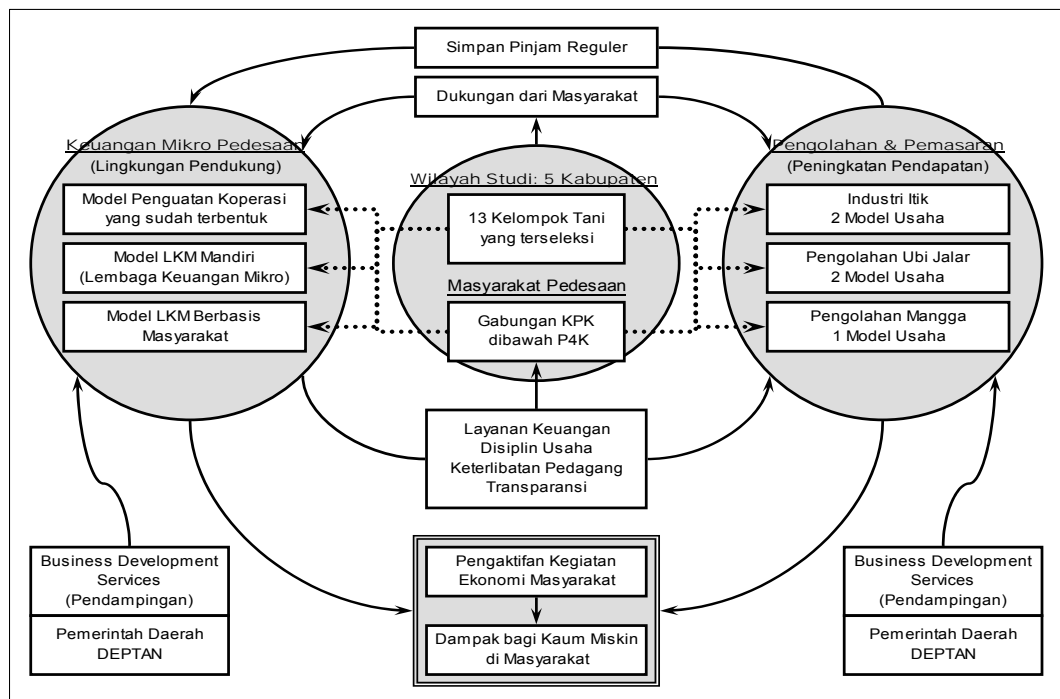
Mengenai keuangan mikro pedesaan, Lembaga Keuangan Mikro (LKM) “berbasis usaha *agro-processing*” disarankan untuk dibentuk di sekitar Kelompok Tani di masyarakat pedesaan, yang diharapkan akan menciptakan lingkungan yang dapat memenuhi berbagai permintaan keuangan di masyarakat pedesaan.

Oleh karena proses simpan pinjam dapat mengembangkan kemampuan dasar dalam menjalankan suatu usaha, maka anggota Kelompok Tani tidak mungkin dapat

melaksanakan kegiatan agribisnis tanpa memiliki kemampuan manajemen yang tepat dalam melakukan kegiatan simpan pinjam mereka. Berdasarkan asumsi tersebut dan analisa dari kondisi Kelompok Tani saat ini, ada 3 model usaha yang diajukan untuk keuangan mikro yaitu i) LKM Mandiri: yang akan dibentuk di dalam Kelompok Tani dengan melibatkan kelompok-kelompok lain dan anggota masyarakat, ii) LKM Berbasis Masyarakat: yang akan dibentuk bukan di dalam Kelompok Tani tetapi di masyarakat dengan mengangkat ketua lain apabila Kelompok Tani memiliki ketua yang sangat dominan, iii) Memperkuat koperasi yang sudah dibentuk. Untuk seluruh model usaha tersebut, pedagang dan pengepul dianjurkan untuk berpartisipasi dalam LKM dan koperasi untuk menciptakan hubungan yang lebih adil dengan para petani dalam kegiatan pemasaran produk, serta untuk memberikan kontribusi dana kepada LKM.

Apabila LKM Mandiri yang dijelaskan diatas nantinya berkembang, sebuah rencana implementasi akan dipersiapkan untuk membentuk LKM berdasarkan pada Gabungan KPK yang sudah terbentuk melalui program P4K, sebagai upaya tindak-lanjut dan peningkatan fungsi dan kegiatan mereka.

Setelah pendirian, LKM harus mampu mempertimbangkan tren saat ini dan kerangka hukum yang memayungi keuangan mikro. Walaupun pada saat pendirian LKM masih merupakan Embrio, LKM harus memiliki tujuan untuk mendapatkan status hukum sebagai LKM demi kesinambungan lembaga dan meningkatkan kesempatan dalam mengakses sistem pendanaan dari perbankan komersial. Dalam proses mengembangkan model-model usaha tersebut, ada beberapa faktor penting seputar pengolahan hasil pertanian dan keuangan mikro pedesaan yang teridentifikasi seperti dijelaskan pada gambar berikut ini:



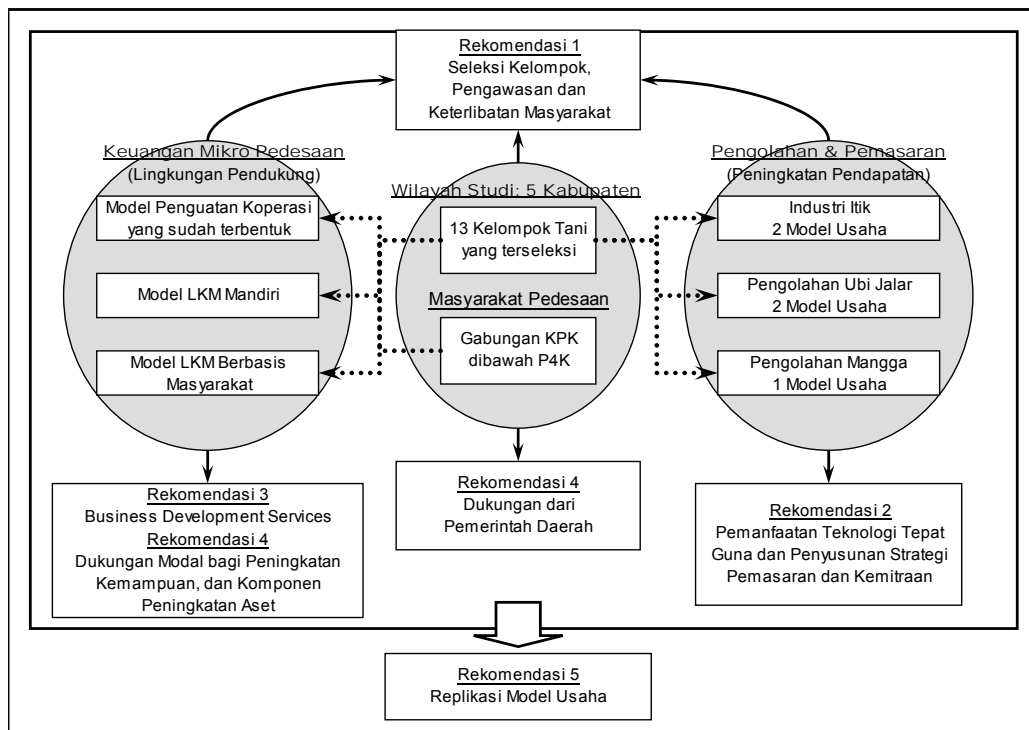
Gambar 50 Model Usaha Keuangan Mikro Pedesaan dan Pengolahan & Pemasaran

Setelah model-model tersebut diimplementasikan, dampak langsung yang disebabkan oleh pengolahan hasil pertanian diperkirakan akan meningkatkan pendapatan rata-rata sekitar Rp.4.8 juta per tahun bagi jumlah total 335 anggota rumah tangga di 13 Kelompok Tani. Sedangkan dari hubungan dengan LKM atau penguatan koperasi, diharapkan akan memperbaiki tingkat kemandirian melalui peningkatan aset dan modal sendiri dalam mengakses pendanaan dari perbankan komersial setelah proyek berakhir dalam masa 5 tahun. Dari hubungan tersebut pula, dampak langsung diharapkan kepada 4,200 rumah tangga di masyarakat, dimana terdapat 48% atau 2,000 rumah tangga yang berada dalam kategori miskin.

6.2 Rekomendasi Kebijakan

Beberapa rencana perbaikan tersebut di atas diharapkan akan dapat diimplementasikan melalui skema Second Kennedy Round-Counterpart Fund (SKR-CF) pada tahun 2007 dan 2008. Dengan asumsi bahwa model usaha serta hubungan antara pengolahan dan keuangan dapat direplikasi untuk komoditas lain dan di daerah lain, serta untuk produksi primer hasil pertanian melalui modifikasi model dan prosedur.

Berbagai pengalaman dan implikasi telah diperoleh selama proses Studi ini yang sangat berguna bagi kelancaran implementasi agar mendapatkan hasil yang lebih baik. Dari berbagai pengalaman dan implikasi tersebut, beberapa aspek penting telah dipilih sebagai rekomendasi kebijakan dalam pelaksanaan model-model usaha bagi promosi kegiatan pengolahan hasil pertanian dan keuangan seperti yang dijelaskan pada Gambar 51:



Gambar 51 Ringkasan Aspek Penting bagi Rekomendasi Kebijakan

6.2.1 Seleksi Kelompok, Pengawasan dan Keterlibatan Masyarakat

Selama proses Studi, kami menemukan bahwa kemajuan dalam kegiatan simpan pinjam suatu kelompok menjadi salah satu indikator yang bermanfaat dalam mengukur kinerja kelompok tersebut. Kegiatan menabung khususnya, bukan sekedar mengakumulasi uang tetapi merupakan sebuah proses dalam mengelola keuangan dan kelompok tersebut. Pengelolaan keuangan dan kelompok merupakan persyaratan utama dalam menjalankan usaha kelompok yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan.

Walaupun membutuhkan waktu yang cukup lama untuk melaksanakan kegiatan simpan pinjam secara teratur, kegiatan ini memberikan kesempatan bagi anggota kelompok untuk memikirkan bagaimana cara memanfaatkan tabungan mereka untuk pengembangan usaha. Oleh karena tabungan tersebut merupakan uang mereka sendiri dan bukan bantuan (hibah), anggota harus secara serius memikirkan rencana kelompok mereka. Setelah memiliki kegiatan simpan pinjam yang baik dan perencanaan bagi kegiatan peningkatan pendapatan, kelompok akan mendapatkan pinjaman lunak yang diajukan dalam Studi ini guna meningkatkan kegiatan agribisnis mereka.

Kegiatan simpan pinjam telah diperkenalkan jauh sebelumnya dan banyak kelompok telah melakukan kegiatan simpan pinjam dibawah berbagai macam program. Untuk memanfaatkan situasi tersebut, kelompok-kelompok yang lebih baik akan diseleksi berdasarkan pada kemajuan dan kinerja kegiatan simpan pinjam mereka, sehingga masa menggiatkan kegiatan peningkatan pendapatan dapat dipersingkat. Bahkan, rencana perbaikan yang diajukan dalam Studi ini menetapkan persyaratan bagi Kelompok Tani dan Gabungan untuk memberikan kontribusi sebesar 5 hingga 10% dari pinjaman lunak sebagai tabungan terbekukan.

Bagi kelompok yang belum melakukan kegiatan simpan pinjam secara teratur, atau bahkan belum memulai kegiatan tersebut sama sekali, kelompok harus memulai atau memperkuat kegiatan simpan pinjam mereka dibawah bimbingan dan latihan yang cermat guna meningkatkan kemampuan kelompok tersebut. Setelah dapat menunjukkan adanya proses kegiatan simpan pinjam yang baik, maka kemampuan kelompok yang dikembangkan tersebut dianggap sudah memiliki cukup dasar untuk diperkenalkan kepada kegiatan usaha, sehingga bantuan dalam bentuk pinjaman lunak dapat diberikan.

Kesinambungan kegiatan tersebut dapat diperkuat oleh adanya keterlibatan masyarakat dalam prosesnya. Kelompok biasanya terbentuk pada tingkat masyarakat dan melaksanakan kegiatan mereka di seputar masyarakat. Pengolahan hasil pertanian dan pemasaran memanfaatkan bahan baku yang tersedia secara lokal, dan produk didistribusikan melalui pengepul dan perantara yang juga merupakan anggota masyarakat. Untuk keuangan mikro, sebuah LKM yang akan dibentuk di tengah masyarakat pedesaan juga akan melibatkan anggota masyarakat. Sehingga masyarakat menjadi badan utama yang mendukung kelompok sasaran. Guna mendapatkan dukungan tersebut, penting untuk memastikan bahwa rencana perbaikan yang dianjurkan dapat dipahami secara benar oleh seluruh anggota masyarakat. Disamping itu, masyarakat itu sendiri akan menjadi basis

dari perluasan program tahap berikutnya karena diharapkan pada saat itu, mereka sudah dapat melihat keuntungan dan dampak dari program tersebut.

Pengawasan (monitoring) bagi kegiatan kelompok merupakan faktor penting untuk memastikan kesinambungan kegiatan kelompok. Akan tetapi tidak dianjurkan bagi orang atau lembaga yang terlibat langsung dalam kegiatan untuk melakukan kegiatan pengawasan jika ditinjau dari sudut pandang transparansi dan akuntabilitas. Pihak ketiga yang bersifat independen dari segala keterlibatan langsung dalam hal ini merupakan pihak yang ideal untuk bertanggung jawab dalam kegiatan pengawasan. Pihak ketiga berada pada posisi yang lebih baik untuk melaksanakan kegiatan pengawasan dan mencari informasi yang dibutuhkan dari sudut pandang netral, serta memberikan umpan balik kepada kelompok dan pemerintah daerah bagi perbaikan kinerja mereka. Pihak ketiga juga dapat dilibatkan dalam kegiatan evaluasi.

6.2.2 Teknologi Pengolahan & Komoditas Lain dan Kerjasama Pemasaran

Dalam pelaksanaan Studi, telah ditemukan bahwa setiap kelompok memiliki tingkat yang berbeda dalam bidang teknologi pengolahan. Padahal teknologi tepat guna yang sesuai dengan tingkat kemampuan petani telah tersedia di lembaga teknis dan universitas. Oleh sebab itu ketika rencana perbaikan diimplementasikan, penilaian kemampuan dari Kelompok Tani sangat penting untuk dilakukan agar teknologi tepat guna bagi Kelompok Tani dapat diidentifikasi dan diperkenalkan oleh lembaga dan universitas tersebut.

Guna mempersiapkan strategi pemasaran untuk mencari produk terbaik yang dapat diproduksi dan diolah sesuai dengan kemampuan kelompok serta ketersediaan bahan baku, perlu diterapkan metodologi pengembangan sektor swasta, seperti Analisa Rantai Nilai (*Value Chain Analysis*), Analisa SWOT (*SWOT Analysis*) dan Bauran Pemasaran (*Market Mix*). Analisa rantai nilai diperlukan untuk mengidentifikasi potensi dan hambatan kegiatan dari para pelaku alur pemasaran komoditas, seperti yang dipersiapkan dalam Studi. Analisa SWOT menyediakan aspek-aspek khusus yang harus difokuskan melalui analisa kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*) dan tantangan (*threat*) dari pemasaran komoditas. Bauran Pemasaran merupakan proses untuk menentukan produk dan metode pemasaran melalui analisa produk, harga, jaringan pemasaran dan promosi pasar. Pada tingkat kelompok, analisa yang sederhana dapat digunakan untuk menentukan produk dan pasar.

Untuk hubungan antara pengolahan dan pemasaran, para pemangku kepentingan (*stakeholders*) seperti perantara dan pengepul perlu dilibatkan dalam penjualan produk olahan, karena pasar selalu berubah dan cukup sulit bagi petani untuk mendapatkan informasi pasar. Para pemangku kepentingan pemasaran tersebut juga merupakan pengambil risiko (*risk takers*). Pada kondisi sekarang ini, perantara dan pengepul mendominasi transaksi produk pada tingkat usahatani (*farmgate*) sehingga menempatkan mereka pada posisi yang kuat. Dengan melibatkan mereka ke dalam LKM yang akan dibentuk di sekitar Kelompok Tani di masyarakat, petani di KT dan pemangku kepentingan pasar dapat memasuki kerjasama yang seimbang, yang akan memberikan hasil yang lebih baik bagi kedua belah pihak.

6.2.3 Business Development Services (BDS)

Seperti yang telah dijelaskan diatas, seluruh kelompok membutuhkan dukungan dalam mempersiapkan strategi pemasaran dan pelaksanaannya. Dukungan tersebut meliputi berbagai aspek yang luas seperti pengelolaan keuangan, pengelolaan kelompok, teknologi pengolahan, pengaturan pemasaran, koordinasi dan komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Aspek-aspek tersebut tidak mungkin dapat dikelola oleh satu orang tetapi membutuhkan keahlian para profesional melalui komunikasi yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan. Sehingga penyedia jasa pengembangan usaha atau Business Development Service (BDS) diharapkan untuk dapat memberikan layanan bagi aspek-aspek tersebut.

Seperti yang telah dijelaskan dalam rencana implementasi yang dipersiapkan bagi Kelompok Tani terpilih, dukungan yang tepat diharapkan dapat diberikan sejak tahap awal. Dukungan yang dipersiapkan bukan hanya untuk permodalan, peralatan atau infrastruktur, namun juga anggaran untuk membayar penyedia BDS. Setelah kelompok cukup memiliki pengalaman dan pengetahuan, dukungan BDS mulai dapat dikurangi secara bertahap sesuai dengan hasil monitoring. Pada akhirnya kelompok diharapkan untuk dapat keluar, atau graduasi dari bantuan. Hanya ketika kelompok menghadapi masalah, dukungan BDS dapat diberikan.

Untuk mendukung kegiatan ini, daftar inventarisasi bagi penyedia BDS disarankan untuk dipersiapkan oleh pemerintah daerah tingkat Kabupaten dan Propinsi yang mencakup kinerja dari BDS tersebut. Daftar tersebut diharapkan untuk selalu diperbarui berdasarkan pada hasil monitoring dan evaluasi dari layanan yang BDS berikan kepada kelompok.

6.2.4 Dukungan Permodalan bagi Peningkatan Kemampuan, dengan Komponen Peningkatan Aset

Dukungan permodalan bagi petani harus dalam bentuk pinjaman lunak dari bank kepada Kelompok Tani atau Gabungan, bukan dalam bentuk dana bergulir yang diberikan langsung kepada mereka. Disamping itu, Kelompok Tani atau Gabungan wajib memberikan 5 hingga 10% dari jumlah pinjaman tersebut sebagai tabungan terbekukan guna menunjukkan komitmen mereka serta tingkat kedisiplinan keuangan yang diperlukan dalam pelaksanaan proyek ini. Tabungan tersebut nantinya akan mendapatkan bunga layaknya pada deposito berjangka yang akan dikembalikan kepada Kelompok Tani atau Gabungan yang dapat disimpan sebagai aset. Selanjutnya, untuk rencana perbaikan pengolahan, pembayaran tepat waktu akan dihargai dengan pemberian persentase tertentu dari suku bunga pembayaran yang juga akan dikembalikan kepada Kelompok Tani untuk menambah aset mereka. Cara ini dimaksudkan untuk melatih kemampuan manajemen keuangan para petani, dan mendorong mereka untuk bergraduasi dari bantuan pemerintah dan menjadi mandiri.

6.2.5 Dukungan dari Pemerintah Daerah

Diantara berbagai dukungan yang diharapkan dari pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Propinsi dan Dinas Kabupaten, dukungan yang paling penting adalah dalam menciptakan

lingkungan yang mendukung bagi kegiatan kelompok yang meliputi pengetahuan dasar mengenai pengelolaan keuangan mikro termasuk simpan pinjam, serta pengaturan penyedia BDS.

Dinas-dinas lain juga dapat membantu untuk mempromosikan pembentukan kelompok, kegiatan pengolahan dan pemasaran, serta keuangan mikro. Sebenarnya, ada beberapa kelompok sasaran yang dibentuk dibawah program Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Koperasi dan UKM. Oleh sebab itu, disarankan untuk memanfaatkan serta mereplikasi pengalaman dan pelajaran yang didapat dari program dibawah dinas-dinas tersebut, untuk dapat berjalan seiring dengan program-program Dinas Pertanian.

6.2.6 Replikasi Model Usaha

Dampak dari rencana perbaikan bagi pengolahan hasil pertanian harus dianalisa dari sudut pandang pembiayaan (*cost*) dan keuntungan (*benefit*). Pembiayaan terdiri dari hibah dan pinjaman, sedangkan keuntungan meliputi keuntungan dari agribisnis, aset yang terkumpul dan insentif yang diterima pada akhir tahun kelima proyek ini.

Pada rencana implementasi bagi pengolahan hasil pertanian dijelaskan bahwa anggota kelompok akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.4.8 juta per tahun dari total pembiayaan sebesar Rp.11.1 juta per anggota yang meliputi investasi sebesar Rp.7.0 juta (termasuk kontribusi tabungan agunan sebesar Rp.350 ribu) dan didukung oleh hibah sebesar Rp.4.1 juta untuk 5 tahun.

Mengenai peningkatan aset pada kelompok ukuran rata-rata (25.8 anggota), sekitar Rp.12.7 juta dapat diakumulasi sebagai modal Kelompok Tani setelah implementasi selama 5 tahun. Selain itu, anggota juga akan mendapatkan bagian dari pembayaran bunga sebagai insentif pembayaran tepat waktu, yaitu sebesar Rp.490 ribu (Rp.98 ribu per tahun). Dari 13 kelompok, 5 kelompok akan memiliki cukup modal untuk menjadi embrio LKM yang kemudian diharapkan untuk memperluas kegiatan mereka dan berkembang menjadi LKM agribisnis (LKM-A).

Pembiayaan atau anggaran bagi replikasi model tersebut terdiri dari hibah untuk bantuan teknis dan bantuan manajemen, serta pinjaman untuk bantuan permodalan. Walaupun diasumsikan bahwa bantuan teknis dan manajemen dalam bentuk hibah dapat dikurangi menurut skala penilaian, misalkan apabila replikasi dibuat untuk mencakup lebih banyak kelompok di wilayah tertentu. Namun, dampak dari pengurangan porsi hibah tersebut pada saat ini masih belum dipertimbangkan.

Anggaran yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian adalah sebesar Rp.413 milyar untuk tahun 2007. Apabila 25% dari anggaran tersebut (Rp.100 milyar) dialokasikan untuk mereplikasi model yang diajukan, 350 kelompok akan diuntungkan dari replikasi proyek tersebut, ini berarti ada sekitar 9,000 rumah tangga yang akan turut berpartisipasi dalam proyek tersebut. Jika diasumsikan setiap Direktorat Jenderal seperti Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan serta Pusat Pembiayaan Pertanian dapat mengalokasikan anggaran dengan jumlah yang sama, maka sekitar 1,400 kelompok lain akan mendapat implementasi proyek dengan partisipasi

sebanyak 36,000 rumah tangga. Disamping itu, 63% dari investasi (Rp.63 milyar) adalah dalam bentuk pinjaman lunak dimana kelompok harus membayar jumlah tersebut di akhir tahun kelima. Dana tersebut kemudian dapat dimanfaatkan untuk perluasan replikasi selanjutnya.

Bagi rencana implementasi bagi keuangan mikro, pinjaman sebesar Rp.100 juta akan ditawarkan kepada 10 Gabungan dari kelompok usaha kecil (masing-masing 50 hingga 100 anggota rumah tangga) sebagai pinjaman lunak untuk membantu penguatan permodalan. Setelah 5 tahun berakhir, dana sejumlah Rp.27 juta sampai Rp.37 juta dapat diakumulasikan untuk kegiatan operasional LKM. Apabila anggaran Rp.100 milyar dialokasikan untuk replikasi model, maka 1,000 Gabungan kelompok (50,000 sampai 100,000 rumah tangga) dapat turut berpartisipasi.

Secara total, dengan anggaran tidak lebih dari Rp.500 milyar yang diasumsikan akan dialokasikan oleh setiap Direktorat Jenderal dan Pusat Pembiayaan Pertanian seperti dijelaskan diatas, 2,400 kelompok dapat berpartisipasi dalam replikasi model, atau 0.4% dari jumlah total kelompok di Indonesia (655,000 Kelompok Tani pada tahun 2001). Sedangkan untuk mencakup 5% (32,800 kelompok) dari jumlah total Kelompok Tani di Indonesia, dibutuhkan alokasi anggaran sebesar Rp.6,800 milyar.

Table

Table 2.3.1 Priority Area in the Government Work Plan for 2007 under National Medium-Term Development Plan (1/2)

Priority Area	Focus in the Priority Area
01. Poverty Handling	<ul style="list-style-type: none"> - Expansion of Access of Poor People to Education, Health and Basic Infrastructure - Social Protection - Eradication of Lack of Nutrition Problem and Food Emergency - Expansion of Business Opportunities
02. Improvement of Job Opportunities, Investment and Export	<ul style="list-style-type: none"> - Creation of More Flexible Workforce Market - Improvement of Investment and Business Atmosphere - Improvement of Non oil and Gas Export, Expansion of Destination Countries and Export Products - Improvement of Tourism Intensity - Improvement and Productivity and Access of Small & Medium Scale Enterprises to Productive Resource
03. <u>Revitalization of Agriculture, Fishery, Forestry and Village Affairs</u>	<ul style="list-style-type: none"> - <u>National Food Security</u> - <u>Improvement of Quality of Agriculture, Fishery and Forestry Production Growth</u> - <u>Improvement of Economic Diversification and Rural Infrastructures</u> - <u>Development of Natural Resources for Renewable Energy</u>
04. Improvement of Accessibility and Quality of Education and Health	<ul style="list-style-type: none"> - Acceleration of Even Spreading, Improvement of Accessibility and Quality of Nine-Year Primary Education - Improvement of Accessibility, Spreading, Improvement of Relevance of Qualified Secondary and High Education - Improvement of Availability and Quality of Teachers - Reduction of Illiteracy - Improvement of Accessibility, Even Spreading, Affordability and Quality of Health Services particularly for Poor People - Prevention of Eradication of Diseases particularly Contagious Diseases and Equipment including Avian Flu Integrated Handling - Handling of Lack of Nutrition and Bad Nutrition Problems among Pregnant Mothers, Babies and Infants - Improvement of Availability of Essential Generic Medicines, Supervision on Medicines, Food and Food Security
05. Law Enforcement, Corruption Eradication and Bureaucratic Perform	<ul style="list-style-type: none"> - Optimization of Implementation of Corruption Eradication National Action Plan - Acceleration of Settlement of Corruption Cases and Human Right Violation - Acceleration of Institutional Law Reinforcement - Acceleration of Bureaucracy Reform Implementation - Improvement of Accountability of Political and Public Institutions

Source: 1) Presidential Regulation No. 7 / 2005 regarding 2004 -2009 National Medium-Term Development Plan ratified on January 19th 2005 (unofficial translation), 2) Presidential Regulation No. 19 / 2006 regarding Government Work Plan for 2007 ratified on May 15th 2006.

Table 2.3.1 Priority Area in the Government Work Plan for 2007 under National Medium-Term Development Plan (2/2)

Priority Area	Focus in the Priority Area
06. Reinforcement of Defense Ability, Stability of Security and Order as well as Conflict Settlement	<ul style="list-style-type: none"> - Improvement of Ability of the Indonesian National Army and National Police Force - Prevention and Eradication of Drugs - Improvement of Roles of National Defense Industry - Handling and Prevention of Terrorism Actions - Settlement and Prevention of Conflicts - Handling and Prevention of Various Forms of Crimes, either Conventional or Cross Country - Improvement of Intelligence Quality - Acceleration of Construction of State Code Communication Network - Handling and Prevention of Sea Disturbance
07. Mitigation and Disaster handling	<ul style="list-style-type: none"> - Mitigation of Post Disaster Rehabilitation and Reconstruction Activation in NAD and Nias Particularly in Housing and Settlement Sectors and Expansion of Job Opportunities for Disaster Victims - Settlement Post Disaster Rehabilitation and Reconstruction Activities in Alor, Nabire, other Disasters in other Regions - Institutional Reinforcement in Disaster Prevention and Handling in National and Regional Levels - Prevention and Reduction of Disaster Risks - Improvement of Peoples' Alertness in Facing Disasters
08. Acceleration of Construction of Infrastructure	<ul style="list-style-type: none"> - Improvement of Infrastructure Services according to Minimum Service Standards - Achievement of Improvement of Real Sector Competitiveness - Increase of Investment on Infrastructure Projects conducted by Private Sector through Various Cooperation Scheme between Government and Private Sector
09. Construction of Border Regions and Isolated Regions	<ul style="list-style-type: none"> - Confirmation and Arrangement of State Borders on Land and Sea including around the Outermost Small Islands - Improvement of Bilateral Cooperation in Political, Law and Security Sectors with Neighboring Countries - Spatial Arrangement and Management of Resources and Environment in Border Regions and Outmost Small Islands - Support of Policies on Construction for Acceleration of Construction in Border Regions and Outermost Small Islands - Development of Economic Facilities and Infrastructure in Isolated Regions

Source: 1) Presidential Regulation No. 7 / 2005 regarding 2004 -2009 National Medium-Term Development Plan ratified on January 19th 2005 (unofficial translation), 2) Presidential Regulation No. 19 / 2006 regarding Government Work Plan for 2007 ratified on May 15th 2006.

Table 2.3.2 Focus and Priority Activities in the Government Work Plan 2007 under the National Medium-Term Development Plan (RPJMN) (1/2)

Focus	Prioritized Activities
<p>01. National Food Security: sufficient domestic supply of rice, production of vegetables and meat</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Improvement of food production and productivity in order to improve domestic food supply, especially rice, through the development of seedlings; intensification of rice, legume and tuber plant production, provision of facilities and infrastructure including improvement of the functions of irrigation networks at the farmer level, expansion of planting and harvesting areas; <u>post-harvest management, processing and marketing of agricultural products</u>; increased intensification and food security; development and protection plants and animals with the support of a quarantine system and food security monitoring system as well as control of avian flu transmission to animals; - Improvement of food distribution system and access to food through the development of inter-region food support, effective model of food distribution and development of food reserves; - Increase of food consumption, diversification and security by developing balanced food consumption pattern, provision of subsidized rice for underprivileged people; - Improvement of food and agricultural production supporting system by developing <u>post-harvest production, processing and development technology for food products and improvement of farmers' and agricultural institutions</u>, including the strengthening of Water Consuming Farmers' Association (P3A) as well as arrangement of agricultural land control, ownership, use and utilization (P4T) in order to create a fair agricultural land control and ownership structure; - Management of dams, rivers, swamps and flood control; - Conservation of rivers, dams and water sources; - Flood control and coast safeguarding; - Improvement of forest and land rehabilitation, especially in prioritize river basins.
<p>02. Improvement of Quality of Agriculture, Fishery and Forestry Production Growth</p> <ul style="list-style-type: none"> - Enhancement of the farmers' production and income - Enhancement of fishery production and increase of income for fishermen, fish cultivators and other coastal communities 	<ul style="list-style-type: none"> - Increase in the productivity and production of plantations, animal husbandries and horticultural businesses; - Development of <u>commodities and processing to increase the value of the products</u> of plantations, animal husbandries and horticultural businesses; - Strengthening of agricultural extension institution, <u>enhancement of service institutions for farmers (finance and saprodi)</u>, capacity building for human resources to be assigned as extension agents and apparatus, farmers and agribusiness entrepreneurs; - Improvement of the development and dissemination of effective technologies to support the enhancement of productivities and quality of agricultural products; - Improvement of competitive power by applying tariff harmonization and synchronization of policies on agribusiness programs, institutional development and market information, international trade cooperation, improvement of quality and quality standards as well as application of a quarantine system to control diseases harmful to production and product safety; - Development of <u>rural agribusiness, business partnership patterns in agricultural sector</u> and development of rural infrastructure (agricultural/production roads, and dry land irrigation facilities); - Strengthening and development of efficient and people-based catch fishing, as well as development of environment-friendly cultivation businesses; - Revitalization of fishery especially for tuna, shrimp and seaweed commodities by increasing the business scale of fishermen and fish cultivators, economic empowerment and strengthening of community institutions; - The development and rehabilitation of fishery facilities and infrastructure as well as other production input; - The development and empowerment of handling and processing industries to improve quality standard and additional value and product marketing.

(continued to the next page)

Source: Presidential Regulation No. 19 / 2006 regarding Government Work Plan for 2007 ratified on May 15th 2006.

**Table 2.3.2 Focus and Prioritized Activities of in the Government Work Plan 2007
under National Medium-Term Development Plan (RPJMN) (2/2)**

Focus	Prioritized Activities
(continued from the previous)	<ul style="list-style-type: none"> - Empowerment of statistical database & fishery information system, applied technological engineering and its dissemination, and also improvement of human resources quality in the fishery sector and the fishery consultation system; - The development of a quarantine system and fish health management system; - The improvement of the fishery business quality and licensing, seed center certification, fishery-based territorial development, and coordination of illegal fishing handling, and other supporting infrastructure; - The management of fishery resources in a responsible and sustainable manner, and also economic, social, cultural empowerment of business actors in the field of fishery and coastal communities.
- Forest Products	<ul style="list-style-type: none"> - The development of the management of natural forests, crop forest, non-wood forest products, environmental services and social forestry; - The development of forest product industries and marketing; - The protection, prevention and mitigation of forest fire; - The management of national parks and other conservation areas; - The deregulation of laws and regulations on forestry to support accelerated development of crop forests; - The coordination of illegal logging handling; - The accelerated formation of KPH; - The prioritization of timber supply for industries having high additional value.
03. Improvement of Economic Diversification and Rural Infrastructures	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Facilitate the development of rural economy diversification, rural financial institutions, and the dissemination of effective technology for rural areas;</u> - Develop the infrastructure and facilities of agropolitan areas; - Develop infrastructure in central growth villages and the development of facilities and infrastructure supporting P2KPDT, and the development of rural infrastructure based on the PKPS BBM pattern; - Empower rural community institutions and organizations, improvement of capacity of rural development facilitators, dissemination of information for rural communities, and stabilization of rural government institutions in managing development; - Provide <u>business capital scheme with the interest system, revolving fund profit sharing system</u>, lump sum system, and the guarantee of local opinion leaders as a substitute collateral; - Provide SME credit security scheme, especially investment credit in the agribusiness and industrial sectors; - Install 27,515 new telephone lines in 10,100 villages and develop 100 units of community access point; - Develop central and regional government cooperation pattern in developing rural electricity.
04. Development of Natural Resources for Renewable Energy	<ul style="list-style-type: none"> - Stipulate a master plan for the utilization of biodiesel and biofuel as sources of renewable energy, the stipulation of the price of biodiesel and biofuel according to the economic value, the provision of facilities to business entities that develop the processing of biodiesel and biofuel and the distribution network; - Improve regulations and prepare legal instruments and incentives for innovations in the utilization of biodiesel and biofuel as sources of renewable energy; - Supply biodiesel and biofuel raw materials and strategic reserve by providing supports for the preparation of agricultural land, development of a procedure for the utilization and storage of biodiesel and biofuel as renewable energy, support for the development of coconut palm oil/castor oil processing plants for biodiesel and ethanol processing plants for gasohol (biofuel) at small and medium production scale (pilot scale), and the improvement of research in discovery renewable energy sources (biodiesel and biofuel) and the processing application technology

Source: Presidential Regulation No. 19 / 2006 regarding Government Work Plan for 2007 ratified on May 15th 2006.

Table 4.2.1 Marketing Activities applicable to each Type of Business Unit

How to read this table:

1. Left columns indicate many types of marketing activities, and classified into three (3) categories; <1> Activities for finding Customers' Requirement, <2> Activities for Creation and Development of Customers (Sales Promotion), and <3> Activities for these two (2) objectives.
2. Middle columns show actual examples of activities (Only name of Kabupaten and Kecamatan and commodities indicated), which have been observed in the Study (interview survey).
3. Right columns are divided to four (4) types of Business Unit. Marketing activity applicable to each Business Unit is marked with the symbol "O" in the corresponding column.
4. Actual examples of activities are described in detail for each Kabupaten in Appendix C.

Business Unit Type A: Local Production (Processing) and Local Marketing

Business Unit Type B: Partnership between Kelompok Tani and Local Processing Industry

Business Unit Type C: Partnership between Kelompok Tani and Private Sector (Marketing)

Business Unit Type D: Business Expansion for Wide Areas

Marketing Activities to be Conducted	Actual Examples of Activities observed in the Basic Research Survey	Applicable Type of Business Unit			
		A	B	C	D
1. Activities for finding Customers' Requirement					
1-1 Market Research (for demand & supply, price, market needs, etc.)					
1-1-1 Small-scale Inquiry Survey (targeting relatives, neighbors, Desa & Kecamatan consumers, acquaintance, private friends, business friends; by means of phone/ visit/ mail)	Kec. Geban, Kab. Cirebon (Duck Fresh Eggs), Kota Cirebon (Salted Eggs), Kec. Cigandamekan, Kab. Kuningan (Sweet Potato)	○			
1-1-2 Medium-scale Inquiry Survey (targeting different categories of consumers within and outside the kabupaten, for wide area)				○	○
1-1-3 Large-scale Inquiry Survey (outsourcing (market research company), targeting different categories of consumers for wide areas)				○	○
1-1-4 Buying behavior survey at pasar, supermarkets, etc.		○		○	○
1-2 Establish own antenna shops (fixed or mobile type) at appropriate points				○	○
1-3 Participation in local events (display, sample tasting, etc.)	Kec. Mojosari, Kab. Mojokerto (Salted Eggs) / Kec. Pacet, Kab. Mojokerto (Sweet Potato)	○		○	○
1-4 Production areas survey for hinting of product development	Kab. Serawang (Processed Rice) / Kec. Banyakan, Kab. Kediri (Processed Mango)	○		○	○
1-5 Collect relevant information from newspapers, magazines, internet		○	○	○	○
1-6 Group meetings (to be held periodically and as required, for market information and improvement/ development of product)		○	○	○	○

Table 4.2.1 Marketing Activities applicable to each Type of Business Unit

Marketing Activities to be Conducted	Actual Examples of Activities observed in the Basic Research Survey	Applicable Type of Business Unit			
		A	B	C	D
2. Activities for Creation and Development of Customers					
2-1 Search for buyers or business partners through various channels (visit target areas, acquaintance, friends, exhibitions, business partners, trade organizations, local government organizations like DINAS, etc.)	Kec.kapetakan, Kab.Cirebon (Salted Eggs) / Kec. Losari, Kab. Cirebon (DOD) / Kab. Indramayu (Salted Eggs) / Kec. Cigandamekan, Kab. Kuningan (Sweet Potato) / Kec. Mojosari, Kab. Majalengka (DOD) / Kec. Bangsal, Kab. Majalengka (Duck Fresh Eggs) / Kec. Banyakan, Kab. Kediri (Mango) / Kec. Banyakan, Kab. Kediri (Mango Processing) / Kec. Tarokan, Kab. Kediri (Mango)		○	○	○
2-2 Sales promotion by bringing sample product in retailers	Kota Cirebon (Salted Eggs)	○		○	○
2-3 Sales campaign in various way (product exhibition, bargain sale, privilege giving sale, etc.)		○		○	○
2-4 Mouth-to-mouth advertisement through relatives, neighbors, acquaintance, private friends, business friends, individual consumers, etc.	Kec.Cilimus, Kab. Kuningan (Processed Sweet Potato) / Kec. Banyakan, Kab. Kediri (Mango)	○		○	
2-5 Commitment basis marketing (Sell raw materials and buy its processed product)	Kec. Mojosari, Kab. Mojokerto (Duck) / Kec. Pungging, Kab. Mojokerto (Duck)				○
2-6 Establish the website for PR to broad marketing target				○	○
2-7 Advertisement on radio/ TV		○		○	
2-8 Advertisement on newspapers/ magazines/ internet				○	
2-9 Salespersons qualification & incentive system for raising their motivation		○		○	○
2-10 Group meetings (to be held periodically and as required, for narrowing down target areas and customers and approach to create and develop customers)		○	○	○	○
3. Activities for both I and II					
3-1 Establish Kelompok Tani's own shops with attractive design at marketplaces such as pasar		○		○	○
3-2 Door-to-door sales in desa/ kecamatan level	Kec. Cigasong, Kab. Majalengka (Processed Sweet Potato)	○			
3-3 Create and increase solid customers (retailers/ individual consumers)					
3-3-1 Establish solid customers' network for exchange of market information		○		○	○
3-3-2 Order-taking activities ("goyokiki") for solid customers	Kec. Cigasong, Kab. Majalengka (Processed Sweet Potato)	○		○	○
3-4 Test-marketing at supermarkets, etc. (by consignment & space rental, etc.)	Kec. Bangsal, Kab. Mojokerto (Salted Eggs)	○		○	○
3-5 Participate in relevant training programs and put it in practice	Kab. Kediri (Mango Processing)	○	○	○	○

Table 5.1.1 Summary of Improvement Plan for Selected Kelompok Tani (1/5)

West Jawa Province

Kabupaten	Kelompok Tani	Member	Back ground	Approach/Purpose	Necessity and Importance of the Project	Project Component (a. Input)	Project Component (b. Activity/ Marketing)	Benefit and Effect of the Project
Cirebon	Sigranala Indah	7 nos. Men 6 Women 1	Due to current increase of gasoline price, many of the farmers gave up duck feeding. No saving & loan is observed. They need financial supports.	Current 7 members are the initial targets for the development of KT. Consultants/BDS/NGO will be introduced for the strengthening the capability. This is a kind of KT revitalization model.	To meet GOI policy. Revitalization model for the small-scale farmers business.	Soft loan amounting 86 Million for the investment. BDS by grant. Governmental various supports.	To purchase 100 pullets for each members totaling 700 tails and 70 male ducks. To invest facilities such as cages, water supply, fence and feed mixing machine.	To strengthen small-scale farmers business. To improve effectiveness on marketing for duck commodity. The management will be improved through BDS.
	Bebek Jaya	37 nos. Men 20 Women 0	Partnership agreement (MOU) was made among Tigan Mekar, Bebek Jaya, Sari Sejahtera and Branjangan Putih. Due to lack of capital, KT cannot expand the business scale. The group is national No. 1 Kelompok Tani (duck) in 2002.	Using soft loan, they enlarge the current business scale. New technologies such as electrical heat and humidity controller or semi-automatic hatchery will be introduced together with technical supports. Consultants/BDS/NGO will be introduced for the strengthening the capability.	To meet GOI policy. To disseminate new technology.	Soft loan amounting 427 Million for the investment. One set of semi-automatic hatchery under pilot project (grant) BDS by grant. Governmental various supports.	To purchase 100 pullets for each members totaling 3,700 tails and 400 male ducks. To invest facilities such as cages, water supply, fence and feed mixing machine.	To strengthen small-scale farmers business. To introduce modern technologies for better profitability. To improve effectiveness on marketing for duck commodity. The research development by Institutes (BPTP, IPB, etc.) will contribute farmers' income. The management will be improved through BDS.
	Tigan Mekar	36 nos. Men 33 Women 3	This KT is famous DOD supplier in Kabupaten. Demand for DOD is high but supply of fertile egg is limited. KT wants to produce fertile eggs for DOD production. Due to lack of capital, KT cannot expand the business scale.	Using soft loan, they enlarge the current business scale. New technologies such as electrical heat and humidity controller or semi-automatic hatchery will be introduced together with technical supports. Consultants/BDS/NGO will be introduced for the strengthening the capability.	To meet GOI policy. To disseminate new technology.	Soft loan amounting 523 Million for the investment. One set of semi-automatic hatchery under pilot project (grant) BDS by grant. Governmental various supports.	To purchase 5,000 pullets and 500 tails of male ducks for fertile egg production. To invest facilities such as cages, water supply, fence and feed mixing machine.	To strengthen small-scale farmers business. To introduce modern technologies for better profitability. To improve effectiveness on marketing for duck commodity. The research development by Institutes (BPTP, IPB, etc.) will contribute farmers' income. The management will be improved through BDS.
Majalengka	Mitra Binangkit	37 nos. Men 0 Women 37	The group was originally established by merging five farmers' group as a federation. Out of five, two groups are still active as processing sub-group. Due to lack of capital, they cannot expand the business scale. The group received credit through P4K.	Using soft loan, they can enlarge the current business scale. Consultants/BDS/NGO will be introduced for the strengthening the capability.	To meet GOI policy. To extend similar projects to other KT's.	Soft loan amounting 43 Million for the investment. BDS by grant. Governmental various supports.	To purchase facilities such as engine driven milling machine, kerosene burner, moulding for kerames, gas cooker and gas cylinder.	Local produces are processed locally and consumed locally for the income generation. The small-scale food processing for income generation will be strengthened and be expanded to other KT's. The management will be improved through BDS.

Table 5.1.1 Summary of Improvement Plan for Selected Kelompok Tani (2/5)

Kabupaten	Kelompok Tani	Member	Back ground	Approach/Purpose	Necessity and Importance of the Project	Project Component (a. Input)	Project Component (b. Activity/ Marketing)	Benefit and Effect of the Project
	Defima II	16 nos. Men 5 Women 11	Market is limited, only at Talaga market located 5 km from the village. KT sells 20 sacks of processed product everyday. Due to lack of capital, they cannot expand the business scale. Group is supported under P4K.	Using soft loan, they can enlarge the current business scale. Consultants/BDS/NGO will be introduced for the strengthening the capability.	<p>➤ To meet GOI policy.</p> <p>➤ To extend similar projects to other KT's.</p>	<p>➤ Soft loan amounting 43 Million for the investment.</p> <p>➤ BDS by grant.</p> <p>➤ Governmental various supports.</p>	<p>➤ To purchase facilities such as large cooking pan, kerosene stove, To purchase motorcycle for transportation of raw materials and products.</p>	<p>Local produces are processed locally and consumed for the income generation. The small-scale food processing for income generation will be strengthened and be expanded to other KT's. The management will be improved through BDS.</p>
Kuningan	Andayarasa	25 nos. Men 20 Women 5	Group is well formalized. Presently, they are focusing on production. Saving & Loan is currently carried out. Farm-gate prices of sweet potato fluctuate from 400 - 1,000 Rp/kg. Farmers have no choice but to sell fresh one to collectors at their rates. Group purchase waste from Gali Esetika to prepare fish feed for 20 m x 21 m of land is available for the sweet potato drying business.	<p>➤ Selling pre-processed product such as dried sweet potato chips to nearby factory will be effective strategy to increase income of the group.</p> <p>➤ Using soft loan, they can start value addition activity.</p> <p>➤ New technologies such as Solar Dryer will be introduced.</p> <p>➤ Consultants/BDS/NGO will be introduced for the strengthening the capability.</p>	<p>➤ To meet GOI policy to develop food processing by small-scale farmers for income generation.</p> <p>➤ To disseminate such new approach to other KT's and other produces.</p>	<p>➤ Soft loan amounting 190 Million for the investment.</p> <p>➤ Technical assistance by IPB, BPTP Bogor for the solar dryer under grant scheme.</p> <p>➤ BDS by grant.</p> <p>➤ Governmental various supports.</p>	<p>➤ To invest drying facility such as Solar Dryers, Working Storage, Slicing machines, Moisture Meter, Table Scale, etc.</p> <p>➤ To enter into long term agreement for the supply of dried chips with sweet potato flourmill company such as PT Global Agro-Indi. This agreement covers purchase price, specification, quantity, time of delivery and etc.</p>	<p>Value addition for farmers by primary processing will be materialized. The research development by Institutes (BPTP, IPB, etc.) will contribute farmers' income. The value addition activities by KT Andayarasa will be disseminated to other KT's. This type value addition through primary processing will be expanded to other produces.</p>
	Bina Karya	20 nos. Men 19 Women 1	Sauce production (<i>Sambal</i>) using sweet potato is a unique activity by KT Bina Karya. Due to limited facility currently they are using, the production capacity is limited. The price of the sauce produced by KT is comparatively lower than the products by larger manufacturers. The group activities as KT are limited they need business development services from outside for the brisk group activity.	<p>➤ Expansion or stabilization of sauce production is required.</p> <p>➤ Using soft loan, they can enlarge current activity.</p> <p>➤ Consultants/BDS/NGO will be introduced for the strengthening the capability.</p>	<p>➤ To meet GOI policy to develop food processing by small-scale farmers for income generation.</p>	<p>➤ Soft loan amounting 55 Million for the investment.</p> <p>➤ BDS by grant.</p> <p>➤ Governmental various supports.</p>	<p>➤ To purchase facilities such as Cooking Drum, Stove, Plastic Basin, Chiller and Blending equipment.</p> <p>➤ To rehabilitate existing storage, kitchen and work-yard.</p>	<p>Local produces are processed locally and consumed for the income generation. The small-scale food processing for income generation will be strengthened. The management will be improved through BDS.</p>

Table 5.1.1 Summary of Improvement Plan for Selected Kelompok Tani (3/5)

Kabupaten	Kelompok Tani	Member	Back ground	Approach/Purpose	Necessity and Importance of the Project	Project Component (a. Input)	Project Component (b. Activity/ Marketing)	Benefit and Effect of the Project
	Lingga Sari II	20 nos. Men 0 Women 0	<p>▶ The product by this group includes ice cream and dodol are unique in Kabupaten. Products are frequently presented in the exhibition, however market is still limited.</p> <p>▶ Currently, processed product is sold on order basis.</p> <p>▶ Difficulty of marketing development is most serious constraints for the group.</p> <p>▶ The group activities as KT are limited they need business development service from outside for the brisk group activity.</p>	<p>▶ Consultants/BDS/NGO will be introduced for the strengthening the capability especially for the marketing activity.</p> <p>▶ Using soft loan, they can enlarge current activity.</p>	<p>▶ To meet GOI policy to develop food processing by small-scale farmers for income generation.</p>	<p>▶ Soft loan amounting 20 Million for the investment.</p> <p>▶ BDS by grant.</p> <p>▶ Governmental various supports.</p>	<p>▶ To purchase facilities such as Freezers, Ice boxes, Blender, Mixer and Motorcycle.</p> <p>▶ To rehabilitate existing storage, kitchen and work-yard.</p>	<p>▶ Local produces are processed locally and consumed locally for the income generation.</p> <p>▶ The small-scale food processing for income generation will be strengthened.</p> <p>▶ The management will be improved through BDS.</p>

Table 5.1.1 Summary of Improvement Plan for Selected Kelompok Tani (4/5)

East Jawa Province

Kabupaten	Kelompok Tani	Member	Back ground	Approach/Purpose	Necessity and Importance of the Project	Project Component (a. Input)	Project Component (b. Activity/ Marketing)	Benefit and Effect of the Project
Kediri	Makmur Jaya	105 nos. Men 75 Women 30	<p>Farm-gate prices of mango sharply drop during peak season of harvest.</p> <p>Dry mango processing is just started by one KT in 2006 under pilot project by NGO, KT received soft loan from P4K program.</p>	<p>Dried mango chips production will start under pilot basis.</p> <p>Institutions will provide technical supports to KT.</p> <p>Consultants/BDS/NGO will assist this new business.</p>	<p>To meet GOI policy.</p> <p>To extend similar projects to other KTs.</p>	<p>Soft loan amounting 40 Million for the investment.</p> <p>Subsidy amounting 160 Million for the facility as a pilot project.</p> <p>BDS by grant.</p> <p>Governmental various supports.</p>	<p>To purchase facilities such as fruit dryer, packaging machine, washing/peeling equipment.</p> <p>To renovate existing warehouse for the working yard.</p> <p>In off-season of mango, other fruit drying and marketing using the facility will be carried out.</p> <p>The 3rd party who will enter into an agreement with KT will conduct marketing or KT will enter into MOU with the NGO as an outside supplier of dried mango.</p>	<p>Value addition to farmers by processing perishable product such as mango will be materialized.</p> <p>The research development by Institutes (BPTP, IPB, etc.) will contribute farmers' income.</p> <p>The value addition activities by KT will be disseminated to other KTs.</p> <p>This type processing activity should be developed for other produces.</p> <p>New marketing approach will succeed.</p>
	Budidaya	160 nos. Men 90 Women 70 <i>Wanita tani</i> Women 20	<p>Vacuum flyer for mango was provided by DINAS in 2005 however, it is not currently in use due to shortage of power supply.</p> <p>One KT in Kediri started pineapple juice processing successfully with technical supports from institutes in Malang.</p> <p>Support from DINAS has been insufficient until now due to KT's physical location.</p>	<p>Mango juices/ Jelly and Puree production will start under pilot basis.</p> <p>Institutions will provide technical supports to KT.</p> <p>Consultants/BDS/NGO will assist this new business.</p>	<p>To meet GOI policy.</p> <p>To extend similar projects to other KTs.</p>	<p>Soft loan amounting 40 Million for the investment.</p> <p>Subsidy amounting 160 Million for he facility as a pilot project.</p> <p>BDS by grant.</p> <p>Governmental various supports.</p>	<p>To purchase facilities such as fruit pulping, pasteurizing, packaging machine, washing/peeling equipment</p> <p>To renovate existing warehouse for the working yard.</p> <p>In off-season of mango, other fruit processing and marketing using the facility will be carried out.</p> <p>The 3rd party who will enter into an agreement with KT will conduct marketing.</p>	<p>Value addition to farmers by processing perishable product such as mango will be materialized.</p> <p>The research development by Institutes (BPTP, IPB, etc.) will contribute farmers' income.</p> <p>The value addition activities by KT will be disseminated to other KTs.</p> <p>This type processing activity should be developed for other produces.</p> <p>New marketing approach will succeed.</p>
Mojoekerto	Karya Tani	11 nos. Men 10 Women 1	<p>KT has 18,300 ducks by 11 members.</p> <p>Main product is young duck meat supply in addition to salty egg of infertile.</p> <p>Due to lack of capital they cannot expand their business scale though the market demand is stable and expanding.</p>	<p>Using soft loan, they can enlarge the current business scale.</p> <p>Consultants/BDS/NGO will be introduced for the strengthening the capability.</p>	<p>To meet GOI policy.</p> <p>This KT is a candidate of the triangle scheme.</p>	<p>Soft loan amounting 285 Million for the investment in addition to the contribution of 15 Million.</p> <p>BDS by grant.</p> <p>Governmental various supports.</p>	<p>To purchase 30,000 tails of DOD for meat production and 2,500 layer ducks for egg production.</p> <p>To invest facilities such as hatchery, cages, water supply, fence and feed mixing machine.</p>	<p>To strengthen small-scale farmers business.</p> <p>To improve effectiveness on marketing for duck commodity.</p> <p>The management will be improved through BDS.</p>

Table 5.1.1 Summary of Improvement Plan for Selected Kelompok Tani (5/5)

Kabupaten	Kelompok Tani	Member	Back ground	Approach/Purpose	Necessity and Importance of the Project	Project Component (a. Input)	Project Component (b. Activity/Marketing)	Benefit and Effect of the Project
	Tani Mulyo	28 nos. Men 5 Women 23	Duck business was originally started using grant from DINAS. However, many members quit membership due to its low profitability.	<p>Current 28 members are the initial targets for the development of KT.</p> <p>Consultants/BDS/NGO will be introduced for the strengthening the capability.</p> <p>This is a kind of KT revitalization model.</p>	<p>To meet GOI policy. Revitalization model for the small-scale farmers business.</p>	<p>Soft loan amounting 275 Million for the investment. BDS by grant.</p> <p>Governmental various supports.</p>	<p>To purchase 100 pullets for each members totaling 2,800 tails and 300 male ducks.</p> <p>To invest facilities such as cages, water supply, fence and feed mixing machine.</p>	<p>To strengthen small-scale farmers business.</p> <p>To improve effectiveness on marketing for duck commodity. The management will be improved through BDS.</p>
	Lestari Sejahtera	47 nos. Men 0 Women 47	This KT is a famous and a leading group of duck business in Kabupaten. This KT can be a core member of the triangle scheme in Mojokerto.	<p>Continuing and expanding current duck business.</p> <p>New technologies such as electrical heat and humidity controller or semi-automatic hatchery will be introduced together with technical supports. Consultants/BDS/NGO will be introduced for the strengthening the capability.</p>	<p>To meet GOI policy. To disseminate new technology.</p>	<p>Two sets of semi-automatic hatchery under pilot project (grant) BDS by grant. Governmental various supports.</p>	<p>Trial operation of semi-automatic hatchery under pilot project (grant).</p>	<p>To strengthen small-scale farmers business.</p> <p>To introduce modern technologies for better profitability. The research development by BPTP, IPB will contribute farmers' income.</p>

Table 5.1.2 Classification of Business Model in Processing and Marketing

Kabupaten: Commodity	Features and Improvement Direction	Business Model
Kab. Cirebon: Duck		
1. Sigranala Indah	<ul style="list-style-type: none"> - Duck activities declined due to hike of input price, and remained by limited members. - Reviving duck business after strengthening of group discipline 	Model for expansion of business scale and strengthen of duck industry
2. Bebek Jaya 3. Tigan Mekar	<ul style="list-style-type: none"> - Strengthening of existing triangle system through increased supply of fertile eggs and DOD to support duck industry - Introduction of new technologies (semi-automatic hatchery, etc.) available domestically to improve technical level for DOD production 	Model for expansion of business scale and renewal of technologies in duck Business
Kab. Majalengka: Sweet Potatoes		
4. Mitra Binagkit 5. Delima II	<ul style="list-style-type: none"> - Higher group discipline through group formation under P4K program (Delima II) - Increase of products and improvement of marketing activities through applying locally available technology for food processing (Local Processing and Local Marketing) 	Model for cottage level food processing and marketing of sweet potatoes (unique products)
Kab. Kuningan: Sweet Potatoes		
6. Andayarasa	<ul style="list-style-type: none"> - Well formalized, mainly focusing on sweet potato production - Sweet potato flour mill located nearby and ready to procure sweet potato dried chip as raw material 	Model for primary processing and marketing of sweet potatoes
7. Bina Karya 8. Lingga Sari II	<ul style="list-style-type: none"> - Limited activities as Kelompok Tani and require group discipline - Unique products (Bina Karya: sauce, Lingga Sari II: ice cream) by cottage level food processing - Improvement of products and marketing using locally available technology for food processing after strengthening of group discipline (Local Processing and Local Marketing) 	Model for cottage level food processing and marketing of sweet potatoes (traditional products with group strengthening)
Kab. Kediri: Mango		
9. Makmur Jaya 10. Budi Daya	<ul style="list-style-type: none"> - Well formalized, better group discipline through group formation under P4K program - Technical and marketing support required for mango processing - Challenge for new fruits processing technologies available in local institutions 	Model for fruit processing and marketing with 3 rd Parties
Kab. Mojokerto: Duck		
11. Karya Tani	<ul style="list-style-type: none"> - Increase and stabilization of supply of young duck meat and salty eggs, to form - Higher group discipline and no support from public so far. 	Model for expansion of business scale and strengthen of duck industry
12. Tani Mulyo	<ul style="list-style-type: none"> - Low sustainability of existing duck business and low support from the community - Reviving duck business after obtaining proper support from the community 	Model for revival and new comer in the duck business after group strengthening
13. Lestari Sejahtera	<ul style="list-style-type: none"> - Duck business and group discipline developed through past public support, and high level of business - Increase of supply of DOD and pullet for support other duck farmers - Introduction of new technologies (semi-automatic hatchery, etc.) available domestically to improve technical level for DOD production 	Trial of new hatchery technology (expected involvement for establishment of duck triangle system)

Table 5.1.3 Summary of Finance Improvement Direction for Selected Kelompok Tani (1/4)

West Jawa Province

Kabupaten	Kelompok Tani	Member	Back ground	Approach	Necessity and Importance of the Project	Project Component (a. Input)	Project Component (b. Activity Steps)	Benefit and Effect of the Project
Cirebon	Sigramala Indah	7 nos. Men 6 Women 1	<p>Leader and his family dominate the group. Members dependence on the leader observed</p> <p>Only leader borrows money from BRI and buying hatchery machine, which is the base of group production activity</p> <p>Group members' financial experience is with non-bank (pawnshop, traders, and artisan) and less savings. No group savings and loan activity</p>	<p>Approach 1: <i>Processing and Marketing Model</i></p> <p>1-1: Improve financial awareness and discipline of members through group savings and loan activity.</p> <p>1-2: Improve duck production technology of members</p> <p>Approach 2: <i>Establishing Community-based MFI Model</i></p> <p>For the members to have accessible finance, establish membership organization which provides savings and loan services.</p> <p>For the members to be more independent mind, establish MFI outside KT but in the community</p>	<p>Improve financial discipline</p> <p>Increase self-reliance of duck agribusiness</p> <p>Each member becomes more self-reliant and confident</p>	<p>Approach 1</p> <p>As a component of <i>Processing and Marketing Model</i></p> <p>Approach 2</p> <p>Establishing Community MFI Model</p> <p>Soft loan for working capital support</p> <p>Monitoring & guidance by BDS</p> <p>Various support by the government</p>	<p>Approach 1</p> <p>To introduce group savings and loan activity</p> <p>Approach 2</p> <p>(1) To mobilize community and raise fund for embryo MFI</p> <p>(2) To form an embryo MFI</p> <p>(3) Training and apprenticeship</p> <p>(4) Monitoring and Guidance</p> <p>(5) Support towards formalization</p>	<p>Financial awareness and disciplines instilled into the members</p> <p>Self reliance and business mindset of the members strengthened</p> <p>Community provided with the accessible financial service</p> <p>The capacity of KT and the management of MFI improved</p> <p>Asset of individuals and MFI built</p>
Bebek Jaya		37 nos. Men 20 Women 0	<p>KT is a member of Syariah KSP. Al Qomariah, where members save and borrow</p> <p>Excellent group activity, record of duck productivity and income, business plan kept</p> <p>Members feel money they can borrow now is not enough for improving duck production. Government program recipient</p>	<p>Approach 1: <i>Processing and Marketing Model</i></p> <p>Improve duck business to be more profitable</p> <p>Increase members' income (and asset) to be more financially viable, so that (i) more investment shall come from own funding, (ii) more asset to be rendered as collateral for institutional loan</p> <p>Approach 2: <i>Strengthening Existing Cooperative</i></p> <p>Intervene in Syariah KSP to increase loan amount for duck farmers</p>	<p>Improve profitability of duck agribusiness</p> <p>Increase self-reliance of farmers</p> <p>Graduate from government assistance</p> <p>Increase loan for duck farmers through Syariah KSP</p>	<p>Approach 1</p> <p>As a component of <i>Processing and Marketing Model</i></p> <p>Approach 2</p> <p>Strengthening Existing Cooperative Model</p> <p>Soft loan for working capital support</p> <p>Monitoring & guidance by BDS</p> <p>Various support by the government</p>	<p>Approach 1</p> <p>Initial deposit or frozen savings by members as a condition to join the model</p> <p>Approach 2</p> <p>Awareness raising and training of Syariah KSP</p>	<p>Self-reliance and business mindset of the members strengthened</p> <p>MFI in the community, which already finances farmers' agribusiness, strengthened</p> <p>Asset of individuals and MFI built</p>
Tigan Mekar		36 nos. Men 33 Women 3	<p>KT formed a multi-purpose duck cooperative, where they have savings and loan activity from BRI</p> <p>The duck cooperative has incorporated 5 KTIs and traders, and has since focused on marketing</p> <p>Members want more capital to increase number of ducks</p>	<p>Approach 1: <i>Processing and Marketing Model</i></p> <p>Improve duck business to be more profitable</p> <p>Increase members' income (and asset) to be more financially viable, so that (i) more investment shall come from own funding, (ii) more asset to be rendered as collateral for institutional loan</p> <p>Approach 2: <i>Strengthening Existing Cooperative Model</i></p> <p>Strengthen the role of savings and loan activity</p> <p>Expand the membership</p> <p>Strengthen the linkage with banks</p>	<p>Improve profitability of duck agribusiness</p> <p>Increase self-reliance of farmers</p> <p>Graduate from government assistance</p>	<p>Approach 1</p> <p>As a component of <i>Processing and Marketing Model</i></p> <p>Approach 2</p> <p>Strengthening Existing Cooperative Model</p> <p>Soft loan for working capital support</p> <p>Monitoring & guidance by BDS</p> <p>Various support by the government</p>	<p>Approach 1</p> <p>Initial deposit or frozen savings by members as a condition to join the model</p> <p>Approach 2</p> <p>Building asset</p> <p>Guidance and training</p>	<p>Self-reliance through the services of duck cooperative achieved</p> <p>Asset of individuals and MFI built</p>

Table 5.1.3 Summary of Finance Improvement Direction for Selected Kelompok Tani (2/4)

Kabupaten	Kelompok Tani	Member	Back ground	Approach	Necessity and Importance of the Project	Project Component (a. Input)	Project Component (b. Activity Steps)	Benefit and Effect of the Project
Majalengka	Mitra Binangkit II	37 nos. Men 0 Women 37	<p>KT used to be a P4K KPK, which was a part of KPK Gabungan. All of them had NPL and it was written off by BRI.</p> <p>KT has savings and loan activity</p> <p>Leader (also Head of <i>Dusun</i>) dominates the group</p> <p>Leader uses BPR.</p>	<p>Approach 1: <i>Processing and Marketing Model</i></p> <p>➤ Improve sweet potato processing business to be more profitable</p> <p>Approach 2: Establishing Community-based MFI Model</p> <p>➤ For the members to have accessible finances, establish membership organization which provides savings and loan services.</p> <p>➤ For the members to be more independent mind, establish MFI outside KT but in the community</p> <p>➤ To eliminate the leader's domination, third party intervention is required to set up the community MFI</p>	<p>➤ Improve financial discipline</p> <p>➤ Improve profitability of agribusiness</p> <p>➤ Each member becomes more self-reliant and confident</p> <p>➤ Dilute the control of the current leader in the activity</p>	<p>Approach 1</p> <p>➤ As a component of <i>Processing and Marketing Model</i></p> <p>Approach 2</p> <p>➤ Establishing Community MFI Model</p> <p>➤ Soft loan for working capital support</p> <p>➤ Monitoring & guidance by BDS</p> <p>➤ Various support by the government</p>	<p>Approach 1</p> <p>➤ To introduce group savings and loan activity</p> <p>Approach 2</p> <p>➤ To have third party to facilitate the whole process to dilute the influence of the leader as Kepala Dusun</p> <p>➤ To mobilize community and raise fund for embryo MFI</p> <p>➤ To form an embryo MFI</p> <p>➤ Training and apprenticeship</p> <p>➤ Monitoring and Guidance</p> <p>➤ Support towards formalization</p>	<p>➤ Financial awareness and discipline into the members instilled</p> <p>➤ Self reliance and business mindset of the members strengthened</p> <p>➤ Community is provided with the accessible financial service</p> <p>➤ Bad influence of the leader on the improvement process of agribusiness and finance is eliminated</p> <p>➤ Asset of individuals and MFI built</p>
Delima II		16 nos. Men 5 Women 11	<p>KT is a P4K KPK, and has a good leadership and team work</p> <p>KT members conduct <i>arisan</i></p> <p>The community has difficult access to the nearest bank (access road is not good)</p>	<p>Approach 1: <i>Processing and Marketing Model</i></p> <p>➤ Improve sweet potato processing business to be more profitable</p> <p>Approach 2: Establishing Own MFI Model</p> <p>➤ For the members to have accessible finance, grow KT, involving other community members, and develop to MFI</p>	<p>➤ Improve profitability of agribusiness</p> <p>➤ Establish accessible financial service in the community.</p>	<p>Approach 1</p> <p>➤ As a component of <i>Processing and Marketing Model</i></p> <p>Approach 2</p> <p>➤ Establishing Own MFI Model</p> <p>➤ Soft loan for working capital support</p> <p>➤ Monitoring & guidance by BDS</p> <p>➤ Various support by the government</p>	<p>Approach 1</p> <p>➤ To increase group asset</p> <p>Approach 2</p> <p>➤ To mobilize other groups and community members and raise fund for embryo MFI</p> <p>➤ To form an embryo MFI</p> <p>➤ Training and apprenticeship</p> <p>➤ Monitoring and Guidance</p> <p>➤ Support towards formalization</p>	<p>➤ Community is provided with the accessible financial service</p> <p>➤ The MFI to be the base for economic activity promotion in the area</p> <p>➤ Asset of individuals and MFI is built</p>
Kuningan	Andayarasa	25 nos. Men 20 Women 5	<p>Good leadership and group discipline</p> <p>Savings & Loan is currently carried out.</p> <p>Weak bargaining power against traders</p> <p>Land share-cropping</p>	<p>Approach 1: <i>Processing and Marketing Model</i></p> <p>➤ Improve sweet potato processing business to be more profitable</p> <p>Approach 2: Establishing Own MFI Model</p> <p>➤ For the members to have accessible finance, grow KT to MFI with traders, other community members, and develop MFI. MFI can have agribusiness supporting service</p>	<p>➤ Improve profitability of agribusiness</p> <p>➤ Establish accessible financial services in the community</p> <p>➤ Change the power relation with traders</p>	<p>Approach 1</p> <p>➤ As a component of <i>Processing and Marketing Model</i></p> <p>Approach 2</p> <p>➤ Establishing Own MFI Model</p> <p>➤ Soft loan for working capital support</p> <p>➤ Monitoring & guidance by BDS</p> <p>➤ Various support by the government</p>	<p>Approach 1</p> <p>➤ To increase group asset</p> <p>Approach 2</p> <p>➤ To mobilize other groups and community members and raise fund for embryo MFI</p> <p>➤ To form an embryo MFI</p> <p>➤ Training and apprenticeship</p> <p>➤ Monitoring and Guidance</p> <p>➤ Support towards formalization</p>	<p>➤ Community is provided with the accessible financial service</p> <p>➤ The MFI to also work as agribusiness supporting provider</p> <p>➤ Bargaining power of farmers increased</p> <p>➤ Asset of individuals and MFI is built</p>
Bina Karya		20 nos. Men 19 Women 1	<p>KT is rather like a company, where the leader is a president and other members are employee. A disguised group.</p> <p>No group savings and loan activity</p> <p>Leader borrows from commercial banks</p> <p>Land share-cropping</p>	<p>Approach 1: <i>Processing and Marketing Model</i></p> <p>➤ Improve sweet potato processing business to be more profitable</p> <p>Approach 2: Establishing a company</p> <p>➤ To formalize KT by company registration</p>	<p>➤ Improve profitability of agribusiness</p> <p>➤ Have access to bank service by formalization</p>	<p>Approach 1</p> <p>➤ As a component of <i>Processing and Marketing Model</i></p> <p>or</p> <p>Approach 2</p> <p>➤ Establishing a Company</p> <p>➤ Soft loan for working capital support after registration</p> <p>➤ Monitoring & guidance by BDS</p> <p>➤ Various support by the government</p>	<p>Approach 1</p> <p>➤ To increase profitability</p> <p>Approach 2</p> <p>➤ To prepare the initial capital</p> <p>➤ Training and apprenticeship</p> <p>➤ To register it as a company</p> <p>➤ Monitoring and Guidance</p>	<p>➤ The self-reliant and profitable agribusiness model is embodied</p> <p>➤ Asset of individuals and a company is built</p>

Table 5.1.3 Summary of Finance Improvement Direction for Selected Kelompok Tani (3/4)

Kabupaten	Kelompok Tani	Member	Back ground	Approach	Necessity and Importance of the Project	Project Component (a. Input)	Project Component (b. Activity Steps)	Benefit and Effect of the Project
	Lingga Sari II	20 nos. Men 20 Women 0	Limited activity as a group. No regular meetings held, and savings and loan not observed clearly. Traders' finance observed Land share-cropping	<p>Approach 1: <i>Processing and Marketing Model</i></p> <ul style="list-style-type: none"> 1-1: Improve financial awareness and discipline of members through group savings and loan activity. 1-2: Improve sweet potato processing agribusiness technology and marketing of members <p>Approach 2: Establishing Community MFI Model</p> <ul style="list-style-type: none"> For the members to have accessible finance, establish membership organization which provides savings and loan services. For the members to be more independent mind, establish MFI outside KT but in the community KT to maintain agribusiness marketing base. 	<ul style="list-style-type: none"> Improve financial discipline Improve profitability of agribusiness Each member becomes more self-reliant and confident 	<p>Approach 1</p> <ul style="list-style-type: none"> As a component of <i>Processing and Marketing Model</i> <p>Approach 2</p> <ul style="list-style-type: none"> Establishing Community MFI Model Soft loan for working capital support Monitoring & guidance by BDS Various support by the government 	<p>Approach 1</p> <ul style="list-style-type: none"> To introduce group savings and loan activity <p>Approach 2</p> <ul style="list-style-type: none"> To mobilize community and raise fund for embryo MFI To form an embryo MFI Training and apprenticeship Monitoring and Guidance towards formalization 	<ul style="list-style-type: none"> Financial awareness and discipline into the members instilled Self reliance and business mindset of the members strengthened Community provided with the accessible financial service The capacity of KT and the management of MFI improved Asset of individuals and MFI built
East Java Province								
Kabupaten	Kelompok Tani	Member	Back ground	Approach	Necessity and Importance of the Project	Project Component (a. Input)	Project Component (b. Activity Steps)	Benefit and Effect of the Project
Kediri	Makmur Jaya	105 nos. Men 75 Women 30	Leader (Head of Dusun) is a mango producer, but also acts as a trader. 45 members form P4K. KPK Other than P4K, no group savings and loan activity Leader uses various financial institutions (banks and cooperatives) Some members use BPR, others rely on traders finance (before harvest), pawnshop, and <i>waring</i> . Some members formed P4K KPK. KT has an inactive (but once registered) cooperative which is a main section for savings and loan activity KT has a women's group which has <i>arisan</i> KT members duplicate Forestry Farmers Group members, which has savings and loan activity Physical access to banks is difficult Farmers more worried about mango price fluctuation than lack of finance	<p>Approach 1: <i>Processing and Marketing Model</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Improve duck business to be more profitable <p>Approach 2: Establishing Own MFI Model</p> <ul style="list-style-type: none"> For the members to have accessible finance, grow KT to MFI with traders, other community members, and develop MFI. MFI can have agribusiness supporting service <p>Approach 1: <i>Processing and Marketing Model</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Improve mango processing business to be more profitable <p>Approach 2: Establishing Own MFI Model</p> <ul style="list-style-type: none"> For the members to have accessible finance, grow KT to MFI 	<ul style="list-style-type: none"> Improve profitability of agribusiness Establish accessible financial service in the community Change the power relation with traders 	<p>Approach 1</p> <ul style="list-style-type: none"> As a component of <i>Processing and Marketing Model</i> <p>Approach 2</p> <ul style="list-style-type: none"> Establishing Own MFI Model Soft loan for working capital support Monitoring & guidance by BDS Various support by the government <p>Approach 1</p> <ul style="list-style-type: none"> As a component of <i>Processing and Marketing Model</i> <p>Approach 2</p> <ul style="list-style-type: none"> Establishing Own MFI Model through reactivating an existing cooperative Soft loan for working capital support Monitoring & guidance by BDS Various support by the government 	<p>Approach 1</p> <ul style="list-style-type: none"> To increase group asset <p>Approach 2</p> <ul style="list-style-type: none"> To mobilize other groups and community members and raise fund for embryo MFI To form an embryo MFI Training and apprenticeship Monitoring and Guidance towards formalization <p>Approach 1</p> <ul style="list-style-type: none"> To increase group asset <p>Approach 2</p> <ul style="list-style-type: none"> To mobilize other groups and community members and raise fund for activating an existing cooperative Training and apprenticeship Monitoring and Guidance towards formalization 	<ul style="list-style-type: none"> To provide community with the accessible financial service The MFI to also work as agribusiness supporting provider Bargaining power of farmers increased Asset of individuals and MFI built Community provided with the accessible financial service The MFI to be the base for economic activity promotion in the area Asset of individuals and MFI built
Budidayaya		160 nos. Men 90 Women 70 Kelompok Wanita Tani Women 20						

Table 5.1.3 Summary of Finance Improvement Direction for Selected Kelompok Tani (4/4)

Kabupaten	Kelompok Tani	Member	Back ground	Approach	Necessity and Importance of the Project	Project Component (a. Input)	Project Component (b. Activity Steps)	Benefit and Effect of the Project
Mojokerto	Karya Tani	11 nos. Men 10 Women 1	<p>Leader is a duck producer but also acts as a trader</p> <p>Financial access by the leader re-lending bank loan</p> <p>Strong leadership and good group discipline</p> <p>No group savings and loan activity</p> <p>Due to lack of capital they cannot expand their business scale</p>	<p>Approach 1: <i>Processing and Marketing Model</i></p> <p>1-1: Improve financial awareness and discipline of members through group savings and loan activity.</p> <p>1-2: Improve duck production technology of members</p> <p>Approach 2: Establishing Own MFI Model</p> <p>For the members to have accessible finance, grow KT to MFI with traders, together with agribusiness supporting service</p>	<p>Improve profitability of duck agribusiness</p> <p>Establish accessible financial service in the community</p> <p>Each member becomes more self-reliant and confident</p>	<p>Approach 1</p> <p>As a component of <i>Processing and Marketing Model</i></p> <p>Approach 2</p> <p>Establishing Own MFI Model</p> <p>Soft loan for working capital support</p> <p>Monitoring & guidance by BDS</p> <p>Various support by the government towards formalization</p>	<p>Approach 1</p> <p>To introduce group savings and loan activity</p> <p>Approach 2</p> <p>To mobilize other groups and community members and raise fund for embryo MFI</p> <p>To form an embryo MFI</p> <p>Training and apprenticeship</p> <p>Monitoring and Guidance</p> <p>Support towards formalization</p>	<p>Community provided with the accessible financial service</p> <p>The MFI to be the base for economic activity promotion in the area</p> <p>Asset of individuals and MFI built</p>
	Tani Mulyo	28 nos. Men 5 Women 23	<p>Duck business was originally started using grant from DINAS. However, many members quit membership due to its low profitability.</p> <p>Savings and loan not very active</p> <p>Some use commercial banks, some transact with feed traders (bondage), some in <i>arisan</i> circle.</p>	<p>Approach 1: <i>Processing and Marketing Model</i></p> <p>1-1: Improve financial awareness and discipline of members through group savings and loan activity.</p> <p>1-2: Improve duck production technology of members</p> <p>Approach 2: Establishing Own MFI Model</p> <p>For the members to have accessible finance, grow KT to MFI with traders, together with agribusiness supporting service</p>	<p>Improve profitability of duck agribusiness</p> <p>Establish accessible financial service in the community</p>	<p>Approach 1</p> <p>As a component of <i>Processing and Marketing Model</i></p> <p>Approach 2</p> <p>Establishing Own MFI Model</p> <p>Soft loan for working capital support</p> <p>Monitoring & guidance by BDS</p> <p>Various support by the government towards formalization</p>	<p>Approach 1</p> <p>To activate group savings and loan, and agribusiness support function</p> <p>To accumulate asset of KT</p> <p>Approach 2</p> <p>To mobilize other groups and community members and raise fund for embryo MFI</p> <p>To form an embryo MFI</p> <p>Training and apprenticeship</p> <p>Monitoring and Guidance</p> <p>Support towards formalization</p>	<p>To provide community with the accessible financial service</p> <p>The MFI to also work as agribusiness supporting provider</p> <p>Bargaining power of farmers increased</p> <p>Asset of individuals and MFI built</p>
	Lestari Sejahtera	47 nos. Men 0 Women 47	<p>This KT is a famous and a leading group of duck business in Kabupaten.</p> <p>Members used to be a P4K KPK.</p> <p>Good financial discipline, group savings and loan activity</p> <p>Some members use commercial banks as individual</p>	<p>Approach 1: <i>Processing and Marketing Model</i></p> <p>Improve duck business to be more profitable</p> <p>Increase members' income (and asset) to be more financially viable, so that (i) more investment shall come from own funding, (ii) more asset to be rendered as collateral for institutional loan</p> <p>Approach 2: Establishing Own MFI Model</p> <p>Formalize KT as a cooperative</p> <p>For the members to have accessible finance, grow KT to MFI with traders, together with agribusiness supporting service</p>	<p>Improve profitability of agribusiness</p> <p>Have access to bank service by formalization of the organization</p> <p>Establish accessible financial service in the community</p>	<p>Approach 1</p> <p>As a component of <i>Processing and Marketing Model</i></p> <p>or</p> <p>Approach 2</p> <p>Establishing own MFI (register as a multi-purpose cooperative)</p> <p>Soft loan for working capital support</p> <p>Monitoring & guidance by BDS</p> <p>Various support by the government</p>	<p>Approach 1</p> <p>To increase profitability</p> <p>Approach 2</p> <p>To prepare the initial capital</p> <p>Training and apprenticeship</p> <p>To register it as a cooperative</p> <p>Monitoring and Guidance</p>	<p>Self-reliant and profitable agribusiness model embodied</p> <p>Asset of individuals and MFI built</p> <p>To provide community with the accessible financial service</p> <p>The MFI to also work as agribusiness supporting provider</p>

Table 5.1.4 Classification of Business Model in Finance

Kabupaten: Commodity	Features	Improvement Direction	Business Model
Kab. Cirebon: Duck			
1. Sigranala Indah	<ul style="list-style-type: none"> - Financial access by the leader to commercial bank (BRI Unit) - Strong leadership but low self-reliance of members - No savings & loans activities 	<ul style="list-style-type: none"> - Empowering members through group savings and loan - MFI shall be established outside the group but in the community 	Model to establish community-based MFI
2. Bebek Jaya 3. Tigan Mekar	<ul style="list-style-type: none"> - Credit cooperative and credit unit in multi-purpose cooperative available. - High group discipline, savings & loans or arisan by some members - Financial access by some members to commercial bank (BPR, BRI unit) 	<ul style="list-style-type: none"> - Strengthening cooperatives to be more efficient and effective in finance and agribusiness support services. 	Model to strengthen existing cooperatives
Kab. Majalengka: Sweet Potatoes			
4. Mitra Binagkit 2 (majority is female)	<ul style="list-style-type: none"> - Savings & loans, but experience of non-performing loan under P4K program - Dominating by a leader and passive attitude of members 	<ul style="list-style-type: none"> - Empowering group members through activating savings and loan activity - MFI shall be established outside the group but in the community 	Model to establish community-based MFI
5. Delima 2 (majority is female)	<ul style="list-style-type: none"> - Higher group discipline through P4K program - Savings & loan in progress under P4K - Low physical access to banks 	<ul style="list-style-type: none"> - MFI shall be developed from the KT. 	Model to establish own MFI
Kab. Kuningan: Sweet Potatoes			
6. Andayarasa	<ul style="list-style-type: none"> - Savings & loans in progress, well organized group and high group discipline - Savings account for the group is opened under the leader's name, and loan from KUD in yarnen - Weak bargaining power to traders (yarnen) 	<ul style="list-style-type: none"> - Grow KT to MFI with traders and other community members, which may have agribusiness supporting services 	Model to establish own MFI (involving traders, middlemen and collectors)
7. Bina Karya	<ul style="list-style-type: none"> - Financial access by the leader to the commercial bank (Bank Jabar and BRI Unit) - Members working as employees - No savings & loan 	<ul style="list-style-type: none"> - Improve profitability of KT and formalize it by company registration 	Register as business entity, which will enable them to have access to a financial institution
8. Lingga Sari 2	<ul style="list-style-type: none"> - Limited activities as Kelompok Tani and low group discipline - Low level in savings & loans 	<ul style="list-style-type: none"> - Empower members through activating savings and loan activity - MFI shall be established outside the group but in the community 	Model to establish community-based MFI

Table 5.1.4 Classification of Business Model in Finance

Kabupaten: Commodity	Features	Improvement Direction	Business Model
Kab. Kediri: Mango			
9. Makmur Jaya (some females)	<ul style="list-style-type: none"> - Savings & loan in progress by a part of the members who are under P4K program - Financial access by the leader to the credit cooperative, individual loans from BRI Unit & BPR by members - Low physical accessibility to banks 	<ul style="list-style-type: none"> - Grow KT to MFI with traders and other community members, which may have agribusiness supporting services 	Model to establish own MFI
10. Budi Daya (some females)	<ul style="list-style-type: none"> - Savings & loans in progress a part of the members who are under P4K program - Savings & loan sub-group was registered as a cooperative, but not active - Low physical accessibility to banks 	<ul style="list-style-type: none"> - Re-activate the cooperative and develop it into MFI, which may also have agribusiness support services 	Model to establish own MFI (reactivating a cooperative)
Kab. Mojokerto: Duck			
11. Karya Tani	<ul style="list-style-type: none"> - Financial access by the leader to the commercial bank (re-lending to members) - Strong leadership and higher group discipline - No experience in savings & loans - Leader act as a producer and trader 	<ul style="list-style-type: none"> - Grow KT to MFI with traders and other community members, which may have agribusiness supporting services 	Model to establish own MFI
12. Tani Mulyo (majority is female)	<ul style="list-style-type: none"> - Progress in savings & loan and arisan - Bank accounts BRI Unit and BNI by leader and treasurer - Financial bondage by feed traders 	<ul style="list-style-type: none"> - Grow KT to MFI with traders and other community members, which may have agribusiness supporting services 	Model to establish own MFI
13. Lestari Sejahtera (majority is female)	<ul style="list-style-type: none"> - Good performance in financial access (access to BRI Unit and BNI by some members), and P4K experience - Savings & loan in progress 	<ul style="list-style-type: none"> - Formalize KT as a cooperative with traders, which will have both financial and agribusiness services 	Model to establish own MFI (multipurpose cooperative)

Table 5.3.1 Summary of Investment and Profit in Each Project

(Unit: Rp.'000)

Kelompok Tani	Member	Business model	Soft Loan	Grants	Total Project Cost	KT member = Savings Collateral (%)	Total Project including KT contribution	Sales per annum	Net Profits per annum	Net profits ratio	Net Profits per member	Incentive for Members or Capital		Savings Collateral after 5 years
												5 years	per annum	
A			B	C	D=B+C	E	F=D+E	G	H	I=H/G	J=H/A			
West Java														
Cirebon														
* Sigranala Indah	7	Revival and new comer	66,000	58,000	124,000	3,300	127,300	221,000	36,300	16.4%	5,190	4,620	924	4,630
* Bebek Jaya	20	Expansion of business scale & renewal of technologies	450,000	174,000	624,000	22,500	646,500	705,900	84,200	11.9%	4,210	31,500	6,300	31,600
* Tigan Mekar	36	Expansion of business scale & renewal of technologies	550,000	212,000	762,000	27,500	789,500	1,578,800	228,200	14.5%	6,340	38,500	7,700	38,600
Majalengka														
* Mitra Binangkit	30	Cottage level food processing (Traditional products)	45,000	51,500	96,500	2,250	98,750	375,000	117,400	31.3%	3,920	3,150	630	3,160
* Delima II	16	Cottage level food processing (Traditional products)	45,000	51,500	96,500	2,250	98,750	600,000	182,300	30.4%	11,400	3,150	630	3,160
Kuningan														
* Andayarasa	25	Primary Processing & marketing	200,000	153,000	353,000	10,000	363,000	810,000	179,800	22.2%	7,190	14,000	2,800	14,000
* Bina Karya	20	Cottage level food processing (Sambal sauce)	67,000	58,000	125,000	3,350	128,350	360,000	80,000	22.2%	4,000	4,690	938	4,700
* Lingga Sari II	20	Cottage level food processing (Ice Cream, Cake)	43,000	58,000	101,000	2,150	103,150	90,000	24,400	27.1%	1,220	3,010	602	3,020
East Java														
Kediri														
*Makmur Jaya	45	Fruit processing and marketing (Dried mango chips)	40,000	241,000	281,000	2,000	283,000	600,000	90,100	15.0%	2,000	2,800	560	2,810
* Budi daya	30	Fruit processing and marketing (Juice/puree)	40,000	232,000	272,000	2,000	274,000	396,000	93,500	23.6%	3,120	2,800	560	2,810
Mojo kerto														
* Karya Tani	11	Expansion of business scale (Young duck meat)	190,000	60,000	250,000	9,500	259,500	1,035,500	197,500	19.1%	18,000	13,300	2,660	13,300
* Tani Mulyo	28	Revival and new comer	300,000	120,000	420,000	15,000	435,000	797,900	163,900	20.5%	5,850	21,000	4,200	21,000
* Lestari Sejahtera	47	Model for introduction of new technologies	0	200,000	200,000	0	200,000	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	335	Total	2,036,000	1,669,000	3,705,000	101,800	3,806,800	7,570,100	1,477,600	19.5%	-	142,520	28,504	142,790
		per Household	6,078	4,982	11,060	304	11,364	22,597	-	-	4,411	425	85	426

Table 5.5.1 List of Major Operation and Effect Indicators for Model Projects

Operation Indicators

No.	Indicator	Definition	Objective	Source of Data	Monitoring frequency
Organizational Indicators					
O-1	Number of Kelompok Tani members	The number of farmers benefited by the project and who join to (i) a Kelompok Tani and (ii) processing activities	To know status of Kelompok Tani activity and farmers' perception including women's	Baseline survey and data from DINAS	Every year
O-2	Number of Training Program	The number of training program organized for Kelompok Tani	To confirm the activities of supporting agent (DINAS / Extension Workers NGOs / University)	Baseline survey and data from DINAS	Every year
O-3	Participation Rate in Training Program	The number of Kelompok Tani member who participate in the training program	To know status of Kelompok Tani activity and farmers' perception	Baseline survey and data from DINAS	Every year
O-4	Sufficiency Rate of Government's Annual Budget for the Project	The ratio of fund required from the Government institutions to total cost required for the implementation of the	To know the degree of cost sufficiency and ensure proper management of the	Baseline survey and data from DINAS	Every year
Technical Indicators					
T-1	Cropping Intensity of Sample Commodities	The ratio of actual sample commodity, particularly sweet potato cropped area to entire farm owned by Kelompok Tani	To confirm change of cropping pattern based on project implementation	Baseline survey and data from DINAS	Every cropping season
T-2	Number of Processing Equipment	The number of increase in processing equipment introduced to Kelompok Tani and operated by them	To confirm change of Kelompok Tani activities particularly how degrees Kelompok Tani are involved in processing	Baseline survey and data from DINAS	Every year
Social and Environmental Indicator					
SE-1	Gender Issue	Gender impact from proposed activities such as (i) changes in the ratio of men and women member of Kelompok Tani, (ii) changes in the ratio of men and women member in the board of director of Kelompok Tani, and (iii) changes in the number and the ratio of farmers who	To confirm the gender impact from proposed project	Baseline survey and data from DINAS	Every year
SE-2	Environmental Issue	aware the importance of environment-related impact such as (i) soil erosion, (ii) treatment of waste from processing such as water quality (organic / microbial pollution, rubbish and trash, nutrient enrichment and electric conductivity and pH etc.)	To confirm the environmental impact from processing activities	Baseline survey and data from DINAS	Every year

Effect Indicators

No.	Indicator	Definition	Objective	Source of Data	Monitoring frequency
1	Sample Commodity Yield	The volume of sample commodities (duck, sweet potato or mango) produced by season	To assess the degree of production increase by project implementation	Baseline survey and data from DINAS	Every cropping season
2	Ratio of Incubation (Duck)	The ratio of successful incubation to all eggs in hatchery	To confirm technical improvement of Duck Kelompok Tani	Baseline survey and data from DINAS	Every year
2	Sample Commodity Quality	The ratio of better quality of sample commodities to total production	To evaluate quality improvement of sample commodities	Baseline survey and data from DINAS	Every cropping season
3	Sample Commodity Processing Quantity	The volume of sample commodities (duck, sweet potato or mango) processed product by season	To assess the degree of processing increase by project implementation	Baseline survey and data from DINAS	Every year
4	Product Quality sold through the Group	The volume and the ratio of harvested and/or processed product sold through the group as a group collective activity, not through middlemen	To assess how project enhance capability of the group in marketing	Baseline survey and data from DINAS	Every year
5	Annual Net Income of Farmer	Annual income of the farmer earned by the farming and processing activity	To evaluate degree of contribution to alleviating poverty by implementation of the project	Baseline survey and data from DINAS	Every year
6	Working Condition Improvement	Reduction in the amount of time by men and women of Kelompok Tani to earn certain amount of income	To evaluate how project improve working condition of farmers by assessing the time to earn certain degree of income	Baseline survey and data from DINAS	Every year
7	Profit Sharing Among the Group	How distribution of costs and benefits among the members and between men and women is made in transparent manner	To evaluate how project improve transparency among the group	Baseline survey and data from DINAS	Every year

Table 6.2.1 Points to be Considered for Implementation under SKR-CF (1/2)

Pattern	Points to consider
<p>Business Pattern A: Enlargement and improvement of the performance of existing business (duck business and cottage level food processing)</p>	<p>The objective of these projects is to improve farmers' income through agricultural processing and marketing by capacity development of organization, technology and marketing of their existing economic activities. For this purpose, most appropriate BDS should be selected. NGO (Pinbok) type BDS will be suitable for the enlargement and strengthening of existing business and University/ Research Institute type BDS such as IPB and BALTNAK will be suitable for the projects covering application of new technologies.</p>
<p>Business Pattern B: Creation of new business (primary processing of sweet potato and mango juice processing)</p>	<p>1. Primary processing of Sweet Potato (KT Andayarasa)</p> <ul style="list-style-type: none"> · First of all, the sales contract for dried sweet potato chips for flour should be concluded. At this stage, PT Global Agro-Inti in Kuningan is a candidate of dried chips but other candidates such as Bogasari should be included as a purchaser. It will be best for KT to secure plural numbers of customer for such special product. · IPB will be most suitable BDS for this project as IPB has technology of solar dryer for sweet potato chip drying. IPB once be selected as BDS should fix up supporting team comprising drying technology, product management, empowering the organization and LKM facilitation. · Proposed equipment is not available in a market. Detailed confirmation on the specification is required between KT and BDS. · Procurement of equipment and construction of working area should be carried out by KT with assistance by BDS. The purchasing procedure should follow the regulation set force by Deptan/ Dinas Provice. <p>2. Mango processing and marketing of juice/ jelly (KT Budidaya)</p> <ul style="list-style-type: none"> · For the success of this Mango processing business, securement of the market is the most important issue. For this purpose, BDS should be capable enough to cover such all required aspects. · Brawijaya University or BPTP Malang will be most suitable BDS for this project as they have technology of mango processing as well as experience of supports to farmers groups. BDS should fix up supporting team comprising marketing, processing technology, product management, empowering the organization and LKM facilitation. · Procurement of equipment and construction of working area should be carried out by KT with assistance by BDS. The purchasing procedure should follow the regulation set force by Deptan/ Dinas Provice. · As the harvesting period of mango is limited for max. 3 months/ year, other fruit processing such as pineapple should be promoted by BDS for the maximization of farmers' income generation and utilization of equipment.

Table 6.2.1 Points to be Considered for Implementation under SKR-CF (2/2)

Pattern	Points to consider
<p>Business Pattern C: Newcomer to the existing business (dried mango chips processing)</p>	<ul style="list-style-type: none"> · This mango dry chip project is supposed to tie-up with REI project. Therefore entering into MOU between KT and REI with thorough supports to KT by BDS before starting this project is essential. It is better for KT to have own market in East-java province hence REI takes responsibility for the marketing in other area in Indonesia including Jakarta and Bali as well as export market. · Brawijaya University or BPTP Malang will be most suitable BDS for this project as they have technology of dried mango chip processing as well as experience of supports to KT. BDS should fix up supporting team comprising marketing, processing technology, product management, empowering the organization and LKM facilitation. · Procurement of equipment and construction of working area should be carried out by KT with assistance by BDS. The purchasing procedure should follow the regulation set force by Deptan/ Dinas Provice. · As the harvesting period of mango is limited for max. 3 months/ year, other fruit processing such as pineapple should be promoted by BDS for the maximization of farmers' income generation and utilization of equipment.

Figure

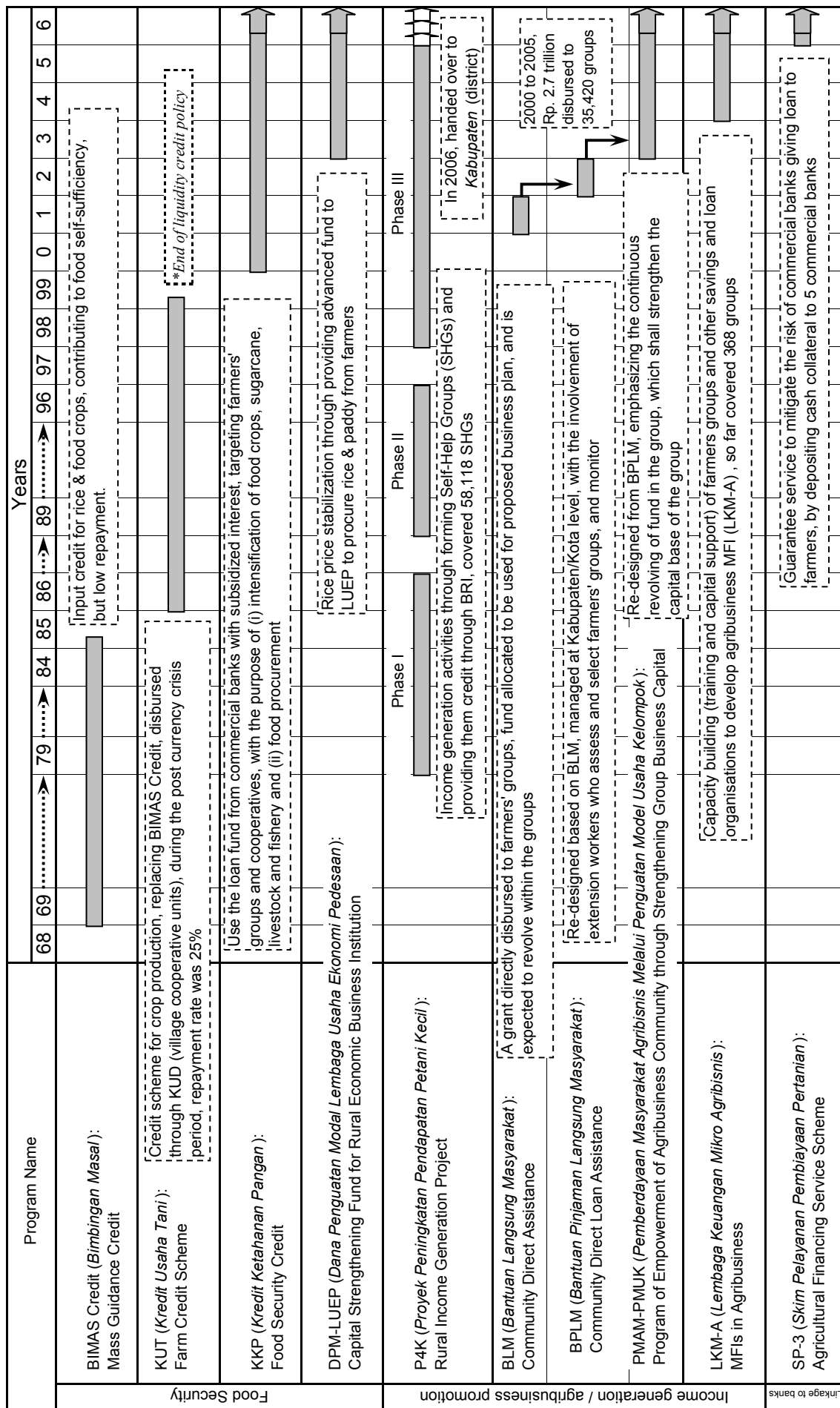


Figure 2.3.1 Major Finance Program under the Ministry of Agriculture

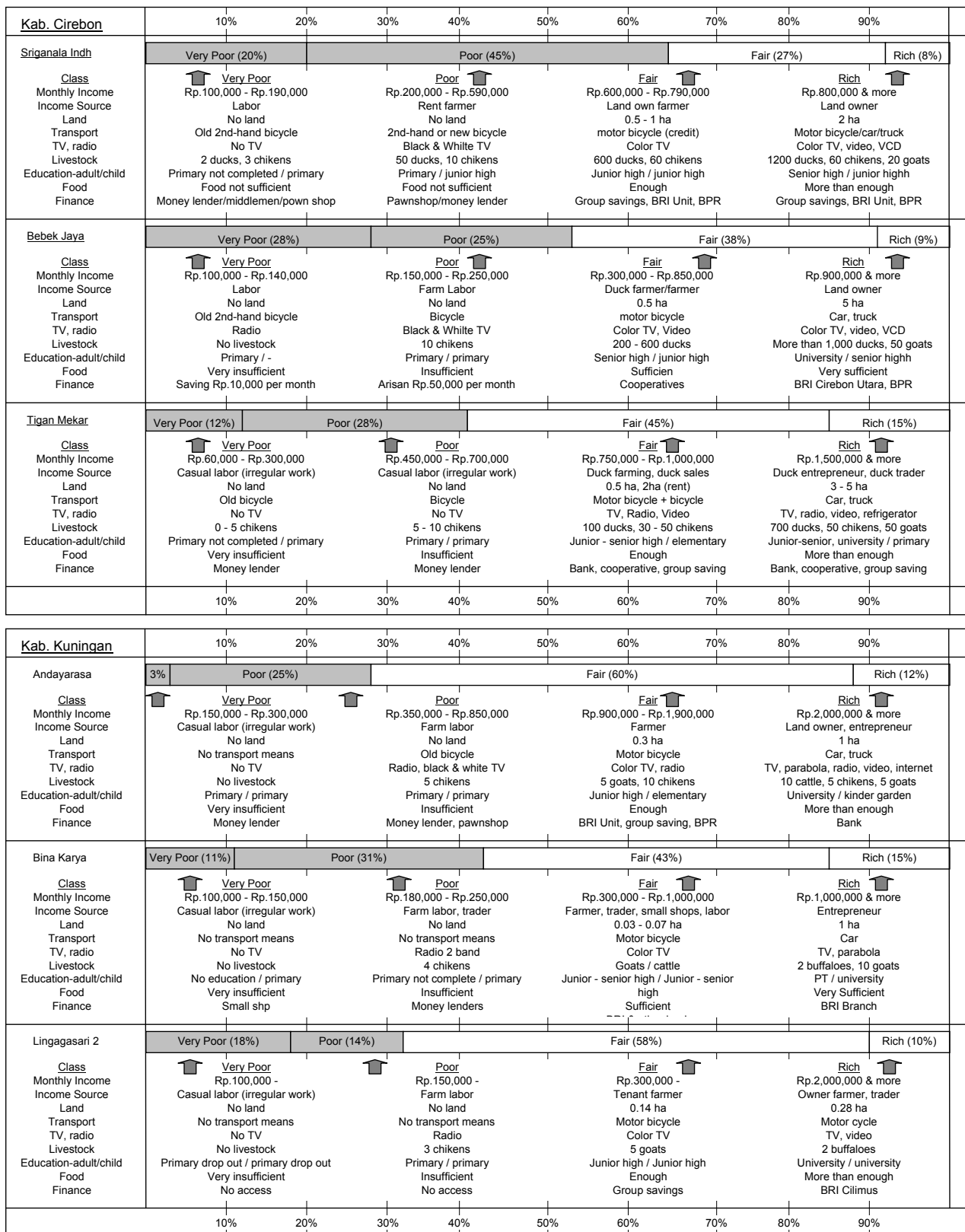


Figure 4.1.1 Result of Poverty Ranking at Farmers Communities (1/2)

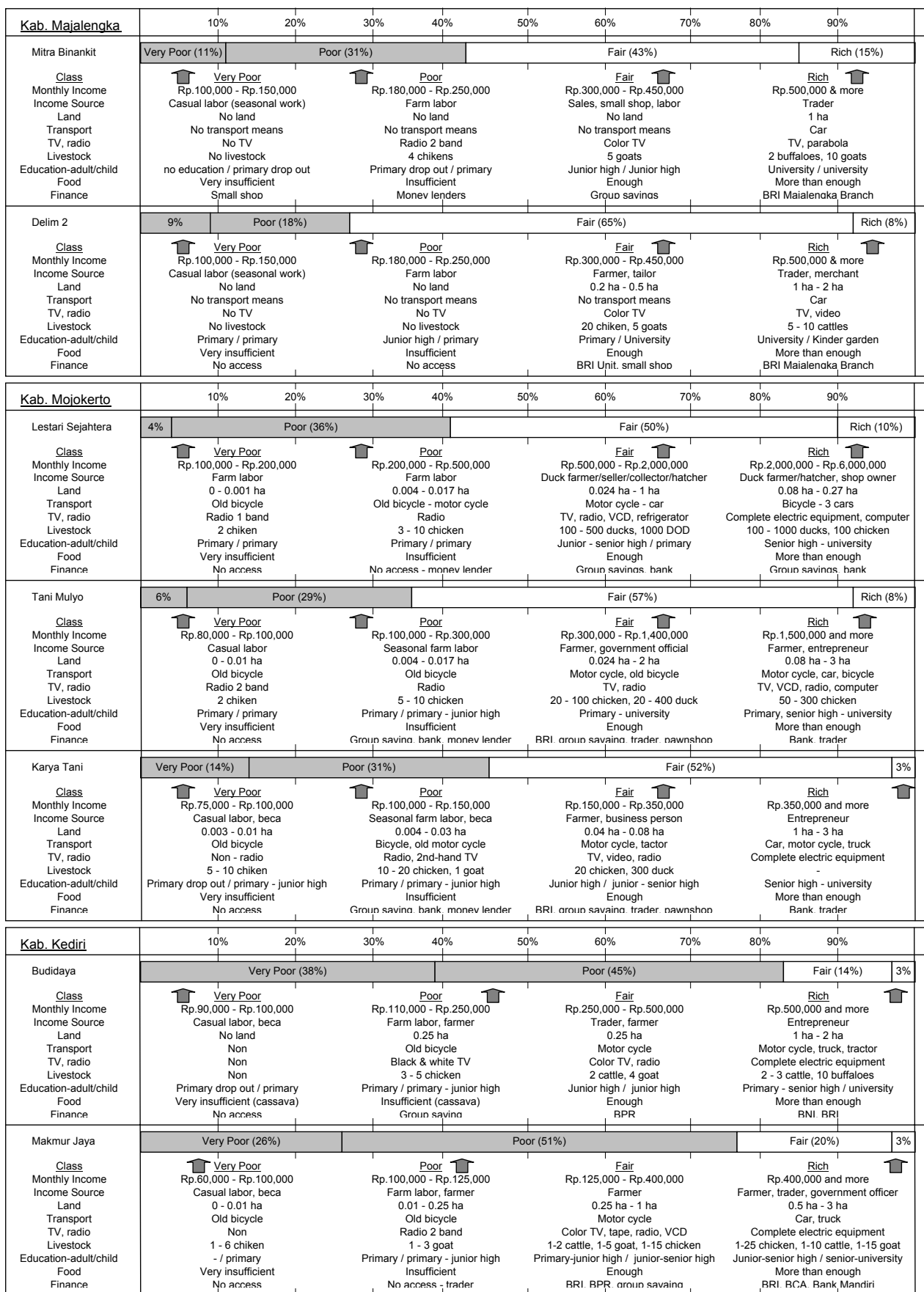


Figure 4.1.1 Result of Poverty Ranking at Farmers Communities (2/2)

Attachment

Attachment-1
Scope of Work

SCOPE OF WORK

FOR

THE STUDY ON THE IMPROVEMENT OF FARMERS' INCOME:
AGRICULTURAL PROCESSING AND RURAL MICRO-FINANCE

IN THE REPUBLIC OF INDONESIA

AGREED UPON BETWEEN

MINISTRY OF AGRICULTURE

AND

JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY

Jakarta, 5 November 2004



Dr. Tahlim Sudaryanto
Director
Bureau of Planning and Finance
Ministry of Agriculture



Mr. Shinji TOTSUKA
Leader
Preparatory Study Team
Japan International Cooperation Agency

I. INTRODUCTION

In response to the request from the Government of the Republic of Indonesia (hereinafter referred to as "GOI"), the Government of Japan (hereinafter referred to as "GOJ") decided to conduct the Study on the Improvement of Farmers' Income: Agricultural Processing and Rural Micro-Finance (hereinafter referred to as "the Study") in accordance with relevant laws and regulations in force in Japan.

Accordingly, Japan International Cooperation Agency (hereinafter referred to as "JICA") the official agency responsible for the implementation of the technical cooperation of the GOJ, will undertake the Study in close cooperation with the authorities concerned of GOI.

The present document sets forth the Scope of Work with regards to the Study.

II. OBJECTIVES OF THE STUDY

The Objectives of the Study are:

1. To prepare policy recommendations for the GOI in its formulating/implementing possible future policies for the promotion of agricultural processing and rural micro-finance to improve farmers' income.
2. To transfer relevant technical skills/knowledge to the Indonesian counterpart personnel through on-the-job training during the course of the Study.

III. STUDY AREA

To facilitate the Study related to agricultural processing, sample commodities (Sweet potato, Duck, and Mango) were selected by the GOI, and based on the production area of the said commodities, the following sample sites are selected as study area. The total study area is approximately 4,322.04 km², and relevant maps are attached in ANNEX 1.

West Java Province	Kuningan District (Sweet Potato)	216.88km ²
	Majalengka District (Sweet Potato)	1,068.69km ²
	Cirebon District (Duck)	958.27km ²
East Java Province	Kediri District (Mango)	1,386.05km ²
	Mojokerto District (Duck)	692.15km ²

In terms of rural micro-finance, the Study may collect information outside the sample sites.

IV. SCOPE OF THE STUDY

In order to achieve the above objectives, the framework of the Study will be as follows:

1. Review Existing Information/Data
 - 1) Agricultural Processing
 - (1) Review existing information/data on current system, policies, government planning, on-going activities related to agricultural processing.
 - 2) Rural Micro-finance
 - (1) Review existing information/data on current law/regulations, policies, government planning, on-going practice related to rural micro-finance.

2. Collection of Basic Information of the Sample Sites
 - (1) Collect basic information/data on each sample site and obtain general picture of the sites: (i) natural conditions, (ii) economic and social conditions, (iii) on-going activities on agricultural processing and rural micro-finance.
3. Promotion of Agricultural Processing
 - 1) Clarification of the Current Situation
 - (1) Conduct supplement field survey to obtain clear picture of the general situation of each sample site.
 - (2) Clarify the current situation of agricultural processing at each sample site.
 - 2) Needs of Stakeholders
 - (1) Conduct a workshop for the farmers and clarify their needs as well as constraints on agricultural processing.
 - (2) Collect the view/needs of other relevant stakeholders related to agricultural processing.
 - (3) Identify common problems/issues on agricultural processing at sample sites and clarify the critical points, which should be considered when preparing the recommendations for agricultural processing.
 - 3) Identification of Possible Solutions for each Sample Site
 - (1) Based on the findings thus far, identify possible solutions for the promotion of agricultural processing at each sample site.
 - 4) Preparation of Recommendations for the Promotion of Agricultural Processing at each Sample Site
 - (1) Prepare draft recommendations for the promotion of agricultural processing at each sample site.
 - (2) Obtain comments from relevant stakeholders on the draft recommendations.
 - (3) Based on the comments, finalize the recommendations.
 - 5) Based on the recommendations for each sample site, prepare common recommendations for the promotion of agricultural processing in general.
4. Development of new Rural Micro-finance Scheme
 - 1) Clarification of the Current Situation
 - (1) Conduct supplement field survey to collect further information on existing rural micro-finance schemes, which could be used as a useful reference for the Study.
 - (2) Analyze the existing rural micro-finance scheme and clarify the reason for success/failure of each scheme.
 - (3) Based on the analysis above, identify the problems/constraints of rural micro-finance.
 - 2) Needs of Stakeholders
 - (1) Conduct a workshop for the farmers and clarify their needs as well as constraints on rural micro-finance.
 - (2) Collect the view/needs of other relevant stakeholders related to rural micro-finance.
 - (3) Based on the stakeholder analysis, clarify the critical points, which should be considered when developing new rural micro-finance scheme.
 - 3) Identification of Possible Solutions
 - (1) Based on the findings thus far, identify possible solutions.
 - 4) Development of new Rural Micro-finance Scheme
 - (1) Draft new rural micro-finance scheme.
 - (2) Obtain comments on the draft rural micro-finance scheme from relevant stakeholders.
 - (3) Based on the comments received, finalize the new rural micro-finance scheme.

5. Linkage between Agricultural Processing and Rural Micro-finance
 - (1) Based on the recommendations for the promotions of agricultural processing and the newly developed rural micro-finance scheme, present a sample model, combining the two components, as a guidance how to operate the two components at the field.
6. Policy Recommendations
 - (1) Make policy recommendations for the promotion of agricultural processing.
 - (2) Make policy recommendations for the establishment of new rural micro-finance scheme.

V. STUDY SCHEDULE



The Study shall be carried out in accordance with the Tentative Work Schedule as attached in ANNEX 2.

VI. REPORTS

JICA shall prepare and submit the following reports to GOI:

1. Inception Report (Ic/R)
Thirty (30) copies in English at the commencement of the Study
2. Progress Report (1) (Pr/R 1)
Thirty (30) copies in English at the end of the first field work
3. Interim Report (It/R)
Thirty (30) copies in English at the beginning of the second field work
4. Progress Report (2) (Pr/R 2)
Thirty (30) copies in English at the end of the second field work
5. Draft Final Report (Df/R)
Thirty (30) copies in English at the beginning of the third field work
GOI-side shall submit written comments on the Draft Final Report to JICA within one (1) month after the receipt of the said Report.
6. Final Report (F/R)
Fifty (50) copies each, in English and Indonesian, within in two (2) months after the receipt of the comments on the Df/R from GOI

VII. UNDERTAKING OF THE GOI

1. To facilitate the smooth conduct of the Study, GOI shall take necessary measures, including the following:
 - (1) To permit the members of the Study Team to enter, leave and sojourn in Indonesia for the duration of their assignment therein, and exempt them from alien registration requirements and consular fees.
 - (2) To exempt the members of the Study Team from taxes, duties and other charges on equipment, machinery and other materials to be brought into and out of Indonesia for the conduct of the Study.
 - (3) To exempt the members of the Study Team from income tax and charges of any kind imposed on or in connection with any emoluments of allowances paid to the members of the Study Team for their services in connection with the implementation of the Study
 - (4) To provide necessary facilities to the Study Team for remittance as well as utilization of the funds introduced into Indonesia from Japan in connection with the implementation of the Study.
- 
- 

2. GOI shall bear claims, if any arises, against members of the Study Team resulting from, occurring in the course of, or otherwise connected with the discharge of their duties in the implementation of the Study, except when such claims arise from gross negligence or willful misconduct on the part of the members of the Study Team.
3. Bureau of Planning and Finance, Ministry of Agriculture, shall act as the counterpart agency for the Study Team and also as the coordinating body in relations with other governmental and non-governmental organizations for the smooth implementation of the Study.
4. Ministry of Agriculture, at its own expense, provide the Study Team with the following, in cooperation with other organizations concerned:
 - (1) Security-related information as well as measures to ensure the safety of the Study Team
 - (2) Information as well as support in obtaining medical service
 - (3) Available data and information related to the Study
 - (4) Counterpart personnel
 - (5) Suitable office space and necessary equipment in Jakarta
 - (6) Credentials or identification cards

VIII. UNDERTAKING OF JICA

For the implementation of the Study, JICA shall take the following measures:

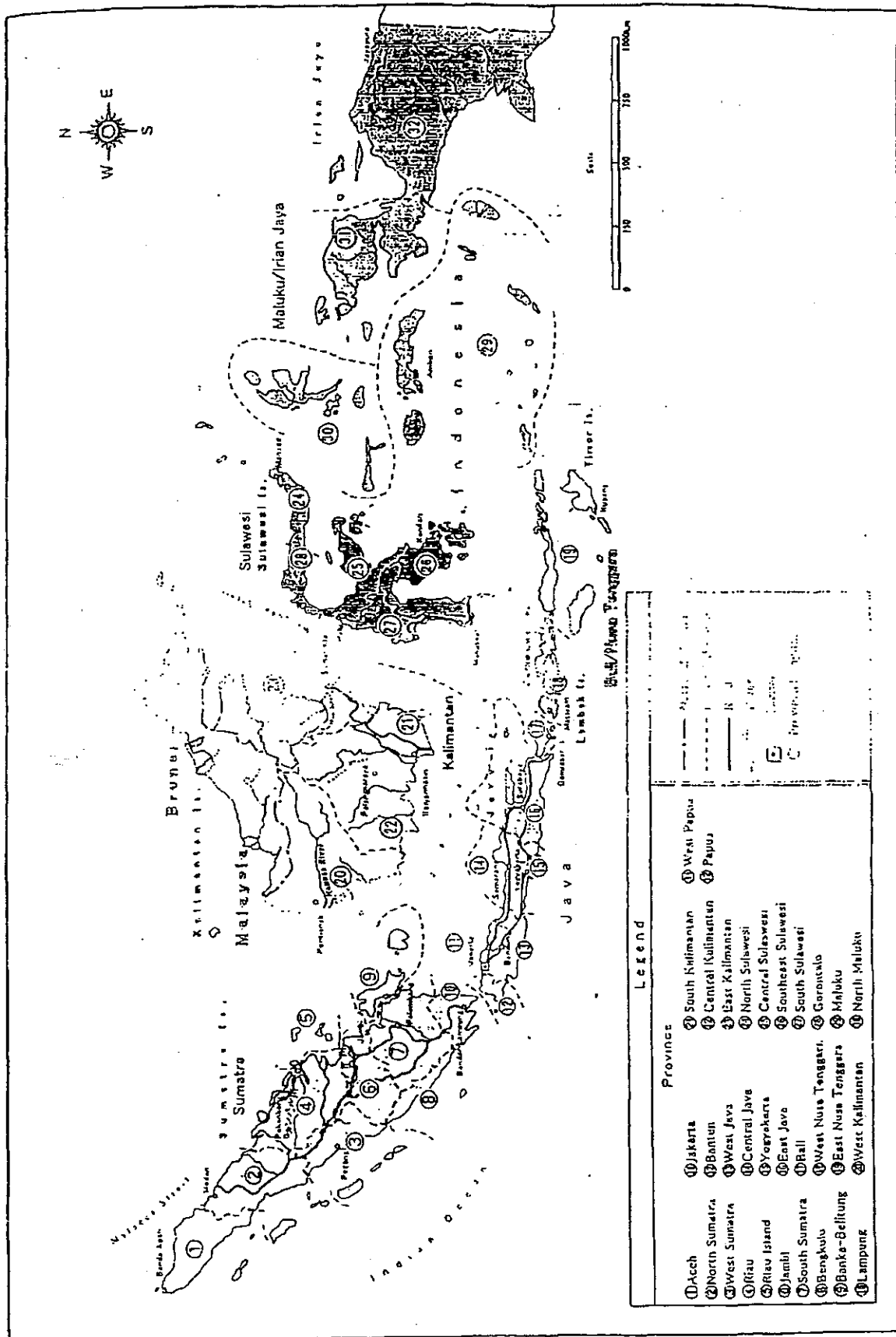
1. To dispatch, at its own expense; Study Team to Indonesia
2. Pursue transfer to technical skills/knowledge to the Indonesian counterpart personnel through on-the-job training during the course of the Study

IX. CONSULTATION

JICA and the Ministry of Agriculture shall maintain close communication and consult with each other in respect to any matters that may arise from or in connection with the Study.

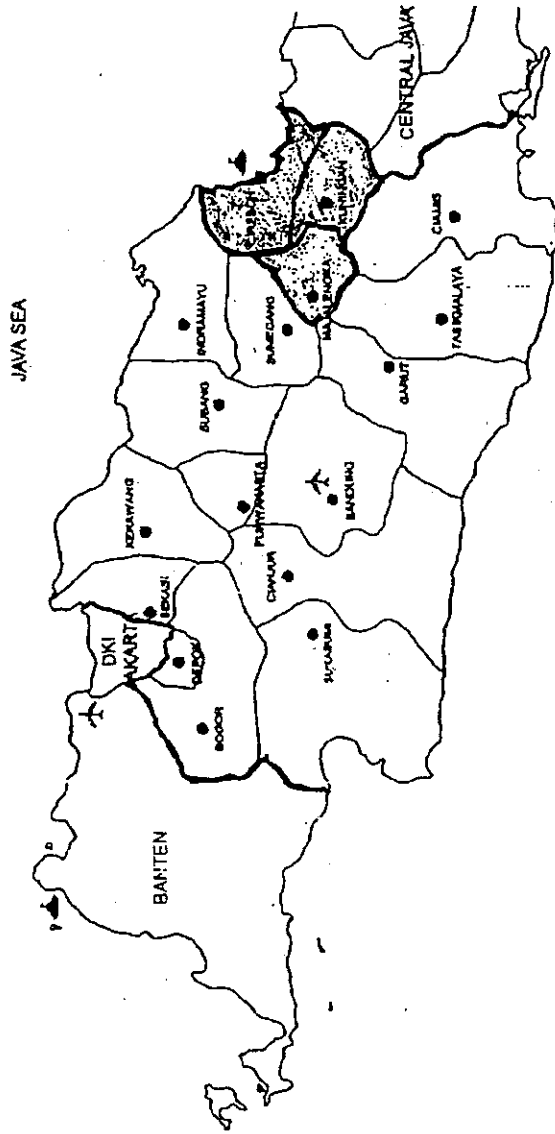
①

2



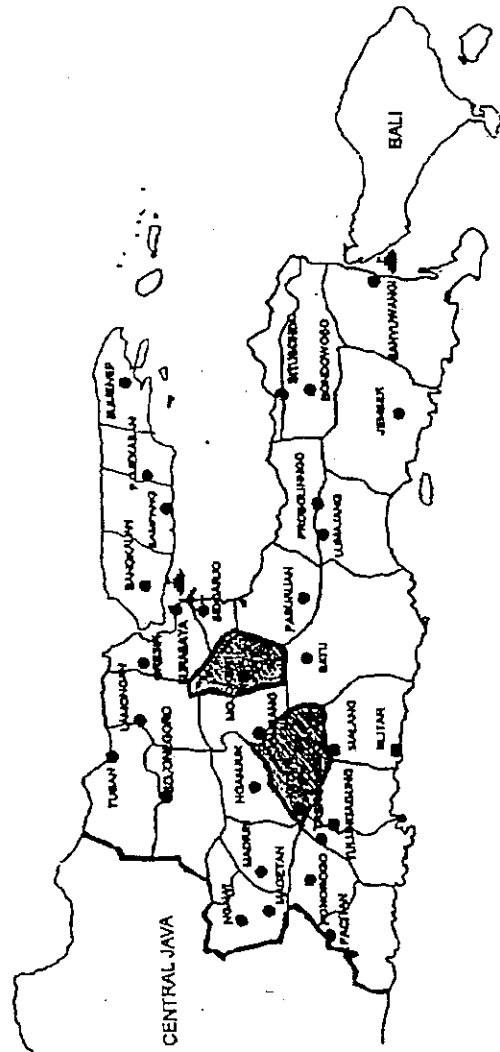
WEST JAVA (JAWA BARAT)

SERIBU ISLAND



EAST JAVA (JAWA TIMUR)

JAVA SEA



INDIAN OCEAN

2

TENTATIVE SCHEDULE

Months	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Study in Indonesia														
Study in Japan														
Reports	Δ Ic/R					Δ P/I/R(1)		Δ I/W/R		Δ P/I/R(2)		Δ D/I/R	⊙	Δ F/I/R

<Remarks>

- Ic/R
- P/I/R
- I/W/R
- D/I/R
- ⊙
- F/R

- Inception Report
- Progress Report
- Interim Report
- Draft Final Report
- Comments on the D/I/R by the Government of Indonesia
- Final Report

MINUTES OF MEETING

ON THE SCOPE OF WORK FOR

THE STUDY ON THE IMPROVEMENT OF FARMERS' INCOME:
AGRICULTURAL PROCESSING AND RURAL MICRO-FINANCE

IN THE REPUBLIC OF INDONESIA


AGREED UPON BETWEEN

MINISTRY OF AGRICULTURE

AND

JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY

Jakarta, 5 November 2004



Dr. Tahlim Sudaryanto
Director
Bureau of Planning and Finance
Ministry of Agriculture



Mr. Shinji TOTSUKA
Leader
Preparatory Study Team
Japan International Cooperation Agency

I. INTRODUCTION

In response to the request from the Government of the Republic of Indonesia (hereinafter referred to as "GOI"), the Preparatory Study Team (hereinafter referred to as "the Team") organized by Japan International Cooperation Agency (hereinafter referred to as "JICA") and headed by Mr. Shinji TOTSUKA, conducted the preparatory study from 18 October to 10 November 2004 for the purpose of discussing and confirming the Scope of Work for the Study on the Improvement of Farmers' Income: Agricultural Processing and Rural Micro-Finance (hereinafter referred to as "the Study").

The Team held series of discussions with the officials concerned from the Ministry of Agriculture and other relevant agencies on the Scope of Work for the Study. The list of participants who attended in those meetings is attached in the ANNEX.

As the result of the discussion, the Ministry of Agriculture and the Team agreed upon the Scope of Work for the Study.

The following summarizes the major points discussed between the Team and the Ministry of Agriculture concerning the Scope of Work for the Study.

II. RESULT OF DISCUSSION

1. Title of the Study

The title of the Study is changed to *The Study on the Improvement of Farmers' Income: Agricultural Processing and Rural Micro-Finance* to better reflect the objectives of the Study.

2. Implementing Arrangement

Bureau of Planning and Finance, Ministry of Agriculture, will be the counterpart agency for the Study and will be responsible for coordinating with relevant Directorate Generals, including Directorate General of Agriculture Facilities, Directorate General of Food Crop Production, Directorate General of Horticulture Production, Directorate General of Livestock Services, Directorate General of Agricultural Processing and Marketing as well as other agencies.

3. Assignment of Counterpart Personnel

Ministry of Agriculture will assign counterpart personnel for each Japanese Expert before the arrival of the Japanese Study Team. JICA will inform the Ministry of Agriculture in which technical fields counterpart personnel will be necessary prior to the initiation of the Study.

4. Establishment of Coordination Committee

To ensure smooth and effective implementation of the Study, Coordination Committee will be established by the Indonesian Side to provide guidance to the Study. The Coordination Committee will be chaired by the Director of Bureau of Planning and Finance, with the following members:

Bureau of Planning and Finance
Directorate General of Agriculture Facilities
Directorate General of Food Crops Production
Directorate General of Horticulture Production
Directorate General of Livestock Services

Directorate General of Agricultural Processing and Marketing
Agency for Agriculture Human Resources Development

The Coordination Committee will meet whenever new study reports are prepared by the Japanese Study Team, and/or necessity arises. The First Coordination Committee meeting will be held at the arrival of the Japanese Study Team to present the Inception Report.

5. Office Space and Necessary Equipment for the Japanese Study Team

Bureau of Planning and Finance, Ministry of Agriculture will prepare an office space at the Ministry of Agriculture for the use of the Japanese Study Team before the initiation of the Study. The office space will be equipped with telephone line and basic furniture.

It was discussed that following equipment will be needed for the Japanese Study Team. The Team took note of the request for consideration.

- (1) Fax Machine
- (2) Copy Machine

6. Training of Counterpart Personnel in Japan

Ministry of Agriculture requested that JICA conduct Counterpart Training in Japan. The Team will convey the request to JICA Indonesia Office and JICA Headquarters for consideration.

7. Organizing Dissemination Seminar

Dissemination seminar will be jointly organized by the two parties at the end of the Study to disseminate the findings of the Study.

8. Opening of Final Report to the Public

Both parties agreed that the Final Report be opened to all interested parties.

9. Initiation of the Study

Taking into consideration of the harvest season of Mango, the Study is expected to begin in middle of 2005.

10. Post-Study Possibility

Ministry of Agriculture expressed keen interest in implementing a Pilot Project upon completion of the Study, by utilizing the Second Kennedy Round Counterpart Fund (2KR-C/F).

11. Effectuation of Scope of Work

Scope of Work of the Study will come into effect after receiving endorsement from JICA Headquarters as well as after completing necessary arrangement between GOJ and GOI.

1

2

LIST OF PARTICIPANTS

*1. Indonesian Side*Ministry of Agriculture

(Bureau of Planning and Finance)

Dr. Tahlim Sudaryanto	Director
Dr. Muchjidin Rachmat	Head, Division of Agricultural Development Planning
Mr. Maringan Rumahorbo	Division of Agricultural Development Planning
Mr. Masanori KOZONO	JICA Expert

(Directorate General of Agriculture Facilities)

Mr. Yandri Ali	Head, Sub-Directorate of Institutional and Cooperation, Directorate of Finance
Ms. Magdalena	Sub-Directorate of Institutional and Cooperation, Directorate of Finance
Mr. Hendri Simarmata	Sub-Directorate of Institutional and Cooperation, Directorate of Finance

(Directorate General of Food Crop Production)

Mr. Widjatmiko	Head, Sub-Directorate of Other Tubers, Directorate of Legumes and Tubers
Mr. Gatut Sumbogodjati	Head, Cooperation Sub-Division, Division of Planning

(Directorate General of Horticulture Production)

Mr. Bambang Hardiantono	Directorate of Fruit Crops
-------------------------	----------------------------

(Directorate General of Livestock Services)

Ms. Tite Krisnawati	Sub-Directorate of Poultry, Multi-various Animals & Favorite Pets Culture, Directorate of Livestock Farming
---------------------	--

(Directorate General of Agriculture Processing and Marketing)

Dr. Kusharyono	Head, Cooperation Sub-division, Division of Planning
----------------	--

(Agency for Agriculture Human Resources Development: AAHRD)

Mr. Ridwan Yahya	Center for Entrepreneurship Agribusiness
------------------	--

*2. Japanese Side*Preparatory Study Team

Mr. Shinji TOTSUKA	Team Leader
Ms. Machiko KAMIYA	Coordinator/Preliminary Evaluation
Mr. Katsutoshi SAEGUSA	Rural Micro-finance
Ms. Tomoko HONDA	Rural Development/Community-based Economic Activities
Mr. Akikazu AOYAGI	Agricultural Processing

b

2

Attachment-2
Minutes of Meeting for Inception Report

**MINUTES OF MEETING ON
COORDINATION COMMITTEE ON THE INCEPTION REPORT
FOR
THE STUDY ON THE IMPEOVEMENT OF FARMERS' INCOME:
AGRICULTURAL PROCESSING AND RURAL MICRO FINANCE
IN THE REPUBLIC OF INDONESIA**

**AGREED UPON
BETWEEN
MINISTRY OF AGRICULTURE (MOA)
AND
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY (JICA)**

Jakarta, December 8th, 2005

The Scope of Work for the Study on the Improvement of Farmers' Income: Agricultural Processing and Rural Micro Finance (hereinafter referred to as "the Study") was agreed upon between the Ministry of Agriculture (hereinafter referred to as "MOA") and the Japan International Cooperation Agency (hereinafter referred to as "JICA") on November 5th, 2004. In accordance with the Scope of Work, JICA dispatched the Study Team (hereinafter referred to as "the JICA Study Team") for execution of the 1st Work in Indonesia during the period from December 6th to 10th, 2005.

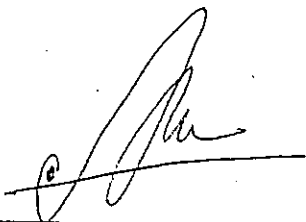
The meeting on the Inception Report was held between the Coordination Committee for the Study (hereinafter referred to as "the Committee") and JICA Study Team on December 7th, 2005. The attendants of the meeting are listed in the attachment.

The meeting was chaired and opened by Dr. Ir. Abdul Basit, Head of Policy & Planning, Bureau of Planning, Secretariat General, MOA. Then, Mr. N. Morioka, Team Leader/Rural Development/Assistance Trend of the JICA Study Team, provided the presentation on the Inception Report.


After a series of discussions with the Committee members, the Inception Report was in principle agreed and received by the Indonesian side, and the main points discussed are as follows:

- (1) Bureau of Planning requested to implement a pilot project for follow up of the Study. The Study Team replied that implementation of the recommendation will be discussed in the course of the study since the plan has not been prepared yet.

- (2) Center of Agricultural Financing explained that farmers can not access the micro-finance because of demand – supply gap, and MOA announced a policy to institutionalize micro-finance based on revolving fund groups already organized in each DG. In this regard, policy recommendation of the Study will be formulated taking the existing revolving fund groups into account. The JICA Study Team agreed to examine the existing revolving fund groups.
- (3) Bureau of Planning stated that rural micro-finance would be studied from the view point of cultural background in Indonesia. The Study Team replied to consider cultural aspects like “Syariah” mentioned in the Inception Report. Bureau of Planning pointed out that generalization in agricultural processing needs more explanation on its level as well as commodities and sites to be applied. The Study Team answered that generalization will be discussed through compilation of commodity profiles, site profiles, processing levels and other information.
- (4) JICA Study Team inquired regarding the situation of bird flu since duck is one of the sample commodities. MOA explained that the bird flu does not affect the study activity currently, but the situation of bird flu will be examined before starting the second field survey in Indonesia.
- (5) Regarding the undertaking by GOI, it was confirmed that Bureau of Planning will prepare the counterpart list and inform JICA Indonesia Office in June 2006 one month before starting the second field survey. It was also confirmed that Bureau of Planning will provide office space for the Study Team.



Dr. Ir. Abdul Basit
Head of Policy & Planning Division
Bureau of Planning
MOA



Mr. MORIOKA Naoto
Team Leader/Rural Development
/Assistance Trend
JICA Study Team

LIST OF ATTENDANTS

- I. Ministry of Agriculture**
1. Abdul Basit : Bureau of Planning
 2. Susilo Widodo : Bureau of Planning
 3. Maringan. R : Bureau of Planning
 4. Yandri : Center for Agricultural Financing
 5. Ruth Napitupulu : Bureau of Foreign Cooperation
 6. Lilis : Directorate General of Food Crop Production
 7. Lisa Fransisca : Directorate General of Food Crop Production
 8. Sawing Ibane : Directorate General of Food Crop Production
 9. Bhari : Directorate General of Horticulture
 10. Yenny Nurcahya S. : Directorate General of Horticulture
 11. Lilik Kristiani : Directorate General of Processing and Marketing for Agricultural Product
 12. KOZONO Masanori : JICA Expert in Bureau of Planning (Advisor on Agriculture Policy and Programme Coordination)
 13. SHIMOHIRA Itsuo : JICA Expert in Directorate General of Livestock Production (Livestock Development Policy Advisor)
- II. JICA Indonesia Office**
14. KAMIYA Machiko : Assistant Resident Representative
 15. Lingga Kartika : Program Officer
- III. JICA Study Team**
16. MORIOKA Naoto : Team Leader of the Study Team / Rural Development / Assistance Trend
 17. KOBAYASHI Yuki : Rural Micro Finance A
 18. NAKAGAWA Takuya : Institution / Social Consideration

Attachment-3
Minutes of Meeting for Progress Report 1

MINUTES OF MEETING ON
COORDINATION COMMITTEE MEETING ON THE PROGRESS REPORT 1
FOR
THE STUDY ON THE IMPEOVEMENT OF FARMERS' INCOME:
AGRICULTURAL PROCESSING AND RURAL MICRO-FINANCE
IN THE REPUBLIC OF INDONESIA

AGREED UPON
BETWEEN
MINISTRY OF AGRICULTURE
AND
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY

Jakarta, December 28th, 2006

The Scope of Work for the Study on the Improvement of Farmers' Income: Agricultural Processing and Rural Micro-Finance (hereinafter referred to as "the Study") was agreed upon between the Ministry of Agriculture (hereinafter referred to as "MOA") and the Japan International Cooperation Agency (hereinafter referred to as "JICA") on November 5th, 2004. In accordance with the Scope of Work, JICA dispatched the Study Team (hereinafter referred to as the "JICA Study Team") for execution of the 2nd Work in Indonesia during the period from July 24th to 29th December, 2006.

The JICA Study Team submitted the Progress Report 1 (hereinafter referred to "the Report") on December 26th 2006, and the Indonesian side in principle agreed and received the Report with the following comments raised in the Coordination Committee held on November 28th 2006 on the draft proposals for the "Counterpart Fund – the Second Kennedy Round":

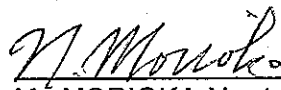
- (1) Bureau of Planning suggested to JICA Study Team to prepare operational and practical policy recommendations on agriculture processing and rural micro-finance to improve farmers' income, so that MOA could implement policy recommendations by both national budget and foreign assistance. The JICA Study Team agreed to consider the suggestion.
- (2) Bureau of Planning inquired about the effectiveness of semi-automatic hatchery equipment of duck DOD (day old duck) from the view point of workability and profitability, and such aspect would be elaborated through the course of the Study. JICA Study Team replied that no farmers' groups are utilizing this type of equipment at the moment and semi-automatic machine are included in the SKR proposal at the farmers level, then its effectiveness would be confirmed through

its operation by farmers.

- (3) Bureau of Planning requested JICA Study Team to consider gender aspect for preparation of improvement plan since the role of men and women is different in agricultural processing and finance activities. JICA Study Team answered that gender aspect has been already considered in selection of sample Kelompok Tani, and also agreed to carefully analyze gender impact to prepare improvement plan.
- (4) Bureau of Planning stated that poverty alleviation is of importance in promotion of agriculture processing. In this regard, statistical data would be carefully utilized since Provincial or District level data do not necessarily represent the actual situation of farmers. JICA Study Team answered that both statistical data and field condition collected through poverty ranking at the site were utilized to assess the poverty level of the communities at each farmers' group.
- (5) Center of Agricultural Finance recommended that the linkage would be considered between micro-finance schemes and farmers' group activities so as to enable micro-finance schemes to support farmers' production and processing works. JICA Study Team agreed to incorporate the suggestion in the plan.
- (6) Center of Agricultural Finance requested JICA Study Team to consider strengthening farmers' group (Kelompok Tani) by establishing Federation (Gabungan Kelompok Tani: Gapoktan) to support the above linkage. JICA Study Team replied that Gapoktan would be taken into consideration for preparation of the plan.
- (7) DG of Processing and Marketing for Agricultural Product stated that the Study Team should consider both supply-side (producers: farmers' group) and demand-side (markets & consumers) to prepare the plan. JICA Study Team agreed the comments to take into consideration.
- (8) Comments on the Report will be sent to JICA Study Team by Bureau of Planning through coordinating the concerned agencies by January 5th 2007.



Dr. Ir. Mappaona
Head
Bureau of Planning
Ministry of Agriculture



Mr. MORIOKA Naoto
Team Leader
JICA Study Team

Attachment-4
Minutes of Meeting for Interim Report

**MINUTES OF MEETING ON
COORDINATION COMMITTEE ON THE INTERIM REPORT
FOR
THE STUDY ON THE IMPEOVEMENT OF FARMERS' INCOME:
AGRICULTURAL PROCESSING AND RURAL MICRO FINANCE
IN THE REPUBLIC OF INDONESIA**

**AGREED UPON
BETWEEN
MINISTRY OF AGRICULTURE (MOA)
AND
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY (JICA)**

Jakarta, January 30th, 2007

The Scope of Work for the Study on the Improvement of Farmers' Income: Agricultural Processing and Rural Micro Finance (hereinafter referred to as "the Study") was agreed upon between the Ministry of Agriculture (hereinafter referred to as "MOA") and the Japan International Cooperation Agency (hereinafter referred to as "JICA") on November 5th, 2004. In accordance with the Scope of Work, the Study Team (hereinafter referred to as "the JICA Study Team") carried out the 1st Work in Japan during the period in early to mid January, 2007 to prepare the Interim Report.

The meeting on the Interim Report was held between the Coordination Committee for the Study (hereinafter referred to as "the Committee") and JICA Study Team on January 25th, 2007. The attendants of the meeting are listed in the attachment.

The meeting was chaired and opened by Mr. Basit, Head of Division of Policy & Program Planning, MOA on behalf of the Director of Bureau of Planning. Then, Mr. N. Morioka, Team Leader of the JICA Study Team, and the Members provided the presentation on the Interim Report.

After a series of discussions with the Committee the Interim Report was in principle agreed and received by the Indonesian side with the mutual confirmation on the following issues:

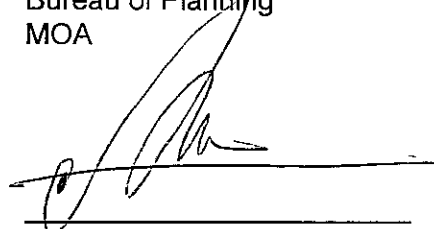
- (1) Center of Agricultural Financing pointed out that the Interim Report is still along the way to explain the linkage between processing and micro-finance. JICA Study Team agreed that the ideas on the linkage will be developed and explained in Progress Report (2).
- (2) Center of Agricultural Financing mentioned that investment needs for proposed business model of processing and marketing would be studied so as to enable

MOA to prepare future program. The Study Team answered that this matter will be discussed with MOA during the Study.

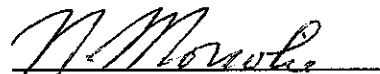
- (3) In association with (2) above, Center of Agricultural Financing also stated that the budget scale should be estimated for micro-finance scheme based on the implementation model presented in the Interim Report. The Study Team answered that the budget scale as well as the plan will be discussed with MOA in the course of the Study.
- (4) Bureau of Planning requested JICA Study Team to finalize policy recommendation to be pursued by MOA based on respective proposed implementation models. The Study Team replied that the policy recommendation will be finalized through the discussion with MOA.
- (5) Bureau of Planning requested that the Study Team be careful in the explanation during socialization meeting in each Kabupaten since SKR applications, the basis of implementation models, have not been approved yet otherwise socialization meeting will build up stakeholders' superfluous expectation. The Study Team answered that the explanation in socialization meeting will be made with carefully bearing status of SKR application and implementation models in mind.



Dr. Ir. Mappaona
Director
Bureau of Planning
MOA



Dr. Ir. Abdul Basit
Head, Policy & Planning Division
Bureau of Planning
MOA



Mr. MORIOKA Naoto
Team Leader
JICA Study Team

AM
CF

LIST OF ATTENDANTS

I. Ministry of Agriculture

1. Mr. Abdul Basit : Bureau of Planning
2. Mr. Maringan R : Bureau of Planning
3. Ms. Yulistiana Utami : Bureau of Planning
4. Ms. Cut Ratna : Bureau of Planning
5. Ms. Rika A : Bureau of Planning
6. Mr. B Darwis : Bureau of Planning
7. Mr. Yandri : Center of Agricultural Financing
8. Ms. Priliani Setiyaningsih : Bureau of Foreign Cooperation
9. Ms. Feroza Silvia : Directorate General of Food Crop Production
10. Ms. Renata D. N. Damanik : Directorate General of Food Crop Production
11. Mr. A. Widodo Heru : Directorate General of Horticulture
12. Mr. Samsuardi : Directorate General of Horticulture
13. Mr. Sv. Primadona : Directorate General of livestock
14. Ms. Ati Rohaeti : Directorate General of livestock
15. Ms. Asih : Directorate General of livestock
16. Mr. Sudarwanto : Directorate General of Processing and Marketing for Agricultural Product
17. Mr. Katrun Nida : Directorate Estate Crops
18. Mr. Teguh Senoadji : Secretariat General of Ministry of Agriculture

II Participants from JICA Study Team:

19. Mr. MORIOKA Naoto : Team Leader of the Study Team / Rural Development / Assistance Trend
20. Ms. KOBAYASHI Yuki : Rural Microfinance
21. Mr. AKUTSU Takao : Agriculture / Agricultural Processing
22. Mr. OTSUKA Shigeya : Institution / Social Consideration
23. Ms. Maya Augustin : Assistant for Rural Microfinance
24. Ms. Retno Wijayanti : Assistant for Rural Microfinance
25. Mr. Kasnanto : Assistant for Processing and Marketing

Attachment-5
Minutes of Meeting for Progress Report 2

**MINUTES OF MEETING ON
COORDINATION COMMITTEE ON THE PROGRESS REPORT (2)
FOR
THE STUDY ON THE IMPEOVEMENT OF FARMERS' INCOME:
AGRICULTURAL PROCESSING AND RURAL MICRO FINANCE
IN THE REPUBLIC OF INDONESIA**

**AGREED UPON
BETWEEN
MINISTRY OF AGRICULTURE (MOA)
AND
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY (JICA)**

Jakarta, March 16th, 2007

The Scope of Work for the Study on the Improvement of Farmers' Income: Agricultural Processing and Rural Micro Finance (hereinafter referred to as "the Study") was agreed upon between the Ministry of Agriculture (hereinafter referred to as "MOA") and the Japan International Cooperation Agency (hereinafter referred to as "JICA") on November 5th, 2004. In accordance with the Scope of Work, the Study Team (hereinafter referred to as "the JICA Study Team") carried out the 3rd Work in Indonesia during the period from late January to the beginning of March, 2007 to conduct socialization in the Study Area and prepare the Progress Report (2).

The meeting on the Progress Report (2) was held between the Coordination Committee for the Study (hereinafter referred to as "the Committee") and JICA Study Team on March 9th, 2007. The attendants of the meeting are listed in the attachment.

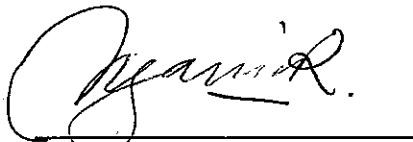
The meeting was opened by Mr. Maringan, Bureau of Planning and chaired and by Mr. Agustin Z. Karnaen, Director of Post Harvest, DG Processing and Marketing for Agricultural Product, on behalf of Director of Bureau of Planning Bureau, MOA. Then, Mr. N. Morioka, Team Leader of the JICA Study Team provided the presentation on the Progress Report (2).

After a series of discussions with the Committee the Progress Report (2) was in principle agreed and received by the Indonesian side with the mutual confirmation on the following issues:

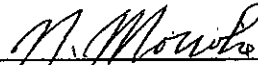
- (1) Directorate of Post Harvest Handling requested to include the post harvest aspect in the plan. The Study Team explained that input and time are limiting to conduct the study on post harvest, but would include in the plan along with the context of processing requirement.
- (2) Center of Agricultural Financing and Bureau of Foreign Cooperation pointed out that the implementation steps and investment scale should be further studied and

estimated based on the model presented in the Progress Report (2). The Study Team answered that the steps and investment scale will be assumed based on the business models in the course of the Study.

- (3) Counterpart from DG Processing and Marketing for Agricultural Product expressed the appreciation for the effort on socialization meetings carried out in each Kabupaten during the 3rd work in Indonesia. The Study Team reciprocally appreciated the cooperation for the arrangement of socialization meetings made by MOA & concerned DINAS, and replied that the process of socialization pursued in this Study is surely important step to derive opinion from stakeholders and to prepare practical improvement plan.
- (4) Bureau of Planning expected Study Team to consider the comments given in the meeting to prepare Draft Final Report in May. In addition, participants are requested to forward additional comments to Bureau of Planning, if any, by March 16th, 2007.



Mr. Maringan R.
Bureau of Planning
MOA



Mr. MORIOKA Naoto
Team Leader
JICA Study Team

LIST OF ATTENDANTS

I. Ministry of Agriculture

1. Agustin Z. Karnaen : Director, Post Harvest Handling Directorate General of Processing and Marketing for Agricultural Product
2. Maringan. R : Bureau of Planning
3. Yandri : Center for Agricultural Financing
4. Yusral Tahir : Bureau of Foreign Cooperation
5. Andi Arnida M. : Directorate General of Processing and Marketing for Agricultural Product
6. Renny : Directorate General of Processing and Marketing for Agricultural Product
7. Destilisna : Directorate General of Processing and Marketing for Agricultural Product
8. Ani R. : Directorate General of Processing and Marketing for Agricultural Product
9. Danier : Directorate General of Processing and Marketing for Agricultural Product
10. Kasmin Nadeak : Directorate General of Food Crop Production
11. Warsito : Directorate General of Food Crop Production
12. Tania : Directorate General of Horticulture
13. Samsuaridi : Directorate General of Horticulture
14. Tommy : Directorate General of Horticulture
15. Marindu : SKR Secretariat

II Participants from JICA Study Team:

16. Mr. MORIOKA Naoto : Team Leader of the Study Team / Rural Development / Assistance Trend
17. Mr. AKUTSU Takao : Agriculture / Agricultural Processing
18. Mr. OTSUKA Shigeya : Institution / Social Consideration
19. Ms. Maya Augustin : Assistant for Rural Microfinance
20. Dudi Fahmadi : Assistant for Institution
21. Mr. Kasnanto : Assistant for Processing and Marketing

Attachment-6
Minutes of Meeting for Draft Final Report

MINUTES OF MEETING ON
COORDINATION COMMITTEE ON THE DRAFT FINAL REPORT
FOR
THE STUDY ON THE IMPEOVEMENT OF FARMERS' INCOME:
AGRICULTURAL PROCESSING AND RURAL MICRO FINANCE
IN THE REPUBLIC OF INDONESIA

AGREED UPON
BETWEEN
MINISTRY OF AGRICULTURE (MOA)
AND
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY (JICA)

Jakarta, June 7th, 2007

In accordance with the Scope of Work, the Study Team (hereinafter referred to as "the JICA Study Team") carried out the 4th Work in Indonesia during the period from May 13th to June 11th, 2007 for dissemination of the Draft Final Report.

Dissemination Seminar was held in Jakarta on May 31st 2007, as the Coordination Committee meeting on the Draft Final Report inviting the Committee members, counterparts and personnel concerned in the Ministry, after a series of dissemination seminars in West Java and East Java Provinces.

Dissemination Seminar was opened by Dr. Ir. Mappaona, Head of Bureau of Planning, MOA, and chaired by Dr. Ananto Kusuma Seta, Directorate General of Processing & Marketing of Agricultural Products) and Mr. Yandri, Center of Agricultural Finance. Then, the JICA Study Team provided the presentation on the Draft Final Report.

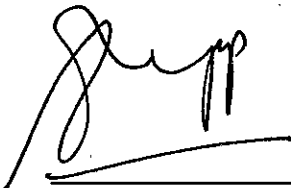
After a series of discussions with the participants the Draft Final Report was in principle agreed and received by the Indonesian side with the mutual confirmation on the following issues, including issues raised at provincial seminars:

(1) Directorate General of Horticulture inquired about the proposed business model, particularly from the following view points: (i) mechanism of proposed projects including term, revolving procedure, implementation organization etc. and (ii) whether the fund will cover not only processing equipment but also marketing and other activities. The Study Team briefly reiterated as follows:

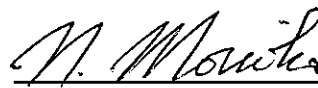
- Overall project period will be 5 years with 1 year CF-SKR support;
- The fund for farmers group is divided into two portion, loan and grant portions. Loan portion is for procurement of equipment, machinery, materials for initial operation. Grant portion covers such support for farmers like employment of

Business Development Service (BDS) Providers. Procurement under loan and grant would be made under the initiative of farmers' group with the support of DINAS.

- The fund repaid from the farmers group is to be accumulated and revolved in Province or Central level and to be extended to other groups;
 - In some farmers' group, marketing equipment is included in loan, but marketing activities are not included in the fund. Marketing activities will be supported by BDS and DINAS under grant portion; and
 - Memorandum of Understanding would be made between DINAS Province and farmers' group for activity plan and fund utilization.
- (2) Directorate General of Processing and Marketing for Agricultural Product inquired whether proposed budget can be disbursed only for sample commodities or other activities as well. This matter was also discussed in the East Java seminar. The Study Team replied that fund is not for other purpose, and farmers groups will expand their activities after accumulating assets and capital from the proposed project.
- (3) The JICA Study Team reported that in the provincial seminars some farmers' groups expressed that interest rate in the proposed model is high, and requested consideration. The Study Team explained that business-minded groups have been selected as sample groups for proposed business model in the Study, and exit strategy is applied to create their own assets and capitals after the project to access the commercial banking services.
- (4) The Study Team explained that in the seminar in West Java automatic hatchery machine for duck farming was emphasized to be effective at prospective capable groups in reducing work load as well as avoiding simple mistakes caused under their hard working condition so as to eventually improve incubation productivity. In addition, the Team pointed out that quality standardization of commodities will not function unless market demands such standard. The participants in the above seminar agreed to these points.
- (5) The Study Team stated that the Final Report will be prepared based on the discussion and comments and opinions made in the dissemination seminar by the middle of July.



Dr. Ir. Mappaona
Head, Bureau of Planning
Ministry of Agriculture



Mr. MORIOKA Naoto
Team Leader
JICA Study Team

LIST OF ATTENDANTS

I. Ministry of Agriculture

1. Mr. Mappaona : Director Bureau of Planning
2. Mr. Ananto K Seta : Directorate General of Processing and Marketing for Agricultural Product
3. Mr. Yandri : Center of Agricultural Financing
4. Mr. Abdul Basit : Head, Policy & Planning Division Bureau of Planning
5. Mr. Maringan : Bureau of Planning
6. Ms. Yuli Sri Wilanti : Center of Agricultural Financing
7. Ms. Andi Arnida : Directorate General of Processing and Marketing for Agricultural Product
8. Ms. Renata DN Damanik : Directorate General of BUKABI
9. Mr. Freddy : Directorate General of Horticulture
10. Ms. Yenny N.C : Secretariat Directorate General of Horticulture
11. Mr. Djuli : Directorate General of Livestock
12. Mr. M. Nasrul : Directorate General of Processing and Marketing for Agricultural Product
13. Mr. Katrun Nida : Directorate of Estate Crops
14. Mr. Syafrudin TP : Directorate General of Food Crops
15. Mr. Joseph Reksa : Bureau of Planning
16. Mr. Candra : Bureau Foreign Cooperation
17. Ms. Eka Susanti : Secretariat Directorate General Land and Water Management
18. Ms. Yenny NS : Secretariat General Horticulture
19. Mr. Gatut S : Directorate General Food Crops
20. Mr. Susiany : Directorate General Fruits
21. Mr. Dina R. : Directorate General Fruits
22. Ms. Anna : Bureau of Planning
23. Mr. B. Darwis : Bureau of Planning
24. Ms. Cut Rama : Bureau of Planning
25. Ms. Ratna Sariati : Directorate General of Processing and Marketing for Agricultural Product
26. Ms. Shinta D : Secretariat Directorate General Livestock
27. Ms. Aslila R Daulay : Secretariat Directorate General Livestock

- | | | | |
|-----|-----------------|---|--|
| 28. | Mr. Bambang P. | : | BKP (Badan Ketahanan Pangan/ Food Security Board) |
| 29. | Mr. Setyo Adhi | : | Directorate General of Processing and Marketing for Agricultural Product |
| 30. | Mr. Ketut M. | : | Research and Development |
| 31. | Ms. Rika A | : | Bureau of Planning |
| 32. | Mr. Maringan | : | Bureau of Planning |
| 33. | Ms. Murtini | : | Bureau of Planning |
| 34. | Ms. Ati Rohaeti | : | Directorate General of Livestock |
| 35. | Mr. Primadona | : | Directorate General of Livestock |

II Participants from JICA Study Team:

- | | | | |
|-----|---------------------|---|--|
| 36. | Mr. MORIOKA Naoto | : | Team Leader of the Study Team / Rural Development / Assistance Trend |
| 37. | Mr. AKUTSU Takao | : | Agriculture / Agricultural Processing Expert |
| 38. | Ms. KOBAYASHI Yuki | : | Rural Microfinance Expert |
| 39. | Mr. OTSUKA Shigeya | : | Institution / Social Consideration |
| 40. | Ms. Maya Augustin | : | Assistant for Rural Microfinance |
| 41. | Ms. Retno Wijayanti | : | Assistant for Rural Microfinance |
| 42. | Mr. Tonton S. | : | Facilitator |
| 43. | Mr. Kasnanto | : | Assistant for Processing and Marketing |

III Others

- | | | | |
|-----|-----------------------|---|-----------------------|
| 44. | Mr. YAMANE Makoto | : | JICA Indonesia Office |
| 45. | Mr. WATANABE Kenji | : | JICA Expert |
| 46. | Mr. SATO Masahito | : | JICA Expert |
| 47. | Mr. Charles Nicholson | : | REI-Indonesia |
| 48. | Mr. Wahyu Tri Mulyo | : | REI-Indonesia |
| 49. | Mr. M. Yusuf | : | BALITKABI |
| 50. | Mr. Yudi Widodo | : | BALITKABI |
| 51. | Ms. Erliana Ginting | : | BALITKABI |
| 52. | Mr. Agus Praptomo | : | PINBUK |